

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI INTERMEDIASI**

**PERBANKAN PASCA KRISIS**

**(Studi kasus pada Bank Umum)**



**SKRIPSI**

**Ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk mendapatkan Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi**

**Disusun Oleh :**

**Siti Yuli Rahmawati**

**NIM. F0101007**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**2005**

## **ABSTRAK**

Siti Yuli Rahmawati  
NIM. F0101007

### **ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN PASCA KRISIS (Studi kasus pada Bank Umum)**

Setelah dilanda krisis moneter dan ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997, proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlangsung menuju ke arah yang diharapkan, yang ditunjukkan dengan pergerakan nilai tukar yang stabil dan laju inflasi yang rendah. Hal ini telah memberikan ruang gerak dan ekspektasi pasar untuk menurunkan suku bunga SBI. Akan tetapi karena berbagai penyebab, penurunan suku bunga ini belum sepenuhnya ditransmisikan dalam penurunan suku bunga kredit yang diharapkan dapat mendorong investasi dan konsumsi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan belum dapat berjalan dengan baik. Walaupun dilihat dari beberapa indikator, fungsi intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit telah menunjukkan perbaikan, namun pertumbuhan itu belum menjadi pelumas dalam mendorong perekonomian Indonesia untuk kembali pada tingkat yang seharusnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan pasca krisis.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel-variabel moneter dan perbankan yang meliputi: suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan ekonomi, dan kredit macet terhadap jumlah kredit perbankan yang disalurkan. Dalam hal ini dipilih variabel jumlah kredit sebagai indikator dalam pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan, karena hal ini terkait langsung dengan sektor riil dari sisi penyaluran dana. Selain itu apa terdapat kausalitas antara jumlah kredit dengan pertumbuhan ekonomi? Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel moneter dan perbankan terhadap jumlah kredit serta mengetahui kausalitas antara jumlah kredit dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian berdasarkan uji kausalitas granger antara jumlah kredit dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pada lag 1 terdapat hubungan satu arah, yaitu jumlah kredit dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada lag 2, 3 terdapat hubungan satu arah, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan jumlah kredit. Berdasarkan hasil uji dengan ECM, menunjukkan bahwa variabel suku bunga SBI dalam jangka pendek memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit, dan dalam jangka panjang memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap jumlah kredit. Sedangkan kurs, dalam jangka pendek memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan jumlah kredit, akan tetapi dalam jangka panjang kurs memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap jumlah kredit. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek memiliki hubungan negatif signifikan terhadap jumlah kredit, akan tetapi dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi memiliki

hubungan positif dan tidak signifikan dengan jumlah kredit. Sebagai salah satu indikator perbankan, kredit macet dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang memiliki hubungan negatif terhadap jumlah kredit, akan tetapi dalam jangka panjang kredit macet tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Berdasar hasil uji secara bersama-sama, semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan terhadap jumlah kredit

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran antara lain: perbankan hendaknya dapat meningkatkan penyaluran kredit dan mengurangi penempatan dan pada SBI dan obligasi negara, BI diharapkan tidak hanya menggunakan suku bunga SBI sebagai instrumen pokok dalam penyaluran kredit yang akan perkembangan memengaruhi sektor riil, tetapi menggunakan instrumen lain seperti himbauan moral dan cadangan minimum, BI hendaknya melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit dalam rupiah, perbankan hendaknya dapat mengembangkan penyaluran kredit bagi sektor retail. Sementara itu bagi pemerintah hendaknya dapat menyediakan alternatif pembiayaan lain bagi sektor riil serta dapat menciptakan kondisi sosial, politik yang stabil. Sedangkan bagi sektor riil hendaknya dapat memberdayakan sumber dana yang tersedia yang dalam hal ini adalah jumlah kredit yang disalurkan perbankan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perencanaan akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai dengan tersedianya faktor-faktor produksi yang cukup untuk menghasilkan output yang selalu meningkat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian, maka perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan usaha dapatlah disebut sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku, kemampuan teknologi, manajemen dan lain-lain sebagai suatu sumber ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian dengan eksistensi perkreditan sebagai sumber modal

mempunyai korelasi yang sangat erat, baik bersifat negatif maupun positif (Muljono, 1993 : 1).

Sedangkan apabila ditinjau dari sisi yang lain yaitu dari sudut pandang perbankan yang menyediakan sumber dana yang berbentuk perkreditan tersebut, maka kredit akan mempunyai suatu kedudukan yang sangat istimewa, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat. Di Indonesia, sebagaimana dalam undang-undang, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( Bank Indonesia, 2003 ). Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjadi perantara kepentingan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan fungsinya ini bank disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara.

Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tersebut memiliki kepercayaan terhadap bank. Apabila proses intermediasi berjalan dengan baik, maka semua pihak yaitu bank, pihak yang mempunyai kelebihan dana, pihak yang membutuhkan dana dalam perekonomian secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari keberadaan suatu bank. Pihak yang mempunyai kelebihan dana akan memperoleh manfaat berupa manfaat berupa pendapatan bunga dari dana yang disimpan di bank.

Sementara itu, pihak yang membutuhkan dana memperoleh manfaat berupa ketersediaan dana dari bank untuk melakukan investasi atau produksi. Bank sendiri akan memperoleh manfaat berupa selisih pendapatan dan biaya bunga yang disebut *spread* (PPSK Bank Indonesia, 2003 : 130). Di sisi lain, perekonomian juga mendapatkan manfaat berupa mekanisme alokasi sumber-sumber dana secara efektif dan efisien. Hal ini berarti bank sebagai lembaga intermediasi merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha berupa investasi maupun produksi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan perbankan adalah untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas pembayaran sehingga mengurangi berbagai hambatan dalam kegiatan perekonomian dan menghemat biaya ekonomi tinggi. Selain memiliki kedua fungsi bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter. Melalui berbagai instrumen yang dimiliki, bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian dan suku bunga perbankan yang kemudian akan mempengaruhi jumlah kredit perbankan dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah investasi dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

Apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. Dengan terganggunya fungsi intermediasi tersebut, maka alokasi dan perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem

perekonomian tidak lancar dan tidak efisien. Selain itu, sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat efektifitas kebijakan moneter.

Efektifitas kebijakan moneter sangat tergantung pada kondisi dari dunia perbankan, terutama dalam penyaluran kredit. Secara mekanisme transmisi kebijakan moneter harus melewati sektor perbankan. Agar dapat mencapai sasaran, otoritas moneter harus memahami secara kompleks mengenai reaksi sektor perbankan terhadap perubahan dalam kebijakan moneter.

Pada kenyataannya bank sangat erat kaitannya dengan sektor riil melalui aktivitasnya dalam penyaluran kredit. Individu dan perusahaan memperoleh kredit dari bank untuk membiayai belanja konsumsi maupun investasi. Permintaan kredit dilandasi kebutuhan untuk melakukan pembelanjaan. Di lain pihak, simpanan dilandasi oleh motif menunda pembelanjaan.

Dengan demikian, permintaan barang dan jasa lebih dipengaruhi oleh kredit dibandingkan oleh simpanan. Ekspansi kredit akan mengakibatkan peningkatan dan penawaran agregatif yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat output dan harga. Oleh karena itu kebijakan moneter harus dirancang untuk secara langsung dapat mempengaruhi keputusan bank dalam mengalokasikan kredit.

Akan tetapi, otoritas moneter tidak selalu bisa mengandalkan kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas sektor riil. Teori moneter konvensional selalu mengasumsikan bahwa turunnya suku bunga akan diikuti naiknya investasi dan output nasional. Namun, hal ini tidak selalu terjadi.

Penurunan suku bunga SBI dalam dua tahun terakhir tidak disertai dengan penurunan suku bunga kredit dengan kecepatan yang sama. Selain itu, lambannya penyesuaian suku bunga kredit telah mengakibatkan suku bunga kredit riil justru meningkat. Artinya, dunia usaha menjadi terbebani biaya modal yang lebih besar. Oleh karena itu investasi kurang berkembang dan di lain pihak perbankan mengalami kelebihan likuiditas.

Setelah dilanda krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak 1997, proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berjalan menuju ke arah yang diharapkan. Walaupun proses pemulihan ekonomi masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara- negara Asia lainnya yang terkena krisis, kinerja perekonomian makro telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti.

Kestabilan moneter dan makroekonomi yang telah dicapai ini sebuah kondisi yang harus dijaga keberadaannya, karena sebuah “*element of continuity*” (Abdullah, 2000). Menciptakan stabilitas inilah yang menjadi tugas utama Bank Indonesia, seperti yang dimandatkan dalam UU. No. 23 Tahun 1999.

Membaiknya indikator makroekonomi diperlukan akan menjadi stimulus dalam menyalurkan kredit. Dalam triwulan I tahun 2004, kondisi makro ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi masih terus berlangsung ke arah yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sesuai dengan perkiraan dengan didukung oleh stabilitas kondisi moneter dan keuangan yang kondusif antara lain ditunjukkan nilai

tukar rupiah yang relatif stabil, rendahnya laju inflasi serta uang primer yang masih beredar di bawah batas indikatifnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I tahun 2004 diperkirakan membaik hingga mencapai 4,35 % (yoy) dengan konsumsi sebagai penyumbang terbesar kinerja perekonomian periode tersebut. Secara sektoral, pertumbuhan positif hampir terjadi di seluruh sektor dengan sumbangan terbesar berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor listrik (Bank Indonesia, 2004).

Nilai tukar rupiah bergerak stabil pada kisaran rata-rata Rp. 8.300 – Rp. 8.500 per dolar AS. Stabilitas nilai tukar rupiah terutama didorong oleh kondusifnya fundamental ekonomi domestik, ekspektasi pasar yang positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, meningkatnya kepercayaan investor serta terpeliharanya stabilitas sosial politik.

Laju inflasi dalam kecenderungan yang menurun yakni sebesar 5,11 %. Penurunan tersebut terutama terjadi pada kelompok bahan makanan terkait dengan melimpahnya pasokan baik karena panen raya maupun impor. Rendahnya dampak harga-harga yang ditetapkan pemerintah (*administered prices*) dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil.

Sejalan dengan kondisi ekonomi moneter dan perbankan di atas, kebijakan moneter Bank Indonesia ke depan tetap diarahkan untuk tetap mempertahankan stabilitas moneter dalam upaya mencapai sasaran inflasi jangka menengah dengan tetap memperkuat proses pemulihan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, ruang

bagi penurunan suku bunga SBI masih terbuka namun harus dilakukan secara hati-hati dan disediakan dengan upaya pencapaian sasaran inflasi.

Walaupun kinerja inflasi saat ini telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, bukan berarti kebijakan moneter tidak memiliki tantangan lagi. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah, salah satu tantangan bagi efektifitas kebijakan moneter adalah transmisi kebijakan moneter terkait belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan (Abdullah, 2003). Tantangan utama bagi kebijakan moneter pasca krisis adalah kurang efektifnya kebijakan moneter dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian. Permasalahan ini terutama berakar dari kondisi neraca pembayaran yang masih belum sepenuhnya normal dan belum pulihnya intermediasi perbankan. Permasalahan ini menimbulkan berbagai kondisi negatif dalam sistem moneter yaitu : (1.) perbankan tergantung pada sumber penempatan dari surat-surat berharga seperti SBI dan obligasi pemerintah, (2) perbankan dalam kondisi kelebihan likuiditas yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar, (3) dan sebagai dampaknya biaya pengendalian moneter oleh BI menjadi mahal.

Dalam kondisi demikian naiknya suku bunga untuk mengurangi tekanan inflasi dan nilai tukar seringkali tidak direspon oleh kenaikan suku bunga deposito perbankan dengan seimbang karena perbankan cenderung memanfaatkan margin keuntungan dari selisih suku bunga SBI sebagai instrumen penempatan dan deposito sebagai instrumen dana (Burhanudin, 2003). Kondisi ini menyebabkan kebijakan moneter untuk menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat menjadi tidak efektif.

Rendahnya efektifitas kebijakan moneter juga terjadi pada saat kebijakan moneter bersifat ekspansif melalui penurunan suku bunga seperti yang terjadi pada tahun 2002-2003. Penurunan suku bunga SBI yang diharapkan dapat mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit belum diikuti oleh penurunan suku bunga kredit. Faktor yang memengaruhi rigiditas suku bunga kredit ini berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal bank (Hadad, 2003). Penyebab dari faktor internal bank antara lain adalah struktur aktiva produktif bank yang sebagian returnnya sangat terpengaruh oleh penurunan suku bunga SBI, sehingga bank perlu menahan penurunan suku bunga kreditnya untuk mempertahankan profit marginnya, bank masih menyimpan dana lama yang cost of fundnya tinggi. Sedangkan faktor dari sisi eksternal adalah banyaknya nasabah yang masih menunggu penurunan suku bunga lebih lanjut sebelum mengadakan pinjaman kepada bank.

Rigiditas suku bunga pinjaman ini merupakan penghambat pergerakan sektor riil yang diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi. Walaupun sejak bulan Januari 2003 s/d Juni 2003 Bank Indonesia secara bertahap telah menurunkan suku bunga SBI menjadi sebesar 280 poin basis poin. Namun demikian, suku bunga kredit dalam periode yang sama hanya turun 64 basis poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan suku bunga SBI dan COF tidak diikuti dengan penurunan suku bunga kredit, sehingga proses intermediasi tidak dapat berjalan dengan lancar.

Sampai dengan triwulan I tahun 2004, jumlah aset perbankan mencapai Rp. 1.157,2 trilyun. Sementara itu, total dana pihak ketiga (DPK)

perbankan menurun Rp. 11,5 triliun dari triwulan sebelumnya menjadi Rp. 877,1 triliun terutama disebabkan karena penarikan dana BPPN sekitar Rp. 2,5 triliun serta kemungkinan pengalihan reksa dana sebesar Rp. 6 triliun. Sudah cukup berhati-hatinya perbankan dalam menyalurkan kredit tercermin dari posisi kredit yang mengalami sedikit peningkatan. Posisi kredit pada triwulan I tahun 2004 meningkat Rp. 0,1 triliun ( 0,02 % ) menjadi Rp. 477,3 triliun.

Perkembangan kredit baru sampai dengan triwulan I tahun 2004 mencapai Rp. 4,3 triliun dengan 53,97 nya disalurkan untuk sektor UKM. Menurut jenis penggunaannya, sebagian besar kredit baru disalurkan untuk kepentingan kredit modal kerja sebesar Rp. 45,6 %, oleh masih tingginya suku bunga kredit bila dibandingkan dengan suku bunga apabila bank mengeluarkan obligasi serta masih relatif rendahnya permintaan kredit yang tercermin dari peningkatan *undirbused loan* ( Bank Indonesia, 2004 ).

Kondisi ini mengakibatkan bank mengalami over likuid, sehingga dana-dana tersebut ditempatkan pada SBI. Dengan perkembangan tersebut, loan to deposit ratio ( LDR ) perbankan nasional tercatat sebesar 42,9 %. Dengan tingkat LDR ini, dapat dikatakan bahwa pihak perbankan belum mampu menjalankan fungsi intermediasi terutama untuk menyalurkan kreditnya kepada sektor riil. Menurut pandangan Bank Indonesia, LDR yang ideal sebesar 60 – 70 %. Hal ini menyebabkan fungsi perbankan sebagai penggerak utama pembangunan kurang berhasil.

Tingkat suku bunga pinjaman bagi sektor produktif yang masih tinggi yaitu sebesar 14 – 16 % per tahun. Sementara itu, suku bunga tabungan rata-

rata hanya 7 – 8 % per tahun. Hal ini berarti spread suku bunga tabungan dengan bunga pinjaman yang diperoleh perbankan cukup tinggi. Hal ini disebabkan perbankan harus mengikuti aturan ketat dari Bank Indonesia yang pada gilirannya perbankan harus tetap berhati-hati dalam mengeluarkan kreditnya.

**Data Indikator perbankan Nasional (dalam triliun rupiah)**

No.	Item	Feb-04	Mar-04	Apr-04	Mei-04	Jun-04	Jul-04
1	Penghimpunan Dana	963.5	963.7	959.3	986.8	1001	997.6
	Pinjaman yang diterima	9.7	9.1	8.6	10.3	9.8	9.4
	Surat Berharga Yang diterbitkan	11.4	11.5	11.7	12.3	12.7	12.7
	Dana Pihak Ketiga	877.1	875.1	872.9	895.1	912.8	909.5
	a. Dalam Rupiah	730.7	728.2	729.7	741.6	759.6	759.2
	b. Dalam Valas	146.4	146.9	143.3	153.5	153.2	150.3
	Antar Bank Passiva	65.3	68	66.1	69.2	65.6	66
2	Penyaluran Dana	794.3	769.9	786.7	806.3	823.7	818.1
	Sertifikat Bank Indonesia	136.8	132.2	120.3	106.7	110.6	103.5
	Surat Berharga Lainnya	71.3	71.6	71.8	70.5	77.1	78.6
	Antar Bank aktiva	102.8	100.2	91.8	108.7	100.2	98.8
	Penyertaan	6	6.1	6.8	6.9	7.1	7.1
	Kredit	477.3	485.9	496.1	513.4	528.7	530.2
	a. Dalam Rupiah	361	367.6	375.7	384.5	397.7	401.8
	b. Dalam Valas	116.4	118.3	120.3	129	131	128.4
3	Asset	1152.7	1150	1145	1179	1185.7	1182.8
4	Permodalan	120.2	120.9	120.7	119.8	119.8	107.1
5	Kinerja						
	Non Performing Loan						
	a. Nilai	39.6	37.7	38.4	39.8	39.9	38.9
	b. Rasio Terhadap Kredit (%)	8.3	7.8	7.7	7.8	7.5	7.3
	Laba/Rugi	3.3	3.2	2.7	3.6	3.6	3.4
	a. Operasional	2.1	1.6	2.4	2.2	2.1	13.4
	b. Non Operasional	1.2	1.5	0.3	1.5	1.5	-10
	Net Interest Margin	5.1	5.7	5.3	5.3	5.4	5.4
6	Catatan						
	Jumlah Bank	138	138	136	136	136	136
	Jumlah Kantor Bank	7771	7803	7791	7843	7848	7873

Sumber: Bank Indonesia, 2004

Meskipun tingkat LDR belum kembali kemasa sebelum krisis, tetapi fungsi intermediasi perbankan nasional secara bertahap terus menunjukkan perbaikan, terutama pertumbuhan kredit di sektor mikro usaha kecil dan menengah (UMKM) dan konsumen. Dalam perkembangan selanjutnya, posisi kredit perbankan mulai bulan Februari 2004 sampai dengan Juli 2004 senantiasa menunjukkan peningkatan. Pada bulan Juli 2004, posisi kredit mencapai Rp. 530,2 Triliun.

Peningkatan kredit tersebut dari sisi penawaran antara lain disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga (DPK), sebagai dasar data indikator perbankan ditunjukkan bahwa DPK dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2004 mengalami peningkatan yang mencapai Rp. 909,5 triliun pada bulan Juli 2004.

Adapun dari sisi permintaan, kenaikan kredit didorong oleh rendahnya tingkat suku kredit perbankan, meskipun demikian, dalam bulan Juni 2004, terdapat tambahan undisbursed loan, kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan, yaitu Rp. 1,7 Triliun. Secara keseluruhan, kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan pada pertengahan tahun 2004 mencapai Rp. 127,6 triliun.

Tingginya jumlah kredit yang telah disetujui bank, tetapi belum ditarik tersebut menunjukkan bahwa sektor riil masih menghadapi banyak kendala, sehingga hanya memiliki sedikit ruang gerak. Di sini proporsi kredit terbesar adalah kredit konsumsi, sementara kredit investasi paling rendah.

Dari sudut kualitas kredit, perkembangan nilai NPL bulan Februari sampai dengan juli 2004 tidak banyak mengalami perubahan. Aspek

permodalan sampai dengan juli 2004 senantiasa mengalami penurunan akan tetapi masih memerlukan kebutuhan minimum yaitu sebesar 20,9 persen.

Meskipun perkembangan indikator perbankan mulai membaik yang menunjukkan fungsi perbaikan pula pada fungsi intermediasi, akan tetapi pada tahun ini perbankan juga menghadapi sejumlah kendala yang akan memangkas potensi pertumbuhan. Kendala itu antara lain :

1. Kenaikan harga minyak.

Harga minyak yang tinggi cukup mengawatirkan, karena hal ini akan mengganggu kemampuan nasabah membayar hutang. Harga minyak yang naik tajam itu akan membuat biaya-biaya naik tajam sehingga akan mengurangi masuknya dana luar. Kenaikan harga minyak yang tinggi juga akan menghambat pertumbuhan makro ekonomi, baik sehubungan dengan naiknya beban APBN maupun biaya yang harus ditanggung sektor riil.

Harga minyak juga sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah. Pelemahan nilai tukar rupiah mempunyai dampak yang berkebalikan bagi sektor bisnis yang berbeda. Bagi sebagian sektor bisnis yang berpendapatan dollar AS dan berbiaya rupiah, hal ini akan menguntungkan. Sementara bagi yang berpendapatan rupiah, dan memiliki biaya atau utang dalam dollar AS, hal ini akan sangat merugikan. Namun, secara umum pelemahan rupiah ini bisa dikatakan merugikan. Bagi perbankan sendiri, pelemahan rupiah akan meningkatkan resiko kredit valuta asing.

## 2. Kenaikan suku bunga *The Fed*.

Dengan adanya kenaikan suku bunga *The Fed* secara langsung akan mempengaruhi biaya dana (*cost of fund*) karena dalam hal ini BI akan segera menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia(SBI) yang kemudian akan diikuti oleh menaikkan suku bunga kredit.

Peningkatan suku bunga kredit ini akan meningkatkan biaya bagi debitur untuk membayar hutang. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga kredit atau mengendalikan laju pertumbuhan kredit untuk mengantisipasi kenaikan NPL. Akan tetapi , perbankan dapat juga mengambil kedua alternatif pilihan tersebut yaitu menaikkan suku bunga kredit sekaligus mengendalikan laju pertumbuhan kredit.

## 3. Penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain.

Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan sekitar yang dipicu kebijakan perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung akan mempengaruhi kinerja debitur perbankan yang bergerak dalam bisnis ekspor. Permintaan yang turun akan membuat eksportir harus mengurangi produksi.

Dengan berbagai kendala tersebut diatas, maka akan menjadi tantangan berat bagi perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dengan kondisi demikian ini, maka perbankan cenderung akan mengendalikan laju pertumbuhan kredit. Permasalahan ini akan menimbulkan tiga penyakit kronis dalam sistem moneter, yaitu : (1) perbankan tergantung pada sumber pendapatan dari surat-surat berharga seperti SBI dan obligasi pemerintah, (2) perbankan dalam kondisi

kelebihan likuiditas yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar , (3) dan sebagai dampaknya , biaya pengendalian moneter bank Indonesia menjadi mahal (Agung, et al., 2001).

Pengeluaran utama BI adalah untuk keperluan biaya operasi kebijakan moneter. Seluruh instrumen untuk kebijakan moneter dikelola oleh BI sehingga biaya bunga untuk pembayaran instrumen itu menjadi beban BI. Dengan kondisi perbankan yang demikian, perbankan akan banyak menempatkan dananya pada aset ini, sampai saat itu terdapat Rp. 160 triliun dana perbankan yang mengendap di BI dalam bentuk SBI (Mongid, 2004).

Jika suku bunga SBI setelah ada proyeksi kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (*The Fed*) akan berada pada kisaran 8% - 9 %, maka maka diperkirakan akan terdapat pengeluaran sebesar Rp. 15 triliun setahun. Selain itu, kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 3% menjadi 8 %, maka diperkirakan akan terdapat tambahan biaya antara Rp. 1 triliun hingga Rp. 2 triliun setahun (Mongid, 2004).

Fasilitas simpanan jangka pendek BI juga akan menyerap dana BI, selain itu, biaya untuk stabilisasi nilai tukar bisa mencapai Rp. 2 triliun karena sampai dua tahun ke depan peranan BI dalam melakukan operasi valas sangat penting. Jadi proyeksi biaya moneter BI tahun 2004 sebesar Rp. 18 triliun.

Proyeksi tahun ini dan tahun depan yang menggambarkan masih besarnya biaya moneter, didasari oleh beberapa fakta. Pertama, sampai saat ini perbankan masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan

Loan to deposit Ratio (LDR) yang masih dibawah 50% berarti untuk kedepan kecenderungan perbankan untuk menanamkan dananya pada SBI sanat kuat. Kedua, perkembangan sektor riil yang tersendat menyebabkan kebutuhan kredit untuk investasi dan aktivitas bisnis lain belum optimal konsumsi masih akan menjadi pendorong dominan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti sumber pertumbuhan ekonomi masih dari sektor konsumsi bukan dari investasi. Sektor konsumsi tidak banyak membutuhkan kredit sehingga dana yang berada di perbankan masih akan ke SBI. Ketiga, kecenderungan naiknya suku bunga global sebagai imbas dari kenaikan suku bunga *The Fed* tidak dapat terhindarkan lagi yang pada gilirannya akan mempengaruhi suku bunga SBI.

Dengan demikian, belum pulihnya fungsi intermediasi menyebabkan pengelolaan moneter menjadi tidak efisien. Bank lebih tertarik menanamkan kelebihan likuiditasnya pada asset yang aman seperti SBI dan bank Indonesia harus membayar bunga atas SBI tersebut. Pembayaran bunga ini akan menambah likuiditas lagi ke dalam sistem perbankan yang harus diserap kegiatan untuk menjaga likuiditas tidak berlebihan.

Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan fungsi intermediasi perbankan harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat sumber permasalahan yang dihadapi. Menurut Burhanudin Abdullah, terdapat empat dimensi pokok yang menjadi kunci pemulihan intermediasi yaitu (1) stabilitas ekonomi makro yang tercermin dari inflasi yang rendah, nilai tukar yang relatif stabil, dan suku bunga yang kondusif bagi perbankan

dan sektor dunia usaha; (2) struktur keuangan perbankan yang sehat dan regulasi perbankan yang sehat dan regulasi perbankan yang kondusif bagi perbankan dalam menyalurkan kredit; (3) struktur keuangan dunia usaha yang sehat sehingga meningkatkan kualitas debitur ; (4) infrastruktur dan iklim investasi yang mendukung bagi sektor riil (Abdullah, 2003).

Dengan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui kinerja perbankan nasional dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi pada periode Januari 1999 sampai dengan Desember 2003 yang mewakili kondisi pasca krisis yang dipengaruhi oleh kondisi moneter dan perbankan. Fungsi intermediasi perbankan nasional diwakili dengan jumlah kredit yang disalurkan. Sedangkan indikator moneter dan perbankan yang mempengaruhi bagi berjalannya fungsi intermediasi perbankan meliputi suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan ekonomi dan kredit macet. Oleh karena itu penulis mengambil judul : “ **Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Pasca Krisis (Studi Kasus Pada Bank Umum)** ”

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam analisis ini, hanya digunakan beberapa variabel yang mewakili indikator moneter dan perbankan yang mencerminkan kebijakan perbankan dalam fungsi inetermediasinya, yang meliputi: jumlah kredit sebagai variabel dependen dan suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan kredit, kredit macet sebagai variabel independen. Dipilih Variabel SBI, karena SBI merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dapat memepengaruhi kebijakan perbankan

dalam menyalurkan kredit. Sedangkan kurs merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat memengaruhi kebijakan Bank Indonesia yang akan ditransmisikan terhadap kebijakan perbankan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator fiskal yang akan memengaruhi jumlah kredit dari sisi permintaan. Adapun kredit macet merupakan salah satu indikator perbankan yang akan memengaruhi jumlah kredit dari sisi penawaran.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan Bank Indonesia dalam periode pasca krisis, yaitu Januari 1999 sampai dengan Desember 2003. Dalam hal ini dipilih periode tersebut, karena setelah krisis yang terjadi pada tahun 1997, berdampak pada perubahan kondisi keuangan perbankan dengan terjadinya *rush*. Selain itu, perekonomian masih berjalan lambat. Dengan demikian, penulis ingin mengetahui kinerja perbankan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan berbagai indikator moneter dan perbankan pada masa pasca krisis.

### **C. Perumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang tersebut terlihat bahwa fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi sangat penting bagi pertumbuhan sektor riil. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kebijakan perbankan dipengaruhi oleh beberapa indikator moneter dan perbankan yang diwakili oleh tingkat suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan ekonomi, kredit macet. Dengan demikian permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dan seberapa besar suku bunga SBI berpengaruh terhadap jumlah kredit?
2. Bagaimana dan seberapa besar kurs berpengaruh terhadap jumlah kredit?
3. Bagaimana dan seberapa besar pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap jumlah kredit?
4. Bagaimana dan seberapa besar kredit macet berpengaruh terhadap jumlah kredit?
5. Bagaimana kausalitas antara jumlah kredit dan pertumbuhan ekonomi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pola dan besarnya pengaruh suku bunga SBI terhadap jumlah kredit.
2. Untuk mengetahui pola dan besarnya pengaruh kurs terhadap jumlah kredit.
3. Untuk mengetahui pola dan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kredit.
4. Untuk mengetahui pola dan besarnya pengaruh kredit macet terhadap jumlah kredit.
5. Untuk mengetahui kausalitas antara jumlah kredit dan pertumbuhan Ekonomi.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pembaca agar lebih memahami mengenai kebijakan perbankan khususnya dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi.
2. Bagi penulis, sebagai aplikasi dari teori yang telah didapat mengenai ilmu ekonomi pada umumnya dan bidang moneter pada khususnya.
3. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai refferensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
4. Bagi perbankan sebagai evaluasi terhadap kinerja kebijakannya khususnya dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai pertimbangan bagi pelaksanaan kebijakannya ke depan.
5. Bagi Bank Indonesia sebagai pertimbangan bagi pelaksanaan kebijakan moneter dalam transmisinya terhadap perkembangan sektor riil.

## TELAAH PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Kelembagaan Perbankan

##### a. *Kelembagaan Bank Indonesia*

###### a1. Status dan Fungsi Bank Indonesia

Sebagaimana negara sedang berkembang lainnya, peran dan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia hingga saat ini telah mengalami evaluasi dari sebagai bank sirkulasi sampai sebagai agen pembangunan dan terakhir sejak tahun 1999 telah menjadi independen dan mempunyai tugas mencapai sasaran tunggal yaitu stabilitas nilai rupiah.

Dengan diberlakukannya UU no 23 tahun 1999, kedudukan Bank Indonesia telah dipertegas kembali. Dalam bentuk ini Bank Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen sebagaimana bank-bank sentral di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Cili, Philipina, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan dan Swiss. Sebagai suatu otoritas moneter yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan moneter dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya tanpa campur tangan pihak di luar Bank Indonesia. Dengan independensi tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas moneter diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Berdasarkan UU no. 23 tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaannya sendiri terlepas dari APBN.

UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara tegas telah memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu memelihara kestabilan nilai tukar rupiah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan yang tercermin dari perkembangan laju inflasi.

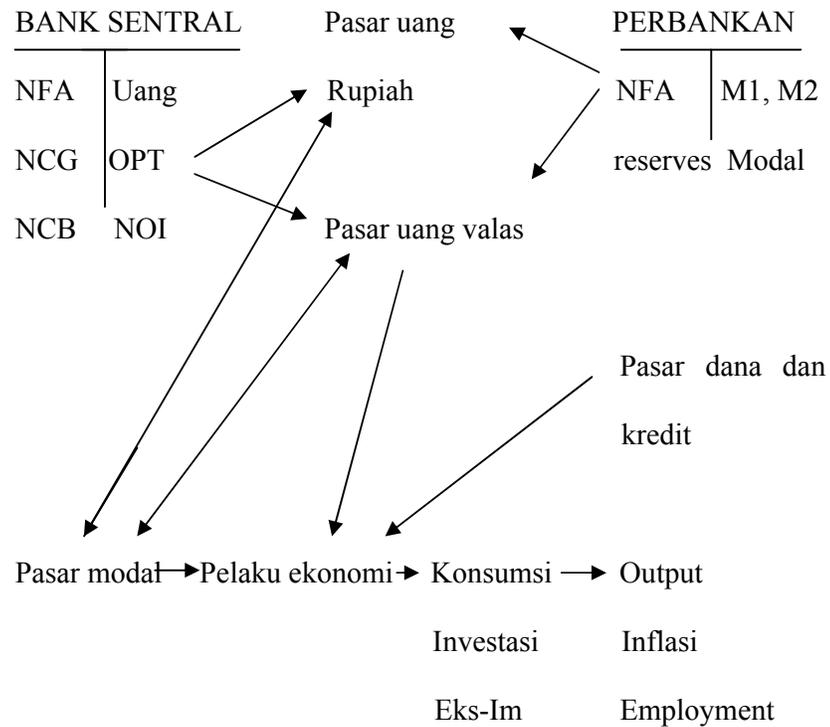
Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan maka tugas Bank Indonesia sesuai dengan UU no 23 tahun 1999 meliputi tiga tugas utama yaitu :

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- 3) Mengatur dan mengevaluasi bank.

Untuk mencapai kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman. Sementara itu, sistem pembayaran yang efisien, cepat dan aman tidak terlepas dari kondisi sistem perbankan yang sehat. Sistem perbankan yang sehat akan mendorong pengendalian moneter mengingat mekanisme transmisi kebijakan moneter ke kegiatan ekonomi terutama berlangsung melalui sistem perbankan.

## a2. Transmisi Moneter dan Proses Perputaran Uang

Transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor riilmelalui dua tahap proses perputaran uang (Warjiyo, 2004: 6 ). Pertama, interaksi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil. Kedua tahap interaksi transmisi kebijakan moneter dalam proses perputaran uang tersebut dapat dijelaskan dengan gambar berikut.



Gambar II.1 Transmisi Kebijakan Moneter

Interaksi melalui pasar keuangan terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan pengendalian moneter melalui transaksi keuangan yang dilakukan dengan perbankan sesuai dengan arah dan sasaran kebijakan moneter yang telah ditetapkannya. Sementara di sisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan untuk portfolio investasinya baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.

Adanya interaksi antara bank sentral dengan perbankan seperti ini akan berpengaruh terhadap perkembangan volume maupun harga – harga yang terjadi di pasar uang. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan di pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan di pasar modal.

Tahap kedua dari transmisi kebijakan moneter dalam proses perputaran uang melibatkan interaksi antara perbankan dengan pelaku ekonomi. Hal ini terjadi karena fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan masyarakat dan dalam menyalurkan kredit dan bentuk pembiayaan lain kepada dunia usaha. Interaksi ini akan berpengaruh terhadap volume dan suku bunga di pasar dana dan kredit. Di sisi mobilisasi dana, interaksi tersebut berpengaruh terhadap perkembangan jumlah uang beredar, permintaan uang, dan tabungan masyarakat. Sementara di sisi penyaluran dan, interaksi tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan kredit perbankan yang disalurkan kepada dunia usaha untuk pembiayaan investasi dan produksinya.

Interaksi perbankan juga berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal baik ditinjau dari sisi penanaman dana oleh para investor maupun dari sisi pembiayaan oleh perusahaan emiten. Sementara itu, pengaruh intermediasi perbankan terhadap penyediaan pembiayaan kepada dunia usaha melalui pasar modal terjadi karena dunia usaha memenuhi kebutuhan pembiayaannya tidak hanya kredit perbankan tetapi juga dari emisi saham dan obligasi di pasar modal.

Interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi baik secara langsung maupun fungsi intermediasi perbankan maupun secara tidak langsung melalui pasar modal akan berpengaruh besar terhadap perkembangan berbagai aktivitas perekonomian (Warjiyo, 2004:10 ). Dari sisi produksi, perkembangan pembiayaan dalam berbagai bentuk kredit perbankan maupun emisi saham dan obligasi korporasi akan

berpengaruh terhadap kemampuan produksi dunia usaha sehingga akan menentukan tingkat output riil dari berbagai sektor ekonomi. Sementara itu, dari sisi permintaan, perkembangan suku bunga kredit, perbankan, harga saham akan menentukan besarnya biaya modal dan oleh karena itu akan berpengaruh pada minat investasi dunia usaha. Pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat dapat terjadi baik melalui pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana dalam deposito perbankan, saham dan obligasi maupun biaya yang harus dikeluarkan apabila konsumsi tersebut dibiayai dari kredit perbankan. Demikian pula pengaruhnya terhadap ekspor impor terjadi baik melalui perkembangan nilai tukar maupun volume dan suku bunga kredit, emisi saham dan obligasi yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan ekspor-impor. Dengan demikian, secara keseluruhan interaksi antara perbankan dan pasar keuangan dengan pelaku ekonomi tersebut pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi, output riil, dan kesempatan kerja dalam perekonomian.

*b. Kelembagaan Bank Umum.*

b.1. Definisi fungsi Bank dalam Perekonomian.

Dalam UU. No. 7/1992 disebutkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi bank di sini lebih sempit dibandingkan dengan definisi menurut UU. No. 14 Tahun 1967, karena tidak mencakup jasa-jasa dalam

lalu-lintas pembayarandan peredaran uang (Rindjin, 2000 :14 ). Dalam hal ini seolah-olah fungsi bank terbatas paada menerima simpanan dan memberikan kredit sehingga definisi ini kurang memenuhi perkembangan usaha bank pada tahap yang modern.

Dalam perkembangan selanjutnya, definisi bank mengalami perubahan sejalan dengan perubahan UU. No.10/1998. Dalam UU. No.10/1998, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalm bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi di atas, fungsi bank pada umumnya adalah : (1)sebagai lembaga perantara (intermediasi) ; (2)sebagai lembaga transmisi ; (3)sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter.

- Fungsi Perantara (intermediasi)

Menurut Santoso, bank adalah industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana (Santoso, 1999: 56).

Fungsi perantara adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari pihak yang kelebihan dana selaku penabung kepada pihak yang kekurangan dana selaku peminjam untuk memenuhi berbagai keperluannya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai perantara untuk menerima, memindahkan

atau menyalurkan dana diantara kedua pihak yang terpisah tanpa saling mengenal satu sama lain.

Peranan ini sangat membantu pihak pemilik dana, baik keuntungan bunga yang diperoleh maupaun keamanan dana itu. Ini berarti risiko telah dialihkan atau ditanggung oleh bank. Pada umumnya penabung ingin menanamkan dananya dalam jangka pendek, sedangkan pihak peminjam lebih menyukai meminjam dalam jangka waktu yang panjang. Kedua kepentingan yang bertentangan itu dapat dijembatani oleh bank, karena ada kepercayaan masyarakat terhadap bank, baik dari pihak peminjam maupun penabung.

Fungsi bank ini juga sangt terkait dengan peranan bank sebagai *agent of trust* dan *agent of development*. Terkait dengan *agent of trust*, karena bank sebagai lembaga perantara yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai *agent of development*, bank merupakan suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dana dalam proses transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

Fungsi intermediasi baru dapat berjalan dengan baik apabila kedua pihak memiliki kepercayaan terhadap bank. Kebijakan perbankan yang efektif terutama harus diarahkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Secara rinci, keberadaan bank sebagai lembaga perantara dapat membawa dampak ekonomi, seperti (Judiseno, 2002: 99) :

1.) Penghimpunan dan penyaluran dana

Kelompok yang mempunyai kelebihan dana dapat menyalurkan dananya dengan harapan menerima penghasilan bunga atas jasa yang diberikannya. Sedangkan pihak yang kekurangan dana dapat menerima kepercayaan bank dan atau meminjamnya untuk berbagai keperluan, misalnya untuk keperluan yang sifatnya konsumtif atau menambah modal usaha.

2.) Mempermudah pembayaran

Dalam operasionalnya menghimpun dan menyalurkan dana, bank memberikan solusi terbaik untuk bertransaksi dengan cara yang lebih aman.

3.) Peningkatan lapangan kerja dan pemerataan penghasilan

Dalam menyalurkan dana ke masyarakat, atas petunjuk dan pengarahan dari pemerintah, lembaga perbankan dapat memprioritaskan kepada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan atau golongan ekonomi lemah dengan menerapkan persyaratan dan tingkat bunga khusus.

#### 4.) stabilisator perekonomian

Jumlah uang beredar secara langsung dapat dikontrol oleh perbankan dengan cara menarik dan mengalirkan uang ke masyarakat. Pada waktu terjadi inflasi, bank akan mengendalikan uang yang beredar dengan kebijakan *tight money policy*. Sebaliknya, jika terjadi kelesuan usaha, bank dapat menyalurkan dana untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat.

Dampak-dampak ekonomi diatas merupakan kenyataan yang diharapkan dalam sistem perekonomian dan perbankan. Namun kenyataannya, telah terjadi beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya, yaitu :

##### 1.) Penghimpunan dan penyaluran dana

Jika tingkat suku bunga SBI meningkat, maka otomatis tingkat bunga perbankan menjadi tinggi. Dengan tingginya tingkat bunga maka otomatis masyarakat akan menempatkan dananya ke perbankan. Akan tetapi di sisi lain, aktivitas untuk menyalurkan dana perbankan dalam bentuk kredit menjadi terhalang karena suku bunga pinjaman jauh lebih tinggi dari suku bunga simpanan, sehingga investor sulit untuk melakukan kegiatan ekspansi usahanya.

## 2.) Peningkatan lapangan kerja dan pemerataan penghasilan

Dengan tingginya suku bunga pinjaman, maka otomatis investor baru terhenti. Dengan terhentinya investasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap lapangan kerja dan pemerataan penghasilan.

## 3.) Stabilisator perekonomian

Dengan tingginya biaya modal akibat suku bunga tinggi, maka pengusaha akan mencari dana dari luar negeri. Sebagian dana yang diperoleh akan digunakan untuk ekspansi usahanya dan sebagian didepositokan karena adanya perbedaan suku bunga dalam negeri dan luar negeri yang cukup tinggi. Keadaan seperti ini bagi Indonesia tidak menguntungkan karena akan mengakibatkan perekonomian menjadi tidak stabil.

- Fungsi Transmisi

Fungsi transmisi berkaitan dengan peranan bank dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan dalam berbagai bentuk seperti : cek, bilyet giro, dan kartu bank.

- Sebagai media yang menstransmisikan kebijakan moneter

Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Melalui berbagai instrumen yang dimiliki, bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian dan atau suku bunga

perbankan yang kemudian akan mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah investasi dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

b.2. Jenis perbankan di Indonesia.

Jenis bank di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU. No. 1 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan meliputi Bank Umum dan BPR.

- a) Bank Umum adalah bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berasaskan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Arbi, 2003)
- b) BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### b3. Karakteristik Bank Umum

Bidang usaha bank umum sangat beraneka ragam. Dalam pasal 6 UU. No. 7/1992 jo. UU. No. 10/1998 menyatakan bahwa usaha bank umum meliputi :

- 1.) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- 2.) memberikan kredit ;
- 3.) menerbitkan surat pengakuan utang ;
- 4.) membeli, menjual, atau meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya ;
- 5.) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya ;
- 6.) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya ;
- 7.) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
- 8.) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- 9.) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- 10.) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabahlainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- 11.) membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupaun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan keuntungan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya ;
- 12.) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dengan wali amanat ;
- 13.) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BI ;
- 14.) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan UU. ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b4. Pengelolaan Bank Umum

Tujuan jangka panjang suatu bank adalah mencari laba. Namun demikian suatu bank tidaklah seharusnya hanya memperhatikan tujuan jangka panjang ini, tetapi juga kegiatannya dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, bank harus selalu dijaga agar tidak terjadi “kehabisan dana” artinya, setiap saat para nasabah hendak mengambil depositonya, bank dapat memenuhi kewajibannya meskipun bank ada kemungkinan menderita kerugian pada saat itu.

Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan diatas mungkin berbeda untuk setiap bank, tergantung beberapa faktor diantaranya (Nopirin, 1998 :25 ) :

1.) Falsafah dalam Pengelolaan Bank

Yang dimaksud dengan falsafah disini adalah petunjuk baik secara eksplisit maupun implisit yang ditentukan oleh pimpinan sebagai panduan dan atau batasan bagi bawahan untuk bertindak.

2.) Minimum Biaya

Suatu bank yang menghendaki dana tambahan dapat memperolehnya melalui beberapa cara, antara lain : dengan meminjam dana antar bank, mengealurkan sertifikat deposito atau menjual surat berharga jangka pendek. Secara umum, pemilihan cara (kombinasi beberapa cara) yang akan diambil tentu berdasarkan pada prinsip biaya terendah (*Prinsip least cost*).

3.) Faktor – faktor lain

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan bank diantaranya kebutuhan nasabah, likuiditas bank dan perubahan pasar.

b.6 Pengukuran tingkat Kesehatan Bank

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan

masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Berdasarkan pasal 29 UU. No.7/1992, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10/1998 tentang perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualaitas manajemen, likuiditas, renrabilitas dan solvabilitas serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (*Capital, Asets, Quality, Management, Earning, dan Liquidity*).

#### 1) Kecukupan modal

Pada saat ini persyaratan mendirikan bank baru memerlukan modal disetor sebesar Rp. 3. triliun dan nilai CAR sekurang-kurangnya 8%. CAR (*Capital Adequary Ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

#### 2) Kualitas Aktiva Prediktif (Asset)

Dalam kondisi normal sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank,

sehingga jenis aktiva sering disebut sebagai aktiva produktif. Di dalam menganalisis suatu bank pada umumnya perhatian difokuskan pada kecukupan modal bank karena masalah solvensi memang penting.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio yaitu : (1) rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, dan (2) rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank.

### 3) Manajemen

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank.

### 4) Keuntungan

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.

Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada dua buah rasio yaitu rasio laba sebelum pajak dalam dua belas bulan terakhir dengan nota – nota volume usaha dalam periode yang sama dan rasio biaya operasional dalam dua belas bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dengan periode yang sama.

## 5) Likuiditas

Pada awal terjadinya krisis perbankan di Indonesia banyak yang mengatakan persoalan perbankan pada saat itu “hanyalah“ masalah likuiditas (dan bukan masalah solvabilitas) dan akan bisa segera diatasi. Likuiditas adalah masalah yang sangat krusial dalam industri perbankan

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima bank. Yang dimaksud Kewajiban Bersih Antar Bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara itu yang termasuk Dana Yang Diterima adalah Kredit likuiditas Bank Indonesia, Giro, Deposito, dan tabungan masyarakat, Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan (tidak termasuk pinjaman subordinasi), Deposito dan Pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan.

## 2. Kredit

### a. *Definisi dan Unsur-unsur kredit*

#### a.1. Definisi.

Kebijakan perkreditan dan perbankan merupakan kebijakan moneter merupakan suatu sarana atau alat untuk menunjang program ekonomi dan pembangunan. Trilogi pembangunan adalah menaikkan produksi dan atau pendapatan stabilitas harga dan pemerataan pendapatan. Untuk mencapai tujuan ini, peranan kredit sangat diperlukan.

Rayment P. Kent dalam buku karangannya *Money Banking* mengatakan bahwa kredit adalah “hak untuk menerima pembayaran pada waktu diminta, atau waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang” (Rayment, 1967: 100).

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal ini pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

#### a.2. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit yang dalam hal ini lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan.

Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah (Suyatno, et al., 1995 : 14 ):

- 1) Kepercayaan dari pemberi kredit.
- 2) Waktu, masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan datang dihadapi.
- 4) Obyek kredit.

#### a.3. Tujuan Kredit

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang tercermin dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak hanya mencari keuntungan akan tetapi juga mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila. Dengan demikian, tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk :

- 1) turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin.
- 3) memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperoleh usahanya.

Berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan serta penentuan yang berlaku di negara itu, maka

secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi
- 2) pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan
- 3) serap kredit harus diikuti dengan suatu perjanjian kredit.
- 4) *overdraft* (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro)
- 5) pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang
- 6) kredit tanpa jaminan dilarang.

#### a.4. Fungsi kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, banki memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut :

1.) meningkatkan daya guna uang

- para pemilik uang/modal secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
- para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2.) Meningkatkan pendanaan dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet, dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara lurus dapat meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga lalu lintas uang akan berkembang pula.

3.) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan memperoleh kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu kredit dapat meningkatkan peredaran barang.

4.) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan pada usaha-usaha antara lain : pengendalian, inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

5.) Meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6.) Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan memperoleh kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, sehingga mereka akan memperoleh pendapatan. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7.) Meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa

dan tabungan yang tinggi dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Hal ini akan mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan maupun dapat meningkatkan hubungan internasional.

***b. Jenis-jenis kredit***

**b.1 Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia (Suyatno, 1995 : 19)**

- 1.) Kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak kerja bukan bank, seperti Pertamina, lembaga keuangan bukan bank, pegadaian dan usaha-usaha lainnya
- 2.) Kredit Likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat dan untuk pembiayaan lainnya.
- 3.) Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank umum atas dasar diskonto.

**b.2 Kredit perbankan untuk masyarakat**

- 1.) Kredit berdasar tujuan penggunaan, meliputi  
Atas dasar tujuan penggunaan dana oleh debitur, kredit dapat dikelompokkan menjadi (Kuncoro, 2000 : 229)

- (a.) Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai kegiatan operasional rutin baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.;
- (b) Kredit transaksi khusus adalah fasilitas kredit yang hanya sekali pakai yang disetujui untuk suatu tujuan dan beberapa tujuan tertentu. Persetujuan atau suatu pinjaman atau transaksi khusus berlaku hingga jatuh tempo fasilitas kredit, kecuali dalam dokumen putusan kreditnya dicantumkan ketentuan yang memungkinkan fasilitas itu dapat diperbarui. Jangka waktu kredit transaksi khusus ditetapkan berdasarkan sifat dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus pemohon dan *cash flow* atau kemampuan membayar kembali.
- (c.) Kontijen adalah kredit yang tidak memerlukan disposisi pada saat kredit tersebut disetujui
- (d.) Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang modal dalam jangka panjang bagi kegiatan usaha nasabah
- (e.) Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

2.) Kredit berdasar cara penarikan dana

Atas dasar cara penarikan dana yang akan diberikan oleh bank, kredit dapat dibedakan menjadi :

(a.) *Cash Loan* adalah kredit yang memungkinkan nasabah menarik dana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan khusus tertentu.

(b.) *Non Cash Loan* adalah kredit yang tidak memungkinkan nasabah menarik dana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan tertentu.

3.) Kredit berdasar jangka waktunya

Dilihat dari jangka waktunya, kredit dibedakan menjadi 3 yaitu (Suyatno, 1995 : 25)

(a.) Kredit jangka pendek (*Short Term Loan*) adalah kredit yang diberikan untuk jangka waktu setahun atau kurang dan diberikan kepada pedagang-pedagang di pasar.

(b.) Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*) adalah kredit yang berjangka waktu maksimum, sampai 3 tahun.

(c.) Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*) adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

(4.) Kredit berdasar cara pelunasan

Kredit berdasarkan cara pelunasan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu (Kuncoro, 2000 : 231)

(a.) Kredit dengan angsuran tetap adalah kredit-kredit yang tergolong kredit konsumtif, yang dalam angsuran tetap

tersebut telah dimasukkan angsuran untuk pokok dan bunga.

(b.) Kredit dengan saldo menurun secara periodik adalah kredit yang ditujukan untuk mengurangi resiko yang ditanggung oleh bank. Dalam hal ini nasabah harus mengangsur sebagian pokoknya sedangkan pembayaran bunganya disesuaikan dengan digunakan.

(c.) Kredit dengan plafon tetap adalah kredit modal kerja yang berjangka waktu pendek misalnya 1 tahun.

5.) Kredit berdasar besarnya

Kredit berdasarkan besarnya, dapat dibedakan menjadi 3 yaitu

(Kuncoro, 2000 : 234 ) :

(a.) Kredit kecil adalah kredit yang mempunyai ciri-ciri kekayaan bersih di luar tanah yang ditempati maksimal Rp. 200 juta.

(b.) Kredit menengah adalah kredit yang besarnya di atas Rp. 350 juta sampai dengan Rp. 25 milyar dengan pembayaran kembali kreditnya berasal dari *Cash flow* usaha.

(c.) Kredit besar adalah kredit yang besarnya lebih dari Rp. 25 milyar yang pembayaran kembali kreditnya berasal dari cash flow usaha.

(6.) Kredit berdasarkan bentuk

Pengelompokan kredit berdasarkan bentuk kredit dibedakan menjadi dua, yaitu (Kuncoro, 2000 : 235) :

(a.) Kredit Persekot adalah bentuk kredit yang penarikan dananya dilakukan sekaligus pada saat direalisasikan

(b.) Kredit Rekening Koran adalah bentuk kredit yang penarikan dananya menurut kebutuhan nasabah.

***c. Prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perkreditan***

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus selalu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kebijaksanaan pokok perkreditan ini mencakup prosedur pemberian kredit yang sehat, proses penyelesaian, kredit bermasalah dan prosedur penghentian penagihan kredit yang telah dihapusbukukan.

Proses pemberian kredit terdiri dari 3 tahap, yaitu (Kuncoro, 2000 : 249) :

1.) Tahap Kegiatan Prakarsa dan Analisa Kredit

Kegiatan prakarsa kredit berupa penerimaan permohonan kredit oleh nasabah yang harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon dan watak riwayat kreditnya pada bank lain. Setelah permohonan kredit ini diterima oleh bank, maka selanjutnya dilakukan analisa dan evaluasi kredit. Dalam analisis tersebut mencakup informasi sebagai berikut :

- (a.) Identitas pemohon
- (b.) Tujuan permohonan kredit,
- (c.) Riwayat hubungan bisnis dengan bank
- (d.) Analisis 5 C kredit, mencakup :
  - Analisis watak (*character*) bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon,
  - Analisis kemampuan (*capacity*) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan kredit dari usaha yang dibiayai.
  - Analisa modal (*capital*) bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam hal modal sendiri.
  - Analisa prospek usaha (*condition*) bertujuan untuk mengetahui layakny suatu usaha yang akan dibiayai

- Analisa jaminan (*collateral*) bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang digunakan sebagai pengaman lapis kedua dalam setiap pemberian kredit.

## 2.) Tahap pemberian rekomendasi kredit

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit berdasarkan analisa/evaluasi yang dibuat oleh penganalisa kredit.

## 3.) Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap pemberian pemutusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dengan melihat rekomendasi kredit yang dibuat oleh pejabat perkomendasi, pejabat pemutus kredit dapat memberikan putusan kredit.

### **3. SBI**

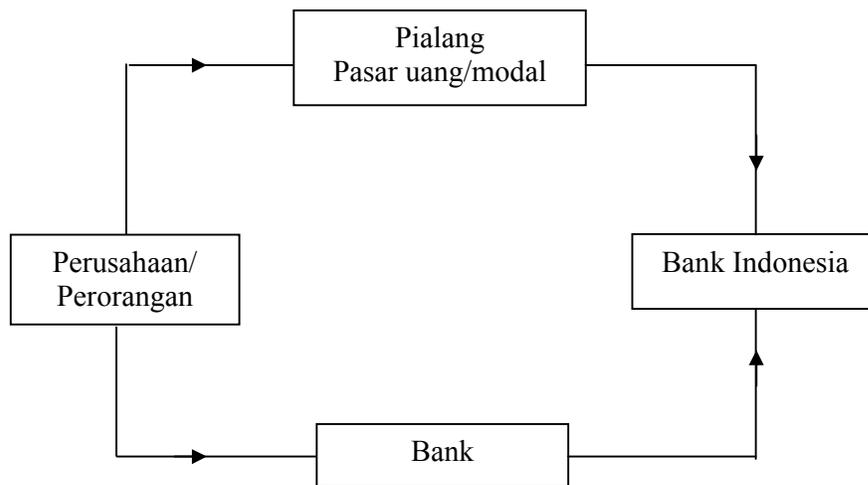
Sebagaimana tercantum dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menggunakan beberapa piranti moneter yang terdiri Giro Wajib minimum, fasilitas Diskonto, Himbauan Moral dan Operasi Pasar Terbuka. Dalam operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat melakukan transaksi jual beli surat berharga termasuk sertifikat Bank Indonesia (BI).

SBI adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengurus barang jangka pendek

dengan sistem diskonto (Bank Indonesia, 2000). Penerbitan SBI oleh Bank Indonesia mempunyai tujuan kontraksi yaitu apabila tingkat suku bunga atas diskonto SBI dinaikkan dan kemudian diharapkan para pemilik dana akan membeli SBI sehingga permintaan kredit akan berkurang yang pada gilirannya jumlah uang beredar akan berkurang, sebaliknya jika Bank Indonesia bermaksud untuk menambah likuiditas di pasar uang dilakukan pembelian Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Sebagai instrumen money market, SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui lelang. Besarnya lelang SBI dimaksudkan untuk mencapai target uang primer yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan memperkirakan perkembangan uang primer, membandingkan target yang ditetapkan, menetapkan besarnya kelebihan likuiditas pasar uang yang harus di serap. Dengan cara ini, Bank Indonesia dapat mencapai target uang primer yang telah ditetapkan serta dapat mempengaruhi perkembangan suku bunga di pasar uang (PPSK Bank Indonesia, 2003 : 17).

Sejalan dengan ide dasar penerbitan SBI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka, penjualan SBI diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk dapat memiliki SBI.



Gambar 2.2

Berdasarkan gambar II.2, pembelian SBI oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dengan Bank Indonesia. Pembelian SBI harus melalui bank umum serta pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sebagai salah satu alat operasi pasar terbuka, dalam rangka menjaga kestabilan rupiah, SBI mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- (a.) Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan.
- (b.) Mempunyai nilai terendah sebesar Rp. 50 juta dan nilai tertinggi sebesar Rp. 100 miliar.
- (c.) Pembelian SBI oleh masyarakat minimal 100 juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 50 juta.

(d.) Pembelian SBI didasarkan pada nilai yang diperoleh dari rumus berikut ini :

$$\text{Nilai Tunai SBI} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$

(e.) Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar dimuka. Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai.

(f.) Pajak penghasilan (PPh) atas diskonto yang dibayar dimuka. Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai.

Dalam operasinya memperkirakan permintaan uang yang sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian, maka lelang SBI sebagai salah satu cara dalam Operasi Pasar Terbuka dilakukan dengan tata cara penjualan sebagai berikut :

(a.) Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari Selasa.

(b.) Lelang SBI diadakan setiap hari Rabu dan dapat diikuti oleh seluruh bank umum, pialang pasar uang dan pialang pasar modal dengan penyelesaian transaksi hari Kamis.

(c.) Dalam pelaksanaan lelang SBI, masing-masing peserta mengajukan penawaran jumlah SBI yang ingin dibeli serta tingkat diskontonya. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran tingkat diskonto yang terendah sampai dengan jumlah SBI lelang yang diumumkan tercapai. Tingkat diskonto SBI ditentukan oleh peserta lelang itu sendiri. Semakin rendah tingkat diskonto yang ditawarkan peserta, maka semakin besar kemungkinan peserta tersebut memenangkan lelang.

(d.) Untuk menjaga keamanan dari kehilangan atau untuk menghindari terjadinya pemalsuan, pihak pembeli SBI memperoleh Bilyet Depot Simpanan (BDS) sebagai bukti atas penyimpanan fisik warkat SBI untuk Bank Indonesia tanpa dipungut biaya penyimpanan.

#### **4. Kurs**

##### **a. Definisi kurs.**

Fluktuasi dari valuta asing merupakan hal penting bagi pelaku bursa valuta asing karena kurs sangat penting bagi pelaku bursa valuta asing. Dalam hal ini kurs valuta asing sangat mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan serta besarnya manfaat dan surat berharga yang berlangsung di kurs valuta asing. Fluktuasi valuta asing dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti : jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi, suku bunga, permintaan dan penawaran aset yang terjadi di beberapa negara yang memiliki hubungan ekonomi dan sistem keuangan internasional (Khalwaty, 2000 : 20).

Nilai tukar suatu mata uang atau kurs didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya (PPSK Bank Indonesia, 2003 : 69).

##### **b. Penentuan Kurs Valuta Asing Dalam Pasaran Bebas**

###### **b.1 Permintaan dan Penawaran Valuta Asing**

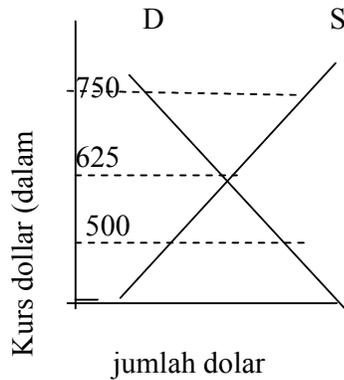
Keinginan dari penduduk suatu negara untuk memperoleh sesuatu jenis uang asing dapatlah dipandang sebagai permintaan valuta asing oleh penduduk negara itu. Keinginan untuk

memperoleh mata uang asing tersebut bukanlah dengan tujuan untuk menyimpannya akan tetapi untuk digunakan bagi pembayaran terhadap barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, permintaan mata uang asing berkaitan erat dengan permintaan terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri. Keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dari sesuatu negara yang meningkat akan menaikkan permintaan terhadap mata uang negara itu.

Perubahan permintaan terhadap barang dari negara lain tergantung kepada tingkat harga barang-barang dari negara lain tersebut apabila dinyatakan dalam mata uang dari negara pembeli dengan mengasumsikan faktor-faktor lain dalam keadaan tetap. Apabila harga barang meningkat maka permintaannya berkurang dan sebaliknya, permintaannya bertambah apabila harga barang turun. Penawaran mata uang asing juga mempunyai sifat sama dengan penawaran barang-barang. Apabila harga mata uang asing meningkat maka penawaran terhadap mata uang asing akan bertambah dan makin rendah harganya maka penawarannya akan berkurang.

#### b.2 Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Valuta Asing

Dalam pasar barang, harga ditentukan pada kondisi permintaan dan penawaran barang mencapai keseimbangan. Dalam pasaran mata uang asing atau valuta asing, harga mata uang asing juga ditentukan seperti itu. Hal ini dapat dilihat dalam gambar II.3



gambar II.3 Kurs antara rupiah dan dollar

Dalam gambar ditunjukkan bagaimana kurs antara rupiah dan dollar ditentukan. Sumbu datar memberikan gambaran tentang jumlah dollar yang ditawarkan oleh penduduk Amerika Serikat. Sumbu tegak menunjukkan harga mata uang dollar yang dinyatakan dalam rupiah. Kurva SS adalah penawaran dollar oleh penduduk Amerika Serikat, sedang DD merupakan permintaan dollar oleh penduduk Indonesia.

Apabila kurs Rp. 750 untuk setiap dollar, penawaran ini akan menaikkan harga dollar. Keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang dollar tercapai pada tingkat Rp. 625 untuk setiap dollar. Ini berarti penduduk Indonesia harus membayar Rp. 625 untuk setiap dollar atau penduduk Amerika Serikat harus membayar satu dollar untuk memperoleh Rp. 625 (Salvatore, 1997 : 11).

### b.3 Faktor-faktor yang menimbulkan Perubahan Kurs Valuta Asing

Apabila kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar maka kurs tersebut akan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan yang terus menerus akan berlaku tersebut disebabkan oleh perubahan yang selalu terjadi terhadap permintaan dan penawaran valuta asing.. Kenaikan permintaan dollar ini menyebabkan kenaikan nilai dollar. Hal ini berarti kenaikan permintaan menyebabkan penduduk Indonesia harus membayar lebih mahal untuk setiap dollar yang ingin diperolehnya.

Oleh karena itu sifatnya selalu mengalami perubahan tertentu, kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar dinamakan kurs pertukaran yang berubah bebas atau kurs pertukaran mengambang.

Beberapa faktor penting yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan kurs pertukaran adalah :

- a.) Perubahan dalam citarasa masyarakat.
- b.) Perubahan harga dari barang-barang ekspor.
- c.) Kenaikan harga-harga umum (inflasi).
- d.) Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi.
- e.) Perkembangan ekonomi suatu negara.

c. *Macam-macam Sistem Kurs.*

Dalam perkembangan ekonomi dan keuangan internasional terdapat tiga macam sistem kurs, yaitu :

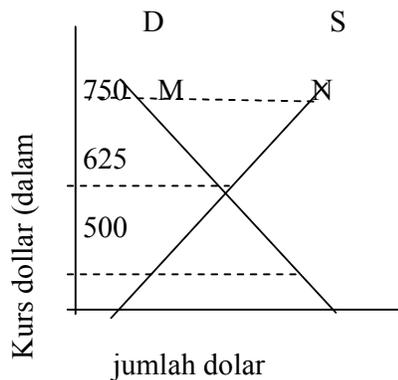
1) *Fixed exchange rate system* (sistem kurs tetap)

Nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu. Penetapan nilai tukar pada sistem nilai tukar tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

(a) *Pegged to a currency*, yaitu nilai tukar ditetapkan dengan mengkaitkan langsung terhadap mata uang tertentu.

(b) *Pegged to a basket of currency*, yaitu nilai tukar ditetapkan dengan mengkaitkan terhadap sejumlah mata uang tertentu, dengan bobot masing-masing mata uang yang pada umumnya disesuaikan dengan besarnya hubungan perdagangan dan investasi.

Implikasi yang timbul terhadap sistem kurs tetap dapat ditunjukkan pada gambar II.4



Gambar II.4

Misalkan pemerintah menetapkan kurs antara rupiah dan dollar adalah Rp. 500 untuk setiap dollar. Ini berarti mata uang dinilai terlalu tinggi terhadap mata uang dollar. Keadaan seperti ini akan menyebabkan permintaan dollar melebihi penawarannya, dan kelebihan permintaan. Untuk memenuhi kelebihan permintaan ini pemerintah harus bersedia menjual dollar yang dimilikinya pada harga yang ditetapkannya. Jika pemerintah tidak dapat memenuhi kelebihan permintaan tersebut pasar gelap di dalam jual beli mata uang dollar akan timbul. Di dalam pasar gelap kelebihan permintaan itu akan dapat dipenuhi, tetapi mereka harus membayar setiap dollar dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan pemerintah.

Keadaan yang sebaliknya akan berlaku apabila pemerintah menetapkan nilai rupiah terlalu rendah, yaitu apabila diperlukan lebih dari Rp. 625 untuk memperoleh setiap dollar. Misalkan kurs yang ditetapkan adalah Rp. 750 untuk setiap dollar. Gambar II.4 menunjukkan penawaran mata uang dollar melebihi permintaannya. Jumlah kelebihan penawaran tersebut adalah sebesar MN. Dalam hal ini pemerintah harus membeli kelebihan penawaran mata uang dollar.

Dengan demikian, dalam sistem kurs tetap perlu memiliki cadangan valuta asing dan melakukan jual beli mata uang asing. Campur tangan pemerintah dalam jual beli mata uang asing adalah

langkah yang sangat penting untuk mempertahankan nilai kurs yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Campur tangan pemerintah yang lain yang berkaitan dengan kebijakan sistem kurs tetap adalah kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang asing. Langkah pemerintah untuk menurunkan mata uangnya terhadap mata uang asing dinamakan devaluasi. Sedangkan, tindakan yang menyebabkan mata uang negara itu naik nilainya terhadap mata uang asing dinamakan revaluasi.

2) *Floating exchange rate system* (sistem kurs mengambang)

Pada sistem ini, nilai tukar rupiah dibiarkan bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, sehingga nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran diatas permintaan dan nilai tukar akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan diatas penawaran yang ada di pasar valas.

Penerapan sistem kurs mengambang bebas mempunyai kelebihan berupa tidak perlunya cadangan devisa yang besar karena bank sentral tidak harus mempertahankan nilai tukar pada suatu level tertentu. Dalam hal ini kurs dapat mengalami perubahan secara bebas dalam permintaan dan penawaran valuta asing. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu melakukan jual beli valuta asing karena dalam sistem tersebut tidak terdapat kelebihan permintaan dan penawarannya. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah tidak perlu menyimpan cadangan valuta asing. Selain itu dalam sistem

kurs bebas akan menimbulkan kapasitas di dalam perdagangan dengan negara-negara lain dan akan mengurangi kegiatan spekulasi dalam jual beli mata uang asing.

Akan tetapi dalam sistem kurs bebas atau mengambang, nilai tukar yang terlalu berfluktuasi dapat menambah ketidakpastian bagi dunia usaha. Sistem ini umumnya diterapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa relatif kecil sementara sistem devisa yang dianut cenderung bebas.

3) *Managed floating exchange rate system* (sistem kurs mengambang terkendali)

Dalam sistem ini nilai tukar ditentukan sesuai mekanisme pasar sepanjang dalam *intervention band* (batas pita intervensi) yang ditetapkan bank sentral.

## 5. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

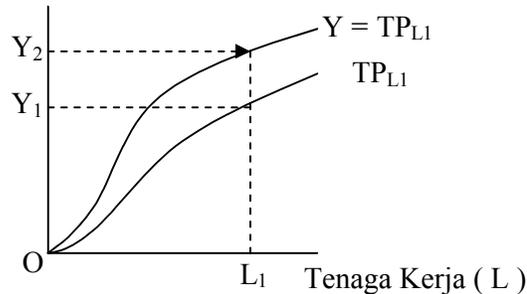
Produk domestik bruto sangat ditentukan oleh digunakannya faktor produksi tenaga kerja, kapital, barang sumber daya alam, tingkat teknologi dan kondisi sosial negara yang bersangkutan. Pada umumnya terdapat hubungan yang positif antara jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi itu dan PDB. Dengan demikian semakin banyak digunakan alat kapital, tenaga kerja, sumber daya alam dan tingkat teknologi yang canggih satu keadaan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula tingkat PDB suatu negara.

a.) Tenaga Kerja

Faktor tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi terpenting dalam kaitannya dengan peningkatan PDB suatu negara. Dari segi jumlah, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi biasanya akan menghasilkan tingkat produksi yang tinggi. Namun hal ini tidak berlaku sepenuhnya karena terdapat hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, sehingga setelah suatu tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu, jumlah produk total yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut akan berkurang. Hal ini berarti setelah jumlah tertentu dari tenaga kerja tersebut, produk marginal tenaga kerja tambahan menjadi negatif. Dalam keadaan demikian akan terjadi pengangguran. Dengan demikian faktor tenaga kerja tidak cukup dilihat dari segi jumlahnya saja, melainkan juga harus diperhatikan kualitas dari tenaga kerja tersebut.

Dengan adanya perbankan kualitas tenaga kerja, maka penurunan produksi total karena pertambahan jumlah tenaga kerja akan dapat

ditunda sampai jumlah tenaga kerja yang lebih besar seperti dilukiskan pada gambar II.5



Gambar 5.1  
Fungsi Produksi Perubahan Kualitas  
Tenaga Kerja

Dalam gambar dilukiskan sumbu horisontal sebagai jumlah tenaga kerja (  $L$  ) dan sumber vertikal dilukiskan jumlah PDB (  $Y$  ).  $TPL1$  menunjukkan hubungan antara jumlah PDB dan jumlah tenaga kerja. Perbaikan kualitas tenaga kerja digambarkan dengan adanya pergeseran fungsi produksi dari  $TPL1$  ke  $TPL2$ .

Dalam hal penambahan jumlah tenaga kerja bagi negara sedang berkembang tidak ada masalah, karena negara berkembang seperti Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan selalu bertambah jumlahnya. Dengan bertambah jumlah penduduk akan bertambah pula jumlah tenaga kerja. Sedangkan dari segi kualitasnya, tenaga kerja dapat diperbaiki dengan perbaikan tingkat kesehatan melalui perbaikan gizi dan pendidikan.

#### b.) Kapital

Kapital dapat terbentuk melalui berbagai sumber diantaranya tabungan masyarakat, pajak, pinjaman negara dan inflasi, sebagai berikut (Sukirno, 2000 : 242) :

(1.) Tabungan masyarakat

Tabungan merupakan sumber kapital utama bagi pembangunan. Keadaan tabungan di negara-negara sedang berkembang umumnya masih rendah sehubungan dengan kondisi perkonomian negara sedang berkembang.

(2.) Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama dan digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah. Penerimaan pajak merupakan bagian dari pendapatan rutin negara, selisih antara pendapatan rutin dan pengeluaran rutin pemerintah merupakan tabungan pemerintah.

(3.) Pinjaman pemerintah

Pinjaman pemerintah dibedakan menjadi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar. Pinjaman luar negeri artinya pinjaman yang diperoleh dari orang atau pemerintah luar negeri.

(4.) Penggunaan tenaga kerja yang menganggur

Tenaga kerja yang menganggur pada umumnya memiliki produktivitas marginal yang rendah. Tenaga kerja yang menganggur ini dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, terutama untuk proyek padat karya.

(5.) Inflasi

Inflasi yang rendah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, khususnya pembiayaan bagi proyek-proyek pemerintah. Dengan adanya defisit anggaran belanja pemerintah,

pemerintah akan mencetak uang sehingga menambah jumlah uang yang beredar. Hal ini menyebabkan terjadi peningkatan dalam permintaan akan barang dan jasa sehingga mengakibatkan harga barang naik. Dengan naiknya harga barang dan jasa, maka nilai uang turun atau pendapatan riil masyarakat menurun. Dengan kata lain masyarakat terpaksa membayar suatu pungutan kepada pemerintah, tetapi pungutan ini tidak terasa.

c.) Sumber daya alam dan lingkungan

Tersedianya sumber daya alam yang cukup merupakan faktor pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Jika negara yang bersangkutan mampu memanfaatkannya semaksimal mungkin, dengan adanya sifat-sifat sumber daya alam yang berbeda-beda, maka dalam pemanfaatannya harus diterapkan metode pengelolaan yang berbeda-beda pula demi kelestarian pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan.

d.) Teknologi

Teknologi adalah cara untuk mengolah atau menghasilkan suatu jenis barang atau jasa tertentu. Teknologi mempunyai hubungan dengan inovasi yaitu penemuan baru yang telah diterapkan dalam proses produksi.

e.) Faktor Sosial

Di samping faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, faktor sosial juga mempengaruhi

peranan yang penting faktor sosial ini diantaranya, keamanan politik, adat istiadat, agama, sistem pemerintahan dan sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). PDB adalah tingkat jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian (Susanti, 2000 : 23). Sedangkan menurut Ace Partodirejo, PDB adalah hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa suatu negara ditambah dengan hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa orang perusahaan asing (Partodiredjo, 1997 : 30) . Dalam hal ini, dinamakan bruto, karena memasukkan penyusutan, dinamakan domestik, karena batasnya adalah wilayah suatu negara, termasuk didalamnya orang-orang dan perusahaan asing. Dinamakan produk karena yang dihitung adalah produk-produk barang dan jasa.

PDB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*) artinya perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Karena batas wilayah perhitungan PDB adalah negara, maka hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Ada dua cara untuk melihat statistik ini (Mankiw, 2000 : 18) PDB sebagai perekonomian total

dari setiap orang didalam perekonomian. Cara lain untuk melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa perekonomian.

PDB yang dihitung berdasarkan harga berlaku, tidak secara akurat dapat mencerminkan sejauh mana perekonomian dapat memuaskan permintaan rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Jika seluruh harga digunakan tanpa perubahan dalam jumlah. PDB akan berlipat ganda. Akan tetapi, hal ini tidak benar untuk menguraikan bahwa kemampuan perekonomian untuk memuaskan permintaan telah berlipat ganda, karena jumlah setiap produk yang diproduksi tetap sama. Para ekonomi menyebut nilai barang dan jasa yang diukur dengan harga berlaku sebagai PDB nominal.

Ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik akan menghitung output barang dan jasa perekonomian dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk tujuan ini, para ekonom menggunakan PDB riil, yakni nilai barang dan jasa diukur dengan menggunakan harga konstan. PDB riil menunjukkan apa yang terjadi terhadap pengeluaran output jika jumlah berubah tetapi harga tidak berubah. (Mankiw, 2000 : 21 ).

Ada beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan , yaitu (Susanti, 2000 : 24) :

a.) Metode Sederhana

Metode ini hanya bisa digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan tahunan formulasi dari metode ini adalah sebagai berikut:

$$r(t-1,t) = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan cara ini kurang efisien, karena jika periode observasi cukup panjang maka untuk menghitung tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode tersebut, tingkat pertumbuhan per tahun harus dihitung satu persatu terlebih dahulu.

b.) Metode End to End

Dengan metode ini, tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus :

$$r_{(t_1-t-1)} = \sqrt[n]{\frac{PDB_t}{PDB_{t-1}}} - 1 \times 100\%, \quad \text{dimana } n = \text{jml periode observasi}$$

Dengan penggunaan metode ini, beberapa ilmuwan kurang setuju dengan penggunaan metode ini mengabaikan fluktuasi nilai PDB yang terjadi diantara awal dan akhir periode observasi.

c.) Metode Regresi

Untuk memadukan segi efisiensi dengan upaya menangkap gejala PDB diantara awal dan akhir periode observasi, maka dikembangkan metode perhitungan pertumbuhan dengan metode observasi. Dengan metode ini, tingkat pertumbuhan dihitung dengan membentuk model semi log seperti dibawah ini

$$L_n PDB_t = A + r_t \dots\dots\dots(1)$$

Dalam persamaan diatas, tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode observasi tercermin pada koefisien r. Hal ini dapat dijelaskan dengan jalan melihat total diferensial dari persamaan diatas, yaitu :

$$\frac{1}{PDB} \cdot dPDB = r dt \dots\dots\dots(2)$$

sehingga

$$r = \frac{d \cdot \text{PDB} / \text{PDB}}{dt} \dots\dots\dots(3)$$

Hasil penurunan persamaan (3) diatas dapat dibaca dengan jika t berubah satu tahun, maka PDB akan berubah sebesar (dPDB/PDB)%.

## 6. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Kuncoro, 2002 : 462). Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit macet merupakan salah satu penggolongan kredit bermasalah.

Sesuai ketentuan Direksi bank Indonesia No : 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif, kredit digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.) Berdasarkan prospek usaha

(1.)Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali

Gejala ini mengakibatkan volume produksi berada di bawah volume produksi normal. Perusahaan berada di dalam keadaan tidak likuid, modal kerja atau modal lancar makin menipis atau sudah habis sama sekali. Hal ini mengakibatkan bunga dan angsuran hutang kepada bank tidak dapat dibayar lagi. Dalam keadaan demikian, bank tidak mau lagi menambah kreditnya dalam bentuk modal kerja yang sangat diperlukan.

(2.) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun

Menurunnya kondisi perekonomian berarti akan menurunkan permintaan produksi. Turunnya permintaan produksi akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan dan laba. Jika faktor lain diasumsikan konstan, maka hal ini akan menyebabkan dalam jangka panjang perusahaan tidak akan mampu menutup biaya produksinya termasuk pembangunan kredit terhadap bank.

(3.) Manajemen sangat lemah

Kondisi lemahnya manajemen akan mengurangi efisiensi produksi yang pada gilirannya akan berakibat pada kerugian. Kerugian ini menyebabkan tertundanya pembayaran kredit bank, sehingga bank dalam menyalurkan kreditnya perlu banyak pertimbangan.

(4.) Terjadi pemogokan tenaga kerja

Sebagai salah satu faktor produksi yang mendominasi dalam proses produksi, terjadinya pemogokan kerja akan sangat menghambat proses produksi. Terhambatnya proses produksi akan menurunkan laba. Dalam jangka panjang kondisi ini akan mengakibatkan perusahaan merugi.

b.) Berdasarkan kemampuan membayar

(1.) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

(2.) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

c.) Berdasarkan kondisi keuangan debitur

(1.) Mengalami kerugian yang besar

Dengan kerugian berarti debitur dalam proses pemenuhan pembayaran karena pihak ketiga yang dalam hal ini kreditur atau bank akan terhambat.

2.) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi

Dengan semakin besarnya nilai ini berarti modal yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi pembayaran atau kewajibannya kepada kreditur.

3.) Kesulitan likuiditas

Biaya ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : besarnya proporsi aset yang tidak likuid dibandingkan aset likuid, terhambatnya produksi dan lain-lain. Hal ini berakibat pada penangguhan pembayaran hutang kepada kreditur.

4.) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing

Terjadinya fluktuasi nilai tukar akan mengindikasikan bagi terdapatnya kredit macet. Frekuensi nilai tukar valas akan mengurangi kegiatan usaha. Hal ini dimaksudkan agar di masa mendatang kegiatan usaha tetap berlangsung.

5.) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional

Dalam jangka pendek, perusahaan atau debitur tidak akan dapat melakukan kegiatan usaha, karena pinjaman yang diterima digunakan untuk menutup kerugian operasional. Hal ini

mengakibatkan dalam jangka pendek, pinjaman yang diterima bersifat tidak produktif.

Kredit macet merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank. Dengan adanya kredit macet akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, yang selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kondisi kinerja usaha bank yang kurang baik akan berpengaruh secara menyeluruh terhadap upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, pemupukan modal sendiri, pengembangan usaha dan sebagainya. Oleh karena itu, manajemen kredit selalu berusaha membuat pedoman deteksi dini terhadap setiap perubahan yang terjadi pada kredit nasabah, karena kredit menjadi macet tentu melalui suatu proses yang lama. Walaupun penyebab kredit macet telah banyak diidentifikasi akan tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk mencari jalan keluarnya. Setelah penyebab kredit macet dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi dari sisi nasabah, sisi ekstern bank dan sisi bank yaitu sebagai berikut :

a.) Sisi nasabah

(1.) Faktor Keuangan

Faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit macet antara lain : utang meningkat tajam, utang meningkat tidak seimbang, pendapatan bersih menurun, penurunan penjualan dan laba besar, biaya penjualan, biaya umum, dan biaya administrasi meningkat, perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan meningkat secara kredit, rata-rata umur piutang bertambah, piutang tak tertagih meningkat, perputaran

persediaan semakin lambat, keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur, tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

#### (2).Faktor manajemen

Faktor-faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit macet antara lain : perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan, tidak ada kaderisasi dan *job description* yang jelas, kegagalan dalam perencanaan pelanggaran terhadap perjanjian atau klausa kredit, pengulangan kredit, rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan

#### (3.)Faktor Operasional

Faktor-faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit macet antara lain : hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun, kehilangan satu atau lebih pelanggan utama, pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik, tingkat teknologi kurang efisien, operasional perusahaan mencemari lingkungan

#### b.) Sisi Ekstern

Faktor-faktor ekstern yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit macet antara lain : perubahan kebijakan pemerintahan di sektor riil, peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah, kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi, meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan

kebijakan moneter lainnya, peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.

c.) Sisi Bank

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit macet antara lain : buruknya perencanaan finansial dan aktiva tetap, adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman, gagal dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian kredit, adanya *overkredit* atau *underfinancing*, manipulasi data, kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit, kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.

Menurut Farried Wijaya, sebab-sebab kredit macet lebih banyak disebabkan dari pihak nasabah. Sebab-sebab ini dapat diuraikan sebagai berikut (Wijaya, 1997 : 201):

a.) Pedagang versus industriawan

Nasabah tidak mempunyai latar belakang dan pengalaman sebagai industriawan. Biasanya mereka adalah pedagang yang sukses dalam bidang perdagangan yang serba spekulatif dan manipulatif. Dengan terbukanya kesempatan untuk menjadi industriawan, maka digunakanlah kesempatan ini. Dengan kemampuan manajemen perusahaan yang rendah, maka investasi yang besar hanya akan menyebabkan disalokasi pada faktor-faktor produksi. Hal ini mengakibatkan produksi yang dicapai tidak optimal dan rendahnya tingkat pengembalian modal, sehingga untuk pengembalian kredit yang dipinjam dari bank juga terhambat. Perusahaan cenderung lebih

memperbaiki infrastruktur perbankan terlebih dahulu daripada untuk menutup hutangnya.

b.) Over Pricing

Nasabah memberikan penilaian yang melebihi nilai sebenarnya dari faktor-faktor produksi. Dengan demikian, dua dampak menikmati labanya yang dipakai untuk penyeteroran 25 % dari nilai investasinya yang disyaratkan oleh bank. Dalam hal ini pemikiran nasabah hanya dalam jangka pendek dan kurang berfikir panjang apa bisa menjalankan pabriknya dan dapat memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran bunga dan pembayaran angsuran kreditnya.

c.) Syarat 25 % modal sendiri

Salah satu syarat penting bagi bank untuk memberikan kredit investasi ialah bahwa nasabah harus mempunyai modal sendiri sebesar 25 % dari jumlah seluruh investasi. Kalau kita ingin mengelola perusahaan secara sehat, maka biasanya kebutuhan modal permanen harus kita biayai dengan modal sendiri dan kebutuhan akan modal sementara batas meminjam dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan jangka waktu kebutuhannya.

Akan tetapi dengan policy yang ada, modal sendiri sebesar 25 % selalu dianggap sudah cukup. oleh karena itu apabila kebutuhan modal permainan dari perusahaan tertentu kenyatannya melebihi 25 % dan dia memperoleh kredit dengan modalnya sendiri hanya 25 % akan mengakibatkan terjadinya kredit macet.

d.) Terlampau mementingkan jaminan

Dengan jaminan dari masalah, pihak bank biasanya hanya memperhatikan persyaratan bagi pengajuan kredit. Bank kurang memperhatikan kinerja perusahaan yang sebenarnya.

e.) Dualisme antara bank komersil dan agent of development

Di satu pihak, bank harus bertindak sebagai bank komersil yang berarti bahasa bank harus selalu memperhatikan rentabilitasnya. Di lain pihak, bank merupakan alat negara untuk menguras kehidupan ekonomi dan membangun perekonomian nasional.

Sikap yang dualistis ini kadang-kadang bisa merupakan sebab macetnya kredit. Dengan adanya peraturan mengenai modal sendiri sebesar 25 % dari jumlah investasi seluruhnya, bank-bank di sini bertindak sebagai agent of development. Dalam hal ini bank tidak menghiraukan apakah proyek-proyek yang digunakan kepadanya memenuhi syarat-syarat keamanan bagi kreditnya. Akan tetapi sebagai bank komersial, bank akan dirugikan karena kurang ada jaminan bagi pengembalian kreditnya.

f.) Kejenuhan Proses

Dengan adanya kejenuhan proses terhadap barang-barang tertentu yang dihasilkan oleh industri, maka pabrik-pabrik yang menghasilkan barang yang sama bersaing mati-matian di dalam pasaran. Dalam persaingan ini, pabrik yang lemah akan macet dan apabila pabrik ini dibiayai oleh kredit, maka dengan sendirinya kredit ini akan macet pula.

g.) Feasibility study

Feasibility study dalam pemberian kredit oleh bank memegang peranan penting. Untuk memperoleh gambaran yang obyektif dan agar terjamin keahlian orang yang membuat feasibility study, bank biasanya mensyaratkan bahwa study ini harus dilakukan oleh kantor konsultan yang terdaftar pada Bank Indonesia.

Setelah penyebab kredit macet diketahui maka perlu dilakukan penanganan kredit secara antisipatif, proaktif dan berdisiplin sehingga dapat mendeteksi potensi timbulnya kredit macet secara dini. Dengan deteksi akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portfolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi.

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan kredit jika diperlukan prospek usaha masih baik adalah dengan cara 3R, yaitu :

- a.) Penjadwalan kembali (*Rescheduleing*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi : perubahan *grace period*, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu dan perubahan jumlah angsuran.
- b.) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo .

c.) Penundaan kembali ( *Restructuring* ) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *rescheduling* dan *reconditioning*.

Selanjutnya bila upaya penyelamatan dengan 3R tersebut tidak berhasil dilakukan, maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara, antara lain :

a.) Penyelesaian kredit macet secara damai

- pemberian keringanan bunga dengan pembayaran lunas ataupun angsuran.
- penjualan agunan di bawah tangan, yaitu penyelamatan kredit secara damai dengan penjualan agunan di bawah tangan
- penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan
- penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan

b.) Penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum

Apabila upaya penyelamatan secara damai tidak berhasil, maka penyelesaian ditempuh melalui saluran hukum. Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan pada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan beban biaya legitasi yang ringan.

Penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri
- pengerahan pengurusan kredit macet kepada BPPN
- pengerahan pengurusan kredit macet melalui kejaksaan

- penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.

## **7. Hubungan Antar Variabel**

### **a. SBI dengan Jumlah Kredit**

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter dari bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi perekonomian mengalami “*boom*”, maka dilakukan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain melalui penurunan jumlah uang beredar. Sedangkan jika perekonomian dalam keadaan mengalami “*depression*”, maka dilakukan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain melalui peningkatan jumlah uang beredar (PPSK Bank Indonesia, 2003: 63).

Berdasarkan sasaran jumlah uang beredar yang telah ditetapkan, Bank Indonesia melakukan Operasi pasar Terbuka (OPT) sebagai instrumen dalam pengendalian moneter. Operasi tersebut dilakukan Bank Indonesia diantaranya dengan lelang SBI. Besarnya lelang SBI dimaksudkan untuk mencapai target uang primer yang ditetapkan. Dengan cara ini, Bank Indonesia dapat mencapai target uang primer yang telah ditetapkan serta dapat mempengaruhi perkembangan suku bunga di pasar uang (PPSK Bank Indonesia, 2003: 17). Penerbitan SBI oleh Bank

Indonesia mempunyai tujuan kontraksi yaitu apabila tingkat suku bunga atas diskonto SBI dinaikkan, maka diharapkan para pemilik dana akan membeli SBI yang akan mengurangi permintaan uang, yang dalam hal ini akan mengurangi permintaan kredit. Sedangkan jika Bank Indonesia bermaksud untuk menambah likuiditas, maka tingkat suku bunga akan diturunkan yang diharapkan akan meningkatkan permintaan uang untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian.

b. Kurs dengan Jumlah Kredit

Krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan konsekuensi terhadap ketidakstabilan perekonomian. Menghadapi kondisi ketidakstabilan moneter tersebut, Bank Indonesia kemudian menerapkan kebijakan moneter ketat. Krisis yang terjadi mengakibatkan memburuknya kemampuan perusahaan. Sementara itu, bank juga menghadapi permasalahan akibat besarnya aktiva dalam denominasi valas yang dimiliki yang sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar. Nilai tukar yang semakin terdepresiasi telah melemahkan neraca perusahaan sehingga mengurangi kemampuan investasi di masa mendatang. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi permintaan kredit. Upaya pemulihan kestabilan moneter melalui kebijakan moneter ketat yang dibantu dengan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional mulai memberikan hasil positif. Pertumbuhan uang beredar yang melambat dan suku bunga simpanan perbankan yang tinggi telah mengurangi peluang dan hasrat masyarakat dalam memegang mata

uang asing sehingga tekanan depresiasi rupiah berangsur surut dan inflasi mulai terkendali.

Penurunan laju inflasi dan penguatan nilai tukar rupiah memberikan ruang gerak dan ekspektasi pasar untuk menurunkan suku bunga kredit dalam rangka mendorong kembali aktivitas perekonomian. Dari sisi permintaan kredit, penurunan suku bunga kredit ini akan menjadi pelumas bagi meningkatnya kegiatan ekonomi, baik untuk produksi maupun untuk konsumsi. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional seperti: meningkatnya pendapatan nasional, meningkatnya penggunaan tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

c. Pertumbuhan ekonomi dengan Jumlah Kredit

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena apada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor- faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.

Pada masa pasca krisis, aktivitas perekonomian menunjukkan perkembangan yang memburuk, pertumbuhan ekonomi terhenti bahkan sampai sempat mengalami pertumbuhan yang negatif. Dengan kondisi ekonomi yang lemah ini mendorong debitur dan investor untuk menunda

investasi. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan terhadap permintaan kredit dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, kondisi ini memaksa bank untuk berhati-hati dalam memberikan kredit, sehingga pada gilirannya pertumbuhan kredit juga melemah.

d. Kredit Macet dengan Jumlah Kredit

Kredit macet merupakan salah satu faktor yang menyebabkan engganannya perbankan dalam menyalurkan kredit, yang disebabkan oleh tingginya risiko kredit di sektor riil khususnya sektor korporasi yang dicerminkan oleh rasio utang terhadap modal perusahaan yang tinggi, terbatasnya informasi mengenai debitur yang potensial. Dalam kondisi tingkat kredit macet yang tinggi tersebut, perbankan lebih cenderung melakukan konsolidasi internal guna memperbaiki kualitas asset daripada menyalurkan kredit.

Tingginya kredit macet tersebut juga berpengaruh terhadap memburuknya kondisi permodalan bank. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya PPAP yang harus dibentuk serta menurunnya pendapatan bunga. Oleh karena itu, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kredit macet ini, maka dalam menyalurkan kreditnya bank cenderung untuk meminta kolateral yang likuid, bank cenderung hanya berhubungan dengan debitur lama yang sudah dikenal dan dilakukannya perubahan organisasi kredit pada bank yang cenderung lebih sentralistik dalam pemutusan kredit, terjadinya pergeseran penyaluran kredit dari sektor korporasi ke sektor retail dimana sektor retail ini dipandang memiliki risiko yang lebih kecil daripada sektor korporasi.

## **B. PENELITIAN SEBELUMNYA**

Dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya yang digunakan adalah :

1. Pemilihan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan judul “Apakah Ada Credit Crunch?”. Data yang digunakan adalah data sekunder pada periode Januari 1994 sampai dengan Desember 1999. Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu makro agregat dan mikro-perbankan. Secara makro pengujian dilakukan dengan menggunakan data agregat dengan model ketidakseimbangan. Secara mikro, pengujian dilakukan dengan regresi panel menggunakan data individual bank.

Dari hasil penelitian secara makro diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam fungsi penawaran, seluruh koefisien sesuai dengan yang diperkirakan. Kapasitas kredit memiliki tanda positif, sehingga kredit yang diberikan sangat tergantung pada kapasitas kredit yang tersedia. Suku bunga kredit memiliki koefisien positif dan signifikan yang dapat diartikan semakin tinggi suku bunga semakin banyak kredit yang ditawarkan oleh bank. Rasio modal terhadap asset memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap kredit. Sedangkan koefisien NPLs memiliki hubungan negatif dan signifikan yang mengimplikasikan semakin tinggi NPLs yang dimiliki bank, semakin menurun kredit yang dapat disalurkan.

- b. Dalam persamaan permintaan kredit, output memiliki hubungan yang searah dan signifikan dengan permintaan kredit. Sementara itu, suku bunga kredit memiliki hubungan positif dengan permintaan kredit.

Data yang digunakan dalam kajian secara mikro ini adalah data dari 140 bank sebagai sample dalam periode antara Januari 1994 sampai dengan Desember 1999.

Regresi yang dilakukan dibedakan antara periode sebelum krisis (Januari 1994 – Juli 1997) dan periode setelah krisis (Agustus 1997 – Desember 1999). Dan untuk sample periode, dalam persamaan ditambahkan satu variabel dummy krisis.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Rasio modal dan pertumbuhan GDP berpengaruh positif pada pertumbuhan kredit sementara suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. Hubungan tersebut terjadi baik pada periode sebelum maupun setelah krisis.

Sementara itu, dalam periode krisis, dilakukan regresi panel dengan membedakan kelompok bank menjadi dua kategori yaitu : bank dalam proses rekap dan bank non rekap.

Dari hasil regresi diperoleh sebagai berikut :

- a. Rasio modal bank dalam rekap memiliki hubungan positif dan signifikan, sedangkan untuk bank-bank non rekap koefisiennya menjadi tidak signifikan.
- b. Koefisien rasio NPLs terhadap total kredit memiliki koefisien yang negatif dan signifikan baik pada bank rekap maupun bank non rekap.

- c. Dilihat dari sisi permintaan, koefisien pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang positif dan signifikan. Kelompok bank rekap memiliki signifikansi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok bank non-rekap.
  - d. Suku bunga SBI pada bank rekap tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Sebaliknya untuk bank non rekap yang memiliki suku bunga SBI signifikan mempengaruhi pertumbuhan kredit.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aula Ahmad Hafiah dengan “Analisis Peranan Jalur Pinjaman Bank Pada Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia”. Data yang digunakan adalah data sekunder pada periode 1999-2001 dengan model analisa VAR dan regresi panel.

#### Estimasi VAR

Dalam estimasi VAR, dibedakan dalam blok moneter, blok riil dan blok rumah tangga

- a. Dalam blok moneter mengestimasi perubahan variabel blok moneter terhadap SBI yang meliputi : rasio modal bank terhadap asset, total pinjaman, total deposito, dan likuiditas.
- b. Dalam blok riil, mengestimasi perubahan variabel blok perusahaan terhadap perubahan total pinjaman yang meliputi : investasi, output dan pendapatan nasional.
- c. Dalam blok rumah tangga, mengestimasi perubahan variabel blok rumah tangga yang meliputi : konsumsi, indeks harga konsumen dan PDB terhadap perubahan total pinjaman rumah tangga.

Dari ketiga blok ekonomi yang telah dianalisis diatas, menimbulkan masalah kontroversi jika dikaitkan dengan masalah identifikasi untuk mengatasi identifikasi ini studi dilanjutkan dengan menggunakan regresi panel.

#### Analisis Regresi Panel

Dalam analisis ini, penelitian dibagi menjadi dua blok yaitu blok perbankan dan blok perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 1999 – 2001 dengan 23 sampel bank.

Dari hasil analisis kedua model, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

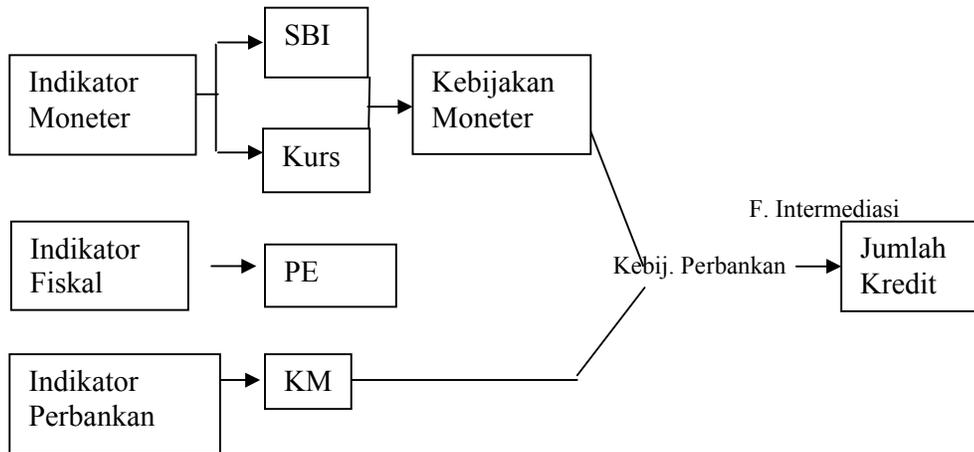
- a. Pada estimasi VAR blok moneter, terdapat hubungan antara perubahan SBI terhadap perubahan total pinjaman yang diberikan pada sektor riil.
  - b. Pada blok riil perusahaan, mekanisme transmisi yang terjadi adalah perubahan pinjaman bank akan mempengaruhi perubahan indeks produksi yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan pendapatan nasional.
  - c. Pada hasil regresi blok perbankan, SBI memiliki koefisien negatif sedangkan deposito memiliki koefisien positif terhadap kemampuan bank dalam memberikan pinjaman.
  - d. Pada regresi blok riil, SBI berpengaruh terhadap pinjaman. Jika SBI naik, maka pinjaman yang diberikan pada perusahaan juga akan berkurang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bachruddin dengan judul “Kebijaksanaan Suku Bunga dan Dampaknya Terhadap Bisnis Perbankan selama 1996 –

2001”. Data yang digunakan adalah data sekunder pada periode 1996 sampai dengan tahun 2001 dengan analisa deskriptif.

Dari hasil analisa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perubahan suku bunga SBI secara otomatis diikuti dengan perubahan pada suku bunga dana deposito dan suku bunga kredit di kalangan perbankan komersial. Selama krisis berlangsung, banyak bank-bank komersial yang mengalami *negatif spread* dan bahkan terdapat 68 bank yang dilikuidasi.
- b. Perubahan suku bunga SBI berpengaruh pada volume penghimpunan dana masyarakat melalui sektor perbankan kenaikan suku bunga SBI diikuti oleh peningkatan dana masyarakat.
- c. Kenaikan suku bunga kredit menyebabkan volume kredit yang disalurkan perbankan mengalami penurunan.
- d. Kelompok bank pembangunan daerah dan kelompok bank asing / campuran telah menunjukkan ketegarannya dalam mempertahankan eksistensi dan kinerja bisnisnya. Sementara itu, bank-bank pemerintah masih menempati posisi yang dominan dalam bisnis perbankan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kreditnya.

### C. Kerangka Pemikiran



GambarII.6 kerangka pemikiran penulisan

Dari kerangka pemikiran dapat dilihat bahwa SBI dan Kurs sebagai indikator moneter mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter yang kemudian akan berpengaruh terhadap kebijakan perbankan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator fiskal yang mewakili sektor riil juga akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perbankan dalam menyalurkan kredit. KM (kredit macet) sebagai indikator perbankan sendiri juga akan berpengaruh terhadap kebijakan perbankan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yang harus dibuktikan kebenarannya. Dari perumusan masalah yang telah disusun, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit
2. Diduga kurs berpengaruh positif terhadap jumlah kredit.
3. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap jumlah kredit.
4. Diduga kredit macet berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit.
5. Diduga terdapat kausalitas dua arah antara jumlah kredit dan pertumbuhan ekonomi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yang menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dimana pokok-pokok pikirannya didasarkan pada penggalan data dan referensi dari berbagai literatur.

#### **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini bersifat kuantitatif mengenai kebijakan perbankan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang dapat dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan dengan menggunakan data time series pada periode bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Desember 2003. Periode ini mewakili masa pasca krisis yang dapat menggambarkan kinerja dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi sebagai respon dari kondisi makroekonomi setelah krisis ekonomi.

#### **C. Pengukuran Variabel**

Data yang diteliti dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen atau variabel tak bebas atau variabel yang dijelaskan terikat dan variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang menjelaskan. Variabel independen adalah variabel yang bersifat menentukan atau mempengaruhi variabel dependen dan sebaliknya variabel dependen

adalah variabel yang dipengaruhi atau tergantung oleh variabel independen (Totok M. dalam Islamiyah, 2001 : 60).

Variabel Dependen :

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit. jumlah kredit didefinisikan sebagai jumlah dana yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat baik yang dialokasikan ke sektor pertambangan, industri, perdagangan, jasa dan lain-lain. Satuan yang digunakan dalam jumlah kredit adalah dalam triliun Rupiah.

Variabel independen:

Yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini yaitu : suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan ekonomi dan kredit macet.

1. SBI adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto sebagai pengakuan hutang jangka pendek, yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi dan mengendalikan likuiditas perekonomian. Tingkat suku bunga SBI merupakan tingkat bunga diskonto untuk diberikan kepada lembaga keuangan atau masyarakat atau penerbitan sertifikat BI dalam persen. Suku bunga SBI yang digunakan disini adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 bulan.
2. Kurs merupakan harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Dalam hal ini kurs merupakan jumlah rupiah tertentu yang digunakan untuk membeli Dollar.
3. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu angka yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan

tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan metode sederhana yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan PDB berdasar harga konstan tahun sekarang dibanding PDB tahun dasar. Satuan yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi adalah dalam persen.

4. Kredit macet adalah total atau jumlah kredit yang tidak dapat dibayar sebagian atau seluruhnya oleh nasabah kepada bank seperti yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain kredit macet merupakan kredit yang sangat besar kemungkinannya tidak akan dibayar kembali oleh nasabah kepada bank. Satuan kredit macet adalah dalam miliar rupiah.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan bulanan Bank Indonesia, laporan tahunan BPS, laporan keuangan Statistik Keuangan Indonesia, Data Perbankan Indonesia dan Laporan keuangan lainnya beberapa edisi. Penelitian ini menggunakan data bulanan. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian dilakukan interpolasi data tahunan ke data bulanan, dengan formulasi sebagai berikut (Insukindro,1999: 348)

$$Y_{it} = 1/12 \left( Y_t + \frac{I-6,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right), \text{ dimana ;}$$

$Y_{it}$  : Data dari bulan ke-1 dari tahun t

$Y_t$  : Data pada tahun t

$Y_{t-1}$ : Data pada tahun sebelumnya

$I$  : 1, 2, 3, ....., 12

## E. Metode Analisa Data

Analisa data digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisa data digunakan untuk mengetahui kinerja perbankan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dalam periode pasca krisis dengan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada periode tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel berupa pendekatan teori ekonomi, teori statistika, dan teori ekonometrika. Model alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ekonometrika *Error Correction Model* (ECM).

### 1. Uji Mackinnon, White dan Davidson (MWD Test)

Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan masalah empirik yang sangat penting, karena teori ekonomi tidak secara spesifik menunjukkan apakah sebaiknya bentuk fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linear atau log-linear atau bentuk fungsi lainnya (Aliman, 2000 : 14).

Ada beberapa metode empirik yang digunakan dalam pemilihan bentuk fungsi model empirik, seperti : metode model transformasi Box-cox, metode yang dikembangkan Mac Kinnon, White dan Davidson atau lebih dikenal dengan MWD Test, metode Bara dan Mc Aleer atau dikenal dengan B-M Test dan metode yang dikembangkan Zarembaka. Dalam

penelitian ini, pemilihan bentuk fungsi model empiris akan digunakan metode yang dikembangkan oleh Mac Kinnon, White dan Davidson atau dikenal dengan MWD Test.

Untuk dapat menerapkan uji MWD, pertama-tama kita membuat dua model regresi dengan asumsi :

Model reg 1 : ECM linear Benganda

$$\begin{aligned}
 DJK_t &= \beta_0 + \beta_1 DSBI_t + \beta_2 Kurs_t + \beta_3 PE_t + \beta_4 KM_t + \beta_5 \\
 &DSBI_{t-1} + \beta_6 DKurs_{t-1} + \beta_7 DPE_{t-1} + \beta_8 DKM_{t-1} + \beta_9 \\
 &ECT \dots\dots\dots(1)
 \end{aligned}$$

Model reg 2 : ECM log linear

$$\begin{aligned}
 \text{Log } JK_t &= \beta_0 + \beta_1 DSBI_t + \beta_2 Kurs_t + \beta_3 PE_t + \beta_4 KM_t + \beta_5 \\
 &DSBI_{t-1} + \beta_6 DKurs_{t-1} + \beta_7 DPE_{t-1} + \beta_8 DKM_{t-1} + \\
 &\beta_9 ECT \dots\dots\dots(2)
 \end{aligned}$$

Dari persamaan (1) dan (2) diatas, selanjutnya kita menerapkan test, dimana untuk menerapkan uji tersebut, ada 6 langkah yang perlu dilakukan sbb :

- a) Melakukan regresi terhadap persamaan (1) yang kemudian akan didapatkan nilai fitted dari JK yang dinamai dengan STF.
- b) Melakukan regresi terhadap persamaan (2) yang kemudian akan didapatkan nilai fitted dari log JK yang dinamakan LSF.
- c) Mencari nilai  $Z_1$  dengan cara mengurangkan nilai log STF, dengan LSF.
- d) Mencari nilai  $Z_2$  dengan cara mengurangkan nilai antilog LSF dengan STF

e) Melakukan regresi dengan menggunakan persamaan (1) ditambahkan  $Z_1$  sebagai variabel penjelas.

$$(3) DJK_t = \beta_0 + \beta_1 DSBI_t + \beta_2 Kurs_t + \beta_3 PE_t + \beta_4 KM_t + \beta_5 DSBI_{t-1} + \beta_6 DKurs_{t-1} + \beta_7 DPE_{t-1} + \beta_8 DKM_{t-1} + \beta_9 ECT + Z_1$$

bila  $Z_1$  signifikan secara statistik maka kita menolak model yang benar adalah linear dengan kata lain, bila  $Z_1$  signifikan maka model yang benar adalah model log linear.

f) Melakukan regresi dengan menggunakan persamaan (2) ditambahkan  $Z_2$  sebagai variabel penjelas.

$$(4) D \log JK_t = \beta_0 + \beta_1 DSBI_t + \beta_2 DKurs_t + \beta_3 DPE_t + \beta_4 DKM_t + \beta_5 DSBI_{t-1} + \beta_6 DKurs_{t-1} + \beta_7 DPE_{t-1} + \beta_8 DKM_{t-1} + \beta_9 ECT + Z_2$$

bila  $Z_2$  signifikan secara statistik maka kita menolak model yang benar adalah log linear, dengan kata lain bila  $Z_2$  signifikan maka model yang benar adalah model linear.

## 2. Uji Stasioneritas

### a) Uji Akar-akar unit

Uji ini dimaksudkan untuk mengamati stasioner tidaknya suatu variabel. Keadaan stasioner adalah keadaan dimana karakteristik proses stokastik atau random tidak berubah selama kurun waktu yang berjalan. Hal ini diperlukan untuk membentuk persamaan yang mampu menggambarkan keadaan variabel di masa lalu dan dimasa yang akan datang. Pengujian akar-akar uji akan dilakukan dengan menggunakan *Augmented Dickey – Ruller (ADF)* test.

b) Uji Derajat Integrasi

Uji derajat integrasi dimaksudkan untuk mengetahui pada derajat ke berapa data yang diamati akan stasioner. Pengujian ini dilakukan apabila uji akar-akar unit mengemukakan fakta bahwa data yang diamati merupakan peluasan dari akar-akar unit.

c) Uji Kointegrasi

Pengujian ini merupakan kelanjutan dari akar-akar unit dan uji derajat integrasi. Untuk dapat melakukan uji kointegrasi harus diyakini terlebih dahulu bahwa variabel-variabel terkait dalam pendapatan ini memiliki derajat integrasi yang sama atau tidak. Apabila variabel-variabel yang terkait berkointegrasi maka terdapat hubungan jangka panjang antar variabel-variabel tersebut.

3. Analisis Error Correction Model (ECM)

Model runtun waktu berdasarkan asumsi penting bahwa data runtun waktu yang akan dianalisis dihasilkan oleh proses random atau stokastik. Proses stokastik akan lebih mudah dijelaskan jika karakteristik proses itu tidak berubah sepanjang waktu. Data yang stasioner pada dasarnya tidak memiliki variasi yang terlalu besar selama periode observasi dan metode memiliki kecenderungannya untuk mendekati nilai rata-ratanya (Granger, 1986 : 214 dalam Insukindro, 1994 : 129).

Untuk mengetahui data runtun waktu yang digunakan stasioner atau tidak akan dilakukan uji akar-akar dan uji derajat integrasi. Apabila variabel-variabel yang diamati memiliki derajat integrasi yang sama, maka dapat dilakukan estimasi regresi kointegrasi. Regresi kointegrasi ditaksir

untuk menguji stasioner tidaknya suatu residual regresi. Apabila hasil uji residual regresi kointegrasinya stasioner, maka model dinamis yang cocok adalah model koreksi kesalahan (Kusumastuti, 1996 : 283 dalam Modul laboratorium Ekonometrika, 2003 : 75). Oleh karena itu model koreksi kesalahan atau ECM dapat menjelaskan hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antara variabel dependen dan independen, karena apabila variabel dependen dan variabel independen berkointegrasi, maka terdapat hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antara variabel-variabel tersebut, serta dapat mencari pemecahan terhadap variabel runtun waktu yang tidak stasioner dan regresi lancung. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh regresi lancung antara lain adalah koefisien regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan meleset dan uji baku yang umum koefisien regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan meleset jauh dari uji baku yang umum untuk koefisien regresi sah menjadi tidak sah atau invalid.

Tahapan penurunan persamaan Error Correction Model :

Pertama : Membuat hubungan persamaan dasar antara variabel tak bebas (*dependent variable*) dengan variabel bebas (*independent variable*).

Misalkan fungsi Jumlah Kredit (JK) dipengaruhi oleh sertifikat Bank Indonesia, kurs, pertumbuhan ekonomi dan atau kredit macet, maka hubungan variabel tersebut.

$$JK_t^* = \alpha_0 + \alpha_1 SBI_t + \alpha_2 Kurs_t + \alpha_3 PE_t + \alpha_4 KM_t \dots\dots\dots (1-1)$$

Dimana : JK = Jumlah Kredit (Rp)

SBI = Tingkat suku bunga SBI (%)

Kurs = Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS (%)

PE = Pertumbuhan Ekonomi (%)

KM = Jumlah kredit macet (Rp)

Kedua : Membentuk fungsi biaya dalam formulasi ECM (khususnya fungsi biaya kuadrat tunggal) yang dirumuskan :

$$C_t^{de} = b_1 (JK_t - JK_t^*)^2 + b_2 \left\{ (1 - B) JK_t - \int_t (1 - B) Z_t \right\}^2 \dots\dots\dots (1.2)$$

Dimana :

$C_t^{de}$  = fungsi biaya kuadrat periode tunggal dari Domowitz dan Elbadawi

$b_1 (JK_t - JK_t^*)$  = biaya ketidakseimbangan

$b_2 \left\{ (1 - B) JK_t - \int_t (1 - B) Z_t \right\}$  = biaya penyesuaian

B = backwarg – lag operator ( t – 1)

$Z_t$  = vektor variable penentu jumlah kredit dalam hal ini diasumsikan bahwa

$$Z_t = \int (SBI_t, kurs_t, PE_t, KM_t)$$

$\int_t$  = vector deret yang memboboti masing-masing elemen  $Z_t$

Ketiga : Meminimisasi fungsi biaya kuadrat periode tunggal dari persamaan 1.2 terhadap variabel  $JK_t$ , sehingga didapatkan :

Minimum  $C_t^{de} \rightarrow d C_t^{de} / d PDB_t = 0$  , sehingga

$$2 b_1 (JK_t - JK_t^*) + 2 b_2 \left\{ (1 - B) JK_t - \int_t (1 - B) Z_t \right\} = 0$$

$$b_1 (JK_t - JK_t^*) + b_2 \left\{ (1 - B) JK_t - \int_t (1 - B) Z_t \right\} = 0$$

$$b_1 JK_t - b_1 JK_t^* + b_2 JK_t - b_2 B JK_t - b_2 B JK_t - b_2 \int_t (1 - B) Z_t = 0$$

$$b_1 JK_t + b_2 JK_t = b_1 JK_t^* + b_2 B JK_t - b_2 \int_t (1 - B) Z_t$$

$$(b_1 + b_2) JK_t = b_1 JK_t^* + b_2 B JK_t - b_2 \int_t (1 - B) Z_t$$

$$JK_t = b JK_t^* + (1-b) B JK_t + (1 - b) \int_t (1 - B) Z_t \dots\dots\dots (1. 3)$$

Dimana :

$$b = b_1 / (b_1 + b_2)$$

$JK_t$  = jumlah kredit pada tahun t

$JK_t^*$  = jumlah kredit yang diharapkan pada tahun t

$$BJK_t = JK_t - JK_{t-1}$$

Keempat : Melakukan substitusi antara persamaan 1.1 serta fungsi  $Z_t =$

$\int(SBI_t, Kurs_t, PE_t, KM_t)$  secara bersama-sama ke dalam persamaan 1.3

akan didapatkan persamaan :

$$JK_t = b JK_t^* + (1-b) B JK_t + (1 - b) \int_t (1 - B) Z_t$$

$$JK_t = b (\alpha_0 + \alpha_1 SBI_t + \alpha_2 Kurs_t + \alpha_3 PE_t + \alpha_4 KM_t) + (1-b) B JK_t + (1 - b) \int_t (1 - B) \left\{ SBI, kurs, PE, KM \right\}$$

$$JK_t = \alpha_0 b + \alpha_1 b SBI_t + \alpha_2 b Kurs_t + \alpha_3 b PE_t + \alpha_4 b KM_t + (1-b)JK_{t-1} \\ + (1-b) \int_1 (SBI_t - SBI_{t-1}) + (1-b) \int_2 (kurs_t - kurs_{t-1}) + (1-b) \int_3 \\ (PE_t - PE_{t-1}) + (1-b) \int_4 (KM_t - KM_{t-1})$$

$$JK_t = \alpha_0 b + \alpha_1 b SBI_t + \alpha_2 b Kurs_t + \alpha_3 b PE_t + \alpha_4 b KM_t + (1-b)JK_{t-1} \\ + (1-b) \int_1 SBI_t - (1-b) \int_1 SBI_{t-1} + (1-b) \int_2 Kurs_t - (1-b) \int_2 \\ Kurs_{t-1} + (1-b) \int_3 PE_t - (1-b) \int_3 PE_{t-1} + (1-b) \int_4 KM_t - (1-b) \\ \int_4 KM_{t-1}$$

$$JK_t = \alpha_0 b + \left\{ \alpha_1 b + (1-b) \int_1 \right\} SBI_t + \left\{ \alpha_2 b + (1-b) \int_2 \right\} Kurs_t + \left\{ \alpha_3 b + \right. \\ \left. (1-b) \int_3 \right\} PE_t + \left\{ \alpha_4 b + (1-b) \int_4 \right\} KM_t - (1-b) \int_1 SBI_{t-1} - (1-b) \\ \int_2 Kurs_{t-1} - (1-b) \int_3 PE_{t-1} - (1-b) \int_4 KM_{t-1} + (1-b) JK_{t-1}$$

Persamaan diatas diringkas menjadi :

$$JK_t = C_0 + C_1 SBI_t + C_2 Kurs_t + C_3 PE_t + C_4 KM_t + C_5 SBI_{t-1} + \\ C_6 Kurs_{t-1} + C_7 PE_{t-1} + C_8 KM_{t-1} + C_9 JK_{t-1} \\ \dots\dots\dots (1-4)$$

Dimana :

$C_0 = \alpha_0 b$	$C_1 = \alpha_1 b + (1-b) \int_1$
$C_2 = \alpha_2 b + (1-b) \int_2$	$C_3 = \alpha_3 b + (1-b) \int_3$
$C_4 = \alpha_4 b + (1-b) \int_4$	$C_5 = \alpha_5 b + (1-b) \int_5$
$C_6 = \alpha_6 b + (1-b) \int_6$	$C_7 = \alpha_7 b + (1-b) \int_7$
$C_8 = \alpha_8 b + (1-b) \int_8$	$C_9 = \alpha_9 b + (1-b) \int_9$

Persamaan diatas kemudian dikurangi dengan :

$$JK_{t-1} = C_1 SBI_{t-1} + C_2 Kurs_{t-1} + C_3 PE_{t-1} + C_4 KM_{t-1} + JK_{t-1} - C_1 SBI_{t-1} - \\ C_2 Kurs_{t-1} - C_3 PE_{t-1} - C_4 KM_{t-1} + SBI_{t-1} + Kurs_{t-1} + PE_{t-1} + KM_{t-1} \\ - SBI_{t-1} - Kurs_{t-1} - PE_{t-1} - KM_{t-1} + C_9 SBI_{t-1} + C_9 Kurs_{t-1} + C_9 PE_{t-1} \\ + C_9 KM_{t-1} - C_9 SBI_{t-1} - C_9 Kurs_{t-1} - C_9 PE_{t-1} - C_9 KM_{t-1} \dots\dots (1.5)$$

Hasil pengurangan persamaan 1.4 dengan 1.5, yaitu :

$$\begin{aligned}
 JK_t - JK_{t-1} = & C_0 + C_1 SBI_t - C_1 SBI_{t-1} + C_2 Kurs_t - C_2 Kurs_{t-1} + C_3 PE_t - C_3 \\
 & PE_{t-1} + C_4 KM_t - C_4 KM_{t-1} + C_5 SBI_{t-1} + C_1 SBI_{t-1} + C_9 SBI_{t-1} - \\
 & SBI_{t-1} + C_6 Kurs_{t-1} + C_2 Kurs_{t-1} + C_9 Kurs_{t-1} - Kurs_{t-1} + C_7 \\
 & PE_{t-1} + C_3 PE_{t-1} + C_9 PE_{t-1} - PE_{t-1} + C_8 KM_{t-1} + C_4 KM_{t-1} + C_9 \\
 & KM_{t-1} - KM_{t-1} + SBI_{t-1} + Kurs_{t-1} + PE_{t-1} + KM_{t-1} - C_9 JK_{t-1} - \\
 & C_9 SBI_{t-1} - C_9 Kurs_{t-1} - C_9 PE_{t-1} - C_9 KM_{t-1}
 \end{aligned}$$

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi :

$$\begin{aligned}
 JK_t - JK_{t-1} = & C_0 + C_1 (SBI_t - SBI_{t-1}) + C_2 (Kurs_t - Kurs_{t-1}) + C_3 (PE_t - PE_{t-1}) \\
 & + C_4 (KM_t - KM_{t-1}) + SBI_{t-1} (C_5 + C_1 + C_9 - 1) + Kurs_{t-1} \\
 & (C_6 + C_2 + C_9 - 1) + PE_{t-1} (C_7 + C_3 + C_9 - 1) + KM_{t-1} (C_8 + \\
 & C_4 + C_9 - 1) + (1 - C_9) \left\{ SBI_{t-1} + Kurs_{t-1} + PE_{t-1} + KM_{t-1} - \right. \\
 & \left. JK_{t-1} \right\}
 \end{aligned}$$

Bentuk akhir dari persamaan ECM adalah :

$$\begin{aligned}
 \Delta JK_t = & C_0 + C_1 DSBI_t + C_2 DKurs_t + C_3 DPE_t + C_4 DKM_t + C_5 SBI_{t-1} \\
 & + C_6 Kurs_{t-1} + C_7 PE_{t-1} + C_8 KM_{t-1} + C_9 ECT \dots\dots\dots(1-6)
 \end{aligned}$$

Dimana :  $DSBI = SBI_t - SBI_{t-1}$

$DKurs = Kurs_t - Kurs_{t-1}$

$DPE = PE_t - PE_{t-1}$

$DKM = KM_t - KM_{t-1}$

$C_9 = Error\ Correction\ Term\ (ECT)$

$ECT = SBI_{t-1} + Kurs_{t-1} + PE_{t-1} + NPL_{t-1} - JK_{t-1}$

Keterangan :

JK = Jumlah Kredit (Rp)

SBI = Tingkat suku bunga SBI (%)

Kurs = Nilai tukar rumah terhadap Dollar AS (%)

PE = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

KM = Jumlah Kredit yang salurkan perbankan (Rp)

#### 4. Uji Kausalitas Granger

Dalam realitas ekonomi, model regresi linear dimana variabel dependen diregresikan atas variabel-variabel bebas tidak dapat dipastikan mengandung pengertian bahwa variabel dependen secara kausal benar-benar ditentukan oleh variabel-variabel bebas secara sepihak. Ada kemungkinan dalam suatu dalam suatu model persamaan tunggal, variabel dependen ditentukan oleh variabel dependen, sehingga dalam hal ini terdapat kausalitas dua arah (Arief, 1993 : 151-152).

Uji kausalitas Granger pada penelitian ini didasarkan pada anggapan yang relevan untuk memprediksi variabel-variabel Jumlah Kredit (JK) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada data time series dari variabel-variabel tersebut. Variabel JK dan PE diformulasikan dalam dua model regresi berikut (Gujarati, 1995 : 620).

$$JK_t = \sum_{z=1}^n \alpha_z JK_{t-z} + \sum_{i=1}^n \beta_i PE_{t-i} + V_{1t}$$

$$PE_t = \sum_{t=1}^m \lambda_t PE_{t-1} + \sum_{j=1}^m \delta_j PE_{t-j} + V_{2t}$$

Dengan  $V_{1t}$  dan  $V_{2t}$  adalah Error Terms yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan  $n = m$

Hasil-hasil regresi kedua bentuk model regresi linear ini akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien regresi masing-masing (Arief, 1993 : 152).

1) Jika  $\sum_{j=1}^n \beta_j \neq 0$  dan  $\sum_{j=1}^m \delta_j = 0$ , maka terdapat kuualitas satu arah dari

PE ke JK

2) Jika  $\sum_{j=1}^n \beta_j = 0$  dan  $\sum_{j=1}^m \delta_j \neq 0$ , maka terdapat kuualitas satu arah dari

PE ke JK

3) Jika  $\sum_{j=1}^n \beta_j = 0$  dan  $\sum_{j=1}^m \delta_j = 0$ , maka PE ke JK bebas antara satu dengan

yang lain.

4) Jika  $\sum_{j=1}^n \beta_j \neq 0$  dan  $\sum_{j=1}^m \delta_j \neq 0$ , maka terdapat kuualitas dua arah dari PE

ke JK.

## 5. Uji Statistik

a) Uji t (t – test)

Uji t adalah uji semua koefisien regresi (two-tail), yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen. Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$$H_0 = \alpha_1 = 0$$

$$H_a = \alpha_1 \neq 0$$

Pengujian dengan uji t adalah sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{\alpha_i}{Se(\alpha_i)}, \text{ dengan } \begin{array}{l} \alpha_1 = \text{koefisien regresi} \\ Se = \text{standar error koefisien regresi} \end{array}$$

$t \text{ tabel} \rightarrow t_{\alpha/2 ; n - k}$ , dengan  $\alpha$  = derajat signifikansi

$n$  = jumlah sample (observasi)

$k$  = banyaknya parameter

Jika  $|t \text{ hitung}| < |t \text{ tabel}|$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Jika  $|t \text{ hitung}| > |t \text{ tabel}|$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b) Uji F (F test)

Uji F (analisis varian) digunakan untuk menguji signifikansi secara bersama-sama semua koefisien regresi atau untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak (bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut

(1) Menentukan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

$H_0 : \alpha_i = 0$

$H_a : \alpha_i \neq 0$

(2) Menghitung F hitung dengan menggunakan program eviews

Mencari F table, yaitu  $F \text{ table} = F_{\alpha/2 ; n-k ; k-1}$ , dengan :

$n$  = jumlah observasi

$k$  = banyaknya parameter

$\alpha$  = derajat signifikansi

### (3) Penentuan kriteria pengujian

3.1. Apabila  $F_{hitung} < F_{table}$ ,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Ini menunjukkan variabel independen secara serentak (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.2. Apabila  $F_{hitung} > F_{table}$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Ini menunjukkan variabel independen secara serentak (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### c) Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang besarnya antara  $0 < R^2 < 1$ . koefisien determinan 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, bila mendekati 1 berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 6. Uji asumsi klasik

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik, dilakukan pengujian gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

#### a) Pengujian multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan antara beberapa atau variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki

kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditakar dengan kecepatan tinggi.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas digunakan uji *Klein* yang membandingkan nilai koefisien korelasi setiap variabel penjelas ( $r^2_{x_i, x_j}$ ) dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2_{y, x_i, x_j, \dots, x_n}$ ). Jika nilai  $r^2$  lebih kecil dari nilai  $R^2$ , maka tidak terdapat multikolinearitas dalam model.

#### b) Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian tidak sama. Hal ini mengakibatkan penaksir OLS tidak mempunyai variasi minimum sehingga penaksir OLS tadi tidak efisien baik dalam sample kecil maupun besar tetapi masih tetap tidak bias dan konsisten.

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah Heteroskedastisitas adalah dengan uji *park* yaitu :

(1) Melakukan regresi  $Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + u$  , sehingga diperoleh residual,  $e_1$  dengan estimasi  $u_1$ .

(2) Nilai residual tadi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variable bebas sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$e_1^2 = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$$

(3) Dari hasil regresi tahap 2 dilakukan uji t. Jika dari  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$  tidak signifikan, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika signifikan, maka terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model tersebut.

c) Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Hal ini mengakibatkan penaksir tidak efisien baik dalam sample kecil maupun dalam sampel besar.

Untuk variable-variabel bebas mengandung *lagged dependent variable*, uji Durbin Watson tidak dapat digunakan pada model ini. Nerloe dan Walls (1996) telah membuktikan bahwa uji Durbin Watson digunakan pada model ini, maka nilai Durbin Watson statistiknya secara asimtotic akan bisa mendekati nilai 2 (Arief, 1993:15 ).

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji ada tidaknya masalah autokorelasi adalah model ECM digunakan *Lagrange Multiplier Test*, yaitu berupa regresi atas semua variabel bebas dalam persamaan model regresi ECM terhadap variabel tidak bebas. Dari hasil yang ada, kemudian dilakukan uji autokorelasi dengan *Breusch Googfrey test*. Dari hasil uji tersebut akan didapat nilai observasi  $R^2$  Square. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0 : \alpha = 0$  ; tidak terjadi autokorelasi

$H_a : \alpha \neq 0$  ; terjadi autokorelasi

Jika nilai observasi  $R^2$  Square lebih kecil dari nilai nilai  $X^2$  tabel, maka dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Kebijakan Perbankan Pasca Krisis**

Krisis keuangan yang terjadi di Asia mulai pertengahan tahun 1997 telah memicu krisis perbankan di beberapa negara seperti Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Di Indonesia, krisis perbankan tersebut diawali dengan dilikuidasinya beberapa bank yang selanjutnya memicu menurunnya kepercayaan masyarakat yang tercermin dari penarikan secara besar-besaran dana masyarakat dari bank. Kekhawatiran akan terjadinya pencabutan ijin usaha dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan dananya di perbankan. Hal ini mendorong masyarakat melakukan penarikan simpanan dari perbankan secara besar-besaran dan perpindahan simpanan dari satu bank yang dipandang kurang sehat ke bank lain yang lebih sehat. Dari kondisi ini menyebabkan uang kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dari Rp. 24,9 triliun pada akhir Oktober 1997 menjadi Rp. 37,5 triliun pada akhir Januari 1998 dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 yang mencapai Rp. 45,4 triliun (laporan bulanan BI, 1998).

Sementara itu, berbagai isu tentang kelangkaan pasokan barang-barang kebutuhan pokok sangat mengkhawatirkan menyebabkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi semakin tinggi. Hal ini mendorong pembelian

barang-barang secara berlebihan dan peningkatan kegiatan spekulasi di pasar valas.

Kepanikan masyarakat tersebut menyebabkan tekanan yang berat terhadap posisi likuiditas perbankan. Beberapa bank yang sebelumnya tergolong sehat dan merupakan pemasok dana juga terkena imbas sehingga berubah posisinya menjadi peminjam dana di pasar uang antarbank. Akibatnya hampir seluruh bank umum nasional menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar sehingga menyebabkan sebagian besar bank melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum dan mengalami saldo negatif atas rekening gironya di BI.

Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan di bidang perbankan berupa pemberian dana talangan kepada bank-bank yang mengalami *rush*, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN dan restrukturisasi perbankan.

a. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Dalam keadaan ketika menurut penilaian Bank Indonesia telah terjadi kesulitan perbankan yang dapat membahayakan perekonomian nasional, maka atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Dalam hal ini, badan khusus tersebut adalah BPPN. BPPN merupakan satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Kepres No. 27 pada tanggal 27 Februari Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN dengan

tujuan penyehatan perbankan di Indonesia (PPSK Bank Indonesia, 2003 : 162). Pendirian BPPN hanya bersifat sementara dan berlaku selama lima tahun, dapat diperpanjang untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Sesuai UU Perbankan, tiga tugas pokok BPPN adalah melakukan penyehatan perbankan, menyelesaikan aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur pada sektor perbankan.

b. Restrukturisasi Perbankan

Program restrukturisasi perbankan sangat penting dan harus dilakukan untuk memungkinkan berlangsungnya proses pemulihan ekonomi. Melalui program ini, industri perbankan yang lumpuh karena krisis, dapat dipulihkan secara bertahap sehingga dapat kembali berfungsi dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Adapun penyebab pokok terjadinya krisis perbankan adalah (Mochtar, 1999 ) : (i) depresiasi rumah yang sangat *undervalued*, sehingga menimbulkan masalah solvabilitas nasabah dan pada akhirnya berdampak ke sektor perbankan, (ii) krisis likuiditas yang berkepanjangan serta suku bunga yang terlalu tinggi yang mengakibatkan utang debitur menjadi NPL, (iii) terjadinya krisis pasar modal yang kemudian ikut mendorong kesulitan di sektor perbankan tersebut. Dengan pulihnya sistem perbankan diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter. Demikian juga sebaliknya, stabilitas moneter yang berhasil diciptakan

melalui disiplin. Kebijakan moneter diharapkan dapat mempercepat upaya restrukturisasi perbankan tersebut.

Pada awal pasca krisis yaitu tahun 1999, fokus dari kebijakan perbankan tetap diarahkan pada penajaman berbagai langkah dan tahapan dalam program restrukturisasi perbankan. Pada dasarnya program restrukturisasi perbankan tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perbankan karena krisis dan sekaligus membangun kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat untuk mencegah terulangnya krisis di masa mendatang. Untuk tahun-tahun selanjutnya, tujuan restrukturisasi perbankan masih tetap sama dengan tahun 1999 disesuaikan dengan perkembangan indikator-indikator perbankan.

#### a.1. Program Penyehatan Perbankan

Program Penyehatan Perbankan berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perbankan yang meliputi persoalan likuiditas yang lebih disebabkan oleh masalah kepercayaan masyarakat, persoalan rentabilitas yang disebabkan oleh buruknya kualitas aktiva produktif kredit macet sangat tinggi, serta persoalan solvabilitas yang disebabkan oleh menurunnya permodalan bank. Sesuai dengan persoalan yang dihadapi tersebut, program penyehatan perbankan meliputi : program penjaminan, program rekapitalisasi dan program restrukturisasi kredit.

### (1) Program Penjaminan

Program Penjaminan merupakan upaya utama dalam rangka menstabilkan perbankan setelah mengalami krisis kepercayaan. Program penjaminan secara bertahap mampu mengurangi krisis kepercayaan yang dialami perbankan. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya penarikan dana besar-besaran (*rush*) dari perbankan.

### (2) Program Rekapitalisasi Bank Umum

Program Rekapitalisasi bank umum merupakan pondasi utama penyehatan perbankan melalui pelaksanaan permasalahan solvabilitas yang disebabkan oleh minimalnya modal bank. Program ini ditujukan untuk menyehatkan baik industri perbankan maupun individu bank sehingga mampu memaksimalkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional secara sehat. Inti program rekapitalisasi adalah penyertaan modal oleh pemerintah dalam bentuk obligasi kepada bank-bank yang mengalami kesulitan modal.

Kinerja perbankan pasca rekap menunjukkan gambaran yang tidak menggembirakan. Sebagian besar bank-bank pasca rekap di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang sama seperti keadaannya sebelum krisis. Dari rating terhadap 150 buah bank yang dilakukan oleh makalah “INFOBANK” tampak gambaran sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Peta NPL dan CAR Perbank Indonesia Pasca Rekap per Desember 2000

NPL \ CAR	CAR		Jumlah bank
	Diatas 8 %	Dibawah 8 %	
Kurang dari 5 %	99	10	109
Diatas dari 5 %	33	7	40
Jumlah bank	132	17	149

Sumber : Infobank, Juli 2001

Fakta diatas menunjukkan bahwa hingga akhir Desember 2000, persoalan yang dihadapi perbankan pasca rekap meliputi dua masalah pokok, yaitu (Suta, 1997 :30) :

- Masih tingginya angka *Non Performing Loan* (NPL)

Masih tingginya angka NPL pada perbankan pasca rekap ini terutama disebabkan oleh masih belum pulihnya perekonomian nasional secara umum. Hal ini menyebabkan perbankan juga mengalami hambatan dalam meningkatkan *loan to Deposit Ratio (LDR)* nya. Sebagian bank yang sesungguhnya mampu melakukan ekspansi kredit hanya berani menyalurkan dana itu pada SBI meskipun hanya memperoleh *net margin* yang kecil.

- Rendahnya CAR

Hingga akhir 2001, masih terdapat sebagian bank pasca rekap yang tidak mampu mencapai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) 8 % seperti disyaratkan oleh bank sentral. Hal ini diakibatkan masih tingginya cadangan wajib yang

disediakan perbankan sebagai akibat tingginya angka NPL. Rendahnya angka LDR, maka pendapatan perbankan pasca rekap bergantung pada pembayaran-pembayaran bunga obligasi rekap yang dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan bank mengalami *negatif spread*.

### (3) Program Restrukturisasi Kredit

Program restrukturisasi kredit merupakan penyelesaian kredit bermasalah yang mengalami lonjakan yang sangat tajam pada masa pasca krisis tahun 1997. Besarnya kredit bermasalah masih menjadi beban berat bagi perbankan sebagai akibat kondisi sektor riil yang mengalami kesulitan usaha sehingga tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah akan sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan penyehatan perbankan secara keseluruhan. Upaya penyehatan bank yang dilakukan melalui program rekapitalisasi bank umum tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan penyelesaian kredit bermasalah, restrukturisasi perusahaan dan perbaikan dunia usaha.

Permasalahan menjadi kompleks karena penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan terkait langsung dengan permasalahan restrukturisasi utang luar negeri swasta yang selama ini oleh perusahaan Indonesia.

Beberapa permasalahan yang dihadapi *satgas* dalam rangka restrukturisasi kredit antara lain adalah pelaksana teknis dari bank

yang kurang mampu dan transparan, debitur yang beritikad tidak baik atau mengajukan tuntutan yang berlebihan. Untuk itu, guna mendorong percepatan melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga perbankan baik di Jakarta maupun di daerah bekerja sama dengan Institut *Banker* Indonesia (IBI), serta membentuk suatu program klinik restrukturisasi kredit khusus untuk kredit-kredit usaha kecil dan menengah.

#### a.2. Program Peningkatan Ketahanan Perbankan

Seiring dengan program penyehatan yang tengah berlangsung, dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan perbankan untuk menjalankan fungsinya. Upaya ini disebut peningkatan ketahanan perbankan, yang dilakukan melalui :

##### (1) Pengembangan infrastruktur

Dalam masa krisis perbankan, bank-bank yang berbentuk BPR cenderung selamat dari krisis, karena bank-bank ini memilih debitur yaitu pengusaha kecil dan menengah yang tidak banyak bergantung pada impor. Sementara itu permasalahan likuiditas yang menimpa bank pada masa krisis lebih besar pengaruhnya kepada bank yang menerapkan sistem konvensional dan tidak begitu berpengaruh kepada bank yang menetapkan sistem syariah. Pada bank konvensional, permasalahan likuiditas perbankan yang dicerminkan meningkatkan suku bunga secara tajam diikuti beban bunga yang harus dikeluarkan oleh bank.

Sementara untuk bank syariah yang berprinsip bagi hasil, meningkatnya suku bunga tidak secara langsung akan menyebabkan meningkatnya beban biaya yang harus dikeluarkan oleh bank. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatnya beban biaya yang harus dikeluarkan oleh bank. Struktur perbankan dilakukan dengan jalan pengembangan BPR, dan pengembangan bank berdasarkan prinsip syariah. Selain itu untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat khususnya pasca penghentian program penjaminan pemerintah direncanakan pula pembentukan LPS sebagai pelengkap pengembangan infrastruktur perbankan Indonesia.

## (2) Peningkatan *Good Corporate Government*

Upaya peningkatan mutu pengelolaan perbankan telah dimulai pada tahun 1999 dengan fokus penciptaan *Good Corporate Government* (GCG) di lingkungan perbankan. Tugas utama komite ini adalah merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional *corporate government* yang mencakup pedoman GCG. GCG ini selanjutnya dilakukan melalui *fit and proper test* terhadap pemilik dan pengurus bank, penerapan wawancara bagi calon pemilik dan mengutus bank, penunjukkan direktur kepatuhan, dan investigasi tindak pidana di bidang pidana.

### (3) Penyempurnaan Ketentuan Perbankan

Penyempurnaan ketentuan perbankan dimaksudkan untuk memperkecil industri perbankan nasional dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berbagai langkah mendasar ditempuh untuk penyempurnaan beberapa ketentuan di bidang ketentuan di bidang perbankan.

### (4) Pemantapan Pengawasan Bank

Penegakan dalam pengawasan bank lebih ditegaskan pada penegakan peraturan. Perbaikan pelaksanaan pengawasan yang ditempuh antara lain mencakup di bidang pengawasan, peningkatan integritas, dan kompetensi sumber daya manusia serta pembentukan khusus investigasi penyimpangan di bidang perbankan.

#### c. Kebijakan Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, pemerintah mengambil kebijakan memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada deposan dan kreditur dalam dan luar negeri serta pembentukan BPPN untuk melakukan penyehatan bank-bank yang bermasalah. Namun kedua kebijakan pemerintah tersebut belum memadai.

Dalam keadaan kesulitan likuiditas tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan penyelamatan terhadap perbankan nasional berupa pemberian BLBI. Dari sisi yuridis, penyaluran BLBI didasarkan pada UU. No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan UU.

No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10 tahun 1998. Pasal 32 ayat (3) UU. No. 13 tahun 1998 menyebutkan “Bank dapat juga memberikan kredit likuiditas pada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat”. Sedangkan pasal 37 ayat (2) UU.No. 7 tahun 1992 menegaskan “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## **2. Pengembangan Kineja Bank Umum**

### **a. Kelembagaan**

Program restrukturisasi yang diiringi dengan langkah penutupan bank, pengambilalihan bank serta konsolidasi dan merger antar bank merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan bank. Secara umum, dalam perkembangannya, jumlah bank secara nasional mengalami penurunan meskipun jumlah kantor bank bertambah. Pada tahun 1999, jumlah bank selaku menunjukkan peningkatan yaitu menjadi sebanyak 68 jumlah bank dengan 7332 kantor bank pada bulan September 1999. Dengan adanya merger terhadap beberapa bank mengakibatkan jumlah bank semakin berkurang yaitu dari 145 pada tahun 2001 dan menjadi 141 pada triwulan IV-2002. Sejalan dengan proses merger tersebut maka pada tahun 2002 jumlah kantor bank semakin berkurang dari 7012 pada triwulan III-2002 menjadi 6.981 pada triwulan IV-2002.

## b. Kegiatan Usaha

### b.1. Pendanaan

Pendanaan perbankan berasal dari 4 sumber yaitu : Dana – pihak ketiga, pasiva antarbank, pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan. Dalam tahun 1999, penghimpunan dana masyarakat mengalami peningkatan yang relatif kecil dibanding tahun 1998. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan DPK valas, terutama karena melemahnya nilai rupiah, sedangkan DPK rupiah relatif tidak mengalami perubahan. Perkembangan DPK yang demikian disebabkan oleh menurunnya bunga simpanan perbankan. Sumber dana lain yang berasal dari antar bank, pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan menunjukkan trend yang menurun. Relatif menurunnya sumber dana lain ini sebagai dampak dari belum pulihnya fungsi intermediasi bank membutuhkan tambahan sumber dana lain di luar DPK dan masih belum mantapnya kepercayaan kreditur terhadap perbankan nasional.

Pada tahun 2000, secara umum penghimpunan dana mengalami peningkatan dibanding tahun 1999. Akan tetapi dilihat dari komposisi pendanaan, terjadi perubahan pada masing-masing triwulan di tengah tahun 2000. Walaupun demikian, komposisi pendanaan ini masih didominasi oleh DPK, baik dalam rupiah maupun valas.

Memasuki tahun 2001, peningkatan penghimpunan dana masih didominasi oleh peningkatan DPK. Sedangkan pinjaman yang diterima mengalami penurunan. Kondisi ini dapat terjadi karena dana yang berhasil disimpan bank dari masyarakat cukup banyak sehingga memungkinkan bank untuk melunasi sumber dana dari pinjaman yang diterima.

Sementara itu pada tahun 2002, penghimpunan dana masih mengalami pertumbuhan yang positif, yang masih didominasi oleh peningkatan DPK. Sumber peningkatan DPK tersebut berasal dari komponen giro serta tabungan, sedangkan komponen deposito mengalami penurunan. Meningkatnya giro dan tabungan serta menurunnya deposito berkaitan dengan terjadinya trend penurunan suku bunga, dan juga akibat adanya alternatif penanaman dana lain bagi masyarakat yang menyajikan hasil yang lebih tinggi seperti reksadana.

Pertumbuhan reksadana yang pesat pada tahun 2003 berdampak cukup besar pada perkembangan DPK perbankan terutama terhadap penurunan deposito. Dalam kondisi demikian perbankan perlu mengantisipasi perkembangan tersebut untuk mencegah tekanan likuiditas apabila terjadi pencairan deposito sewaktu-waktu oleh nasabah.

#### b.2. Penyaluran Dana

Dari sisi penyaluran dana, kredit perbankan tahun 1999 mengalami penurunan dibanding tahun 1998, sedangkan penanaman

dana dalam bentuk SBI meningkat tajam. Faktor ketidakpastian dalam perekonomian merupakan salah satu faktor utama yang mendorong bank untuk lebih banyak menanamkan dananya dalam SBI yang relatif lebih aman dibandingkan dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit hanya diberikan untuk modal kerja termasuk fasilitas *trade finance* dan umumnya untuk membiayai usaha retail dengan jumlah yang relatif kecil atau kredit yang dijamin *cash collateral* dari luar negeri dan debitur dari perusahaan induk.

Dalam tahun 2000, secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun 1999. Dari sisi penyaluran kredit terjadi peningkatan sedangkan penanaman SBI menunjukkan penurunan. Peningkatan penyusutan dana dalam bentuk kredit yang lebih besar dari peningkatan penanaman dalam bentuk lainnya serta penurunan penanaman dalam SBI menunjukkan proses pemulihan fungsi intermediasi bank mulai berlangsung. Di lihat per sektor ekonomi, kredit baru banyak disalurkan ke sektor perindustrian, perdagangan dan lain-lain. Sementara itu, sejalan dengan upaya restrukturisasi kredit yang terus dilakukan oleh bank-bank untuk memperbaiki kualitas kredit, rasio NPLs dalam periode laporan menunjukkan perbaikan.

Memasuki tahun 2001, pertumbuhan penyaluran dana rendah akan masih tetap menunjukkan peningkatan. Peningkatan terbesar berasal dari penanaman pada SBI, karena pada periode ini SBI merupakan alternatif penanaman yang lebih aman dan memberikan

hasil yang lebih tinggi. Di lihat per sektor ekonomi, kredit baru masih didominasi ke sektor perindustrian, perdagangan dan lain-lain. Peningkatan di sisi kredit menunjukkan mulai berlangsungnya proses pemulihan fungsi intermediasi bank walaupun belum secepat yang diharapkan. Hal ini terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi diantaranya belum pastinya kondisi politik dan keamanan, kondisi makroekonomi yang belum kondusif dan biaya dana yang tinggi. Sementara itu rasio NPLs masih menunjukkan trend yang membaik.

Pada tahun 2002, penyaluran dana masih tetap meningkat dengan pertumbuhan rendah, pada periode ini, penyaluran kredit tetap mengalami peningkatan, akan tetapi komponen SBI, antarbank aktiva dan penanaman surat-surat berharga mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan, suku bunga yang diterapkan secara hati-hati mulai berpengaruh pada pergeseran komposisi penyaluran dana. Berdasarkan sektor ekonomi, kredit baru sebagian besar masih disalurkan untuk sektor perindustrian (Rp. 21,46 triliun), diikuti oleh sektor perdagangan (Rp. 15,02 triliun) dan sektor-sektor lain (Rp. 11,55 triliun).

Dalam tahun 2003, kembali terjadi peningkatan penghimpunan dana. Akan tetapi, dari sisi penyaluran kredit, posisi kredit dan kredit baru yang dikururkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Rendahnya penyaluran kredit baru tersebut disertai dengan meningkatnya *undisbursed loan*.

Tersendatnya penyaluran kredit tersebut tidak terlepas dari masih berlanjutnya rigiditas suku bunga kredit perbankan yang bertujuan untuk mempertahankan profitabilitasnya. Di sisi lain, pemulihan fungsi intermediasi perbankan dihadapkan pada tantangan semakin gencarnya perusahaan melakukan pembiayaan melalui penerbitan obligasi di pasar modal.

### b.3. Likuiditas

Rasio likuiditas perbankan cenderung naik selama pasca krisis mulai tahun 1999 ke tahun 2003. Pada tahun 2001, rasio alat likuid terhadap kewajiban jangka pendek sebesar 17,8% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 20% dalam kurun waktu triwulan 2 sampai dengan triwulan III-2002. Akan tetapi pada triwulan terakhir 2002 terjadi penurunan rasio alat likuid, sebesar 1,5% sehingga menjadi 18,5%. Penurunan tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan pada alat likuid yang dimiliki bank, khususnya komponen SBI. Penurunan SBI tersebut terkait dengan trend penurunan suku bunga SBI dan mulai pulihnya fungsi intermediasi perbankan sehingga bank-bank mulai mengalihkan dananya ke penanaman yang lebih menguntungkan seperti kredit.

Kondisi likuiditas perbankan tetap menunjukkan perbaikan selama tahun 2003 sampai dengan bulan Oktober. Hal ini tercermin dari trend rasio alat likuid yang cenderung meningkat dibandingkan dengan rasio pada akhir tahun 2002. Namun demikian

perkembangan rasio pada semester II-2003 relatif melambat setelah mengalami penurunan pada awal triwulan II-2003.

Sampai dengan akhir tahun 2003 perbankan masih memiliki kewajiban valas yang jatuh tempo. Sedangkan kewajiban valas yang akan jatuh tempo setelah tahun 2003 relatif cukup besar yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu likuiditas bank. Selain itu, pesatnya pertumbuhan reksadana dalam tahun perkembangan, dana pihak ketiga perbankan terutama terhadap penurunan deposito. Dengan kondisi demikian, maka perbankan perlu mengantisipasi perkembangan tersebut untuk mencegah tekanan likuiditas apabila terjadi pencairan deposito sewaktu-waktu oleh nasabah.

#### b.4. Permodalan

Permodalan bank pasca krisis menunjukkan perkembangan yang membaik. Berdasarkan kelompoknya, modal semua kelompok bank sudah positif dan kondisi tersebut dicapai sejak akhir triwulan III/2000. Permodalan bank pada triwulan IV secara keseluruhan positif sebesar Rp. 54,7 triliun, yang berarti membaik bila dibandingkan posisi triwulan III/2000 sebesar Rp. 33,6 triliun. Membaiknya permodalan tersebut terutama karena penyelesaian tahap akhir program rekapitalisasi untuk BRI dan BTN serta Bank Bali, disamping peningkatan modal dari perolehan laba-laba bank.

Pada tahun 2001, secara keseluruhan permoldan bank mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi secara triwulanan, terjadi penurunan pada triwulan III-2001 dari

Rp. 67,2 triliun menjadi Rp. 63,2 triliun. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya koreksi laba rugi tahun lalu pada kelompok bank BUMN.

Sementara itu, pada tahun 2002, permodalan perbankan meningkat sebesar Rp. 32,8 triliun (52,6%) dibandingkan tahun 2001. Peningkatan tersebut karena meningkatnya perolehan laba tahun berjalan (2002) sebesar Rp. 17,6 triliun dibanding tahun 2001 yang hanya sebesar Rp. 9,5 triliun. Secara kelompok, peningkatan permodalan terjadi pada seluruh kelompok bank dengan peningkatan yang terbesar pada kelompok bank BUMN.

Memasuki tahun 2003, permodalan perbankan cukup memadai yang ditunjukkan oleh CAR agregat selama tahun 2003 berada di atas 20%. Sementara itu, dalam tahun 2004 diperkirakan permodalan bank akan sedikit menurun akibat peningkatan eksposur risiko (ATMR) sejalan dengan pertumbuhan ekspansi kredit. Selain itu kemampuan kapitalisasi internal perbankan diperkirakan masih relatif rendah sebagai akibat inefisiensi operasional, relatif tingginya risiko operasional dan relatif rendahnya profitabilitas.

#### b.5. Profitabilitas

Secara kumulatif selama tahun 1999 perbankan mengalami kerugian. Kerugian tersebut terutama berasal dari kegiatan operasional bank. Menurunnya kegiatan operasional bank terutama merupakan dampak dari cepatnya penurunan suku bunga simpanan.

Dalam tahun-tahun selanjutnya, kinerja perbankan dari sisi profitabilitas terus mengalami peningkatan. Perolehan laba tahun 2001 sebesar Rp. 13,1 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp. 23,7 triliun pada tahun 2002. Secara umum, selama tahun 2002 sebagian besar kelompok bank memperoleh laba sebelum pajak yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2001. Perolehan laba perbankan pada tahun 2002 ini berasal dari perolehan *Net Interest Income* (NII) sebesar Rp. 11,0 triliun. Secara kumulatif selama tahun 2002 perbankan telah memperoleh NII sebesar Rp. 42,4 triliun yang lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan NII pada tahun 2001 sebesar Rp. 37,8 triliun. Meningkatnya perolehan NII tersebut sejalan dengan terus berlangsungnya proses pemulihan intermediasi perbankan yang mendorong trend peningkatan pangsa pendapatan bunga kredit terhadap total pendapatan bunga.

Kestabilan NII ini masih dapat dipertahankan sampai awal 2003. Sejak awal tahun 2003, pendapatan bunga dan biaya bunga perbankan cenderung menurun sejalan dengan penurunan suku bunga SBI. Namun demikian, perbankan masih mampu mempertahankan kestabilan *Net Interest Income* (NII) antara Rp. 4,1 triliun sampai dengan Rp. 4,7 triliun per bulan selama tiga bulan terakhir. Hal ini disebabkan karena bank masih mempertahankan margin yang cukup besar antara suku bunga kredit dan suku bunga dana pihak ketiga.

Komposisi pendapatan bunga industri perbankan masih didominasi oleh pendapatan bunga yang berasal dari SBI dan surat-surat berharga obligasi rekap. Komposisi pendapatan bunga dari SBI dan obligasi ini masih berkisar antara 44% - 47% dari total pendapatan bunga, sedangkan pada kelompok 15 Bank Besar komposisi pendapatan bunga dari obligasi dan SBI ini masih mencapai 42%-54% dari total pendapatan bunga.

Namun seiring dengan gejala penurunan tingkat suku bunga SBI tersebut, mulai terlihat adanya peralihan bertahap dari pendapatan bunga yang berasal dari SBI dan obligasi ini kepada pendapatan bunga kredit. Pada kelompok 15 bank besar, pada posisi Januari 2003 pendapatan bunga dari SBI dan obligasi mencapai 53,64% sedang yang berasal dari kredit mencapai 41,09%. Pada bulan Oktober 2003, pendapatan bunga dari SBI dan obligasi turun menjadi 42,41% sedang untuk pendapatan bunga kredit naik menjadi 42,35%.

### **3. Perkembangan Variabel Penelitian**

#### **a. Jumlah Kredit**

Pertumbuhan kredit perbankan pasca krisis relatif rendah. Kredit untuk sektor korporasi cenderung turun, namun kredit retail cenderung meningkat. Pada tahun 1999, perkembangan kredit menunjukkan trend yang menurun. Pada awal tahun 1999 jumlah kredit perbankan sebesar Rp. 544.282 miliar dan pada bulan-bulan berikutnya mengalami

pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan menjadi Rp. 225.133 Miliar pada akhir tahun 1999. Penurunan kredit ini terutama disebabkan oleh faktor sosial politik yang belum meyakinkan dalam menunjang perekonomian sehingga mendorong baik untuk lebih banyak menanamkan dananya dalam bentuk SBI yang relatif lebih aman dibandingkan dalam bentuk kredit.

Faktor-faktor lain yang masih menghambat ekspansi kredit bank antara lain : modal bank yang masih negatif, bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak terjadi kredit macet, debitur yang mengajukan aplikasi kredit baru relatif sedikit, penyelesaian restrukturisasi kredit berjalan lambat.

Memasuki tahun 2000, perkembangan kredit perbankan fluktuatif dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Akan tetapi mulai Juni 2000, kredit perbankan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sampai akhir tahun. Sementara itu, penanaman SBI menunjukkan penurunan pada akhir November 2000 turun sebesar Rp. 1,2 triliun dibandingkan pada akhir triwulan III 2000, sedangkan posisi SBI pada triwulan III 2000 turun sebesar Rp. 0,3 triliun. Di sisi lain penyaluran dana lainnya dalam bentuk antarbank dan penyertaan pada triwulan IV-2000 masing-masing turun sebesar Rp. 5,4 triliun dan Rp. 0,1 triliun dibanding pada triwulan III-2000. Peningkatan penyaluran dana dalam bentuk kredit yang lebih besar dari peningkatan penanaman dalam bentuk lainnya serta penurunan penanaman dalam SBI menunjukkan proses pemulihan fungsi intermediasi bank mulai berlangsung.

Pada tahun 2001, penyaluran dana perbankan dalam bentuk kredit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2000. Secara umum, perkembangan kredit perbankan juga meningkat, walaupun dalam bulan Juli mengalami penurunan dari Rp. 306.333 Miliar menjadi Rp. 289.661 Miliar. Akan tetapi, pada bulan September, kredit perbankan tersebut kembali meningkat menjadi Rp. 304.420 Miliar dan menjadi Rp. 307.594 Miliar pada akhir tahun 2001. Peningkatan kredit tersebut mengindikasikan mulai berlangsungnya proses pemulihan fungsi intermediasi bank walaupun belum secepat yang diharapkan.

Pada tahun 2002, secara umum terjadi peningkatan dalam penyaluran kredit banding tahun 2001, walaupun pada awal tahun 2002 terjadi penurunan 1,8% dari Desember 2001. Akan tetapi, pada bulan-bulan berikutnya kembali terjadi peningkatan. Di sisi lain, terjadi penurunan penyaluran dana pada komponen SBI, antarbank aktiva dan penanaman pada surat-surat berharga. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan penurunan suku bunga yang diterapkan secara hati-hati mulai berpengaruh pada pergeseran komposisi penyaluran dana.

Selama tahun 2003, peningkatan posisi kredit dan kredit baru yang dikucurkan perbankan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun secara nominal terlihat nilai kredit yang semakin meningkat. Tersendatnya penyaluran kredit tersebut tidak terlepas dari masih berlanjutnya rigiditas suku bunga kredit perbankan yang bertujuan untuk mempertahankan profitabilitasnya.

Selain itu, penyaluran kredit selama 2003 didominasi oleh kredit konsumsi. Penyaluran kredit konsumsi selama 2003 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat (33,8% y o y), jauh lebih besar dibandingkan kredit untuk jenis modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 16,9 % dan 7,4 %. Di sisi lain, pemulihan fungsi intermediasi perbankan dihadapkan pada tantangan semakin gencarnya perusahaan melakukan pembiayaan melalui penerbitan obligasi di pasar modal.

Secara lengkap, perkembangan jumlah kredit yang disalurkan selama tahun 1999 s/d 2003 ditunjukkan oleh tabel IV.2 berikut ini.

Tabel IV.2  
Jumlah Kredit Perbankan 1999 s/d 2003  
(dalam triliun Rupiah)

Bulan	1999	2000	2001	2002	2003
Januari	544.282	225.990	264.915	302.022	358.084
Februari	499.938	228.745	274.533	302.504	366.467
Maret	366.543	223.235	285.375	302.776	376.141
April	287.877	228.777	306.011	303.155	382.175
Mei	277.602	237.929	301.905	303.247	384.158
Juni	251.282	240.135	306.333	312.018	390.563
Juli	249.428	246.026	289.661	322.600	397.187
Agustus	257.575	241.913	287.890	331.429	403.544
September	263.262	248.944	304.420	370.390	411.696
Oktober	242.979	260.977	318.727	347.788	421.295
November	247.284	265.190	303.018	356.705	432.230
Desember	225.133	269.000	307.594	365.410	437.942
Jumlah	3.713.185	2.916.861	3.856.382	3.920.044	4761.482
Rata-rata	309.432	243.072	321.365	326.670	396.790

Sumber : Data Perbankan Indonesia

Berdasarkan perkembangan dari kredit perbankan tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan kredit pasca krisis relatif sangat rendah. Selama tahun 2000 – 2002, LDR rata-rata perbankan berada dibawah 85% dibandingkan dengan sebelum krisis yakni rata-rata sebesar 72% (PPSK Bank Indonesia, 2004 : 27).

Secara umum hal tersebut disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, hal tersebut mengakibatkan penurunan permintaan kredit yang layak dibiayai bank dan disisi lain terjadi peningkatan DPK. Akibatnya bank-bank cenderung menempatkan dananya pada SBI sebagai alternatif sumber pendapatan.

Dari sisi permintaan, kondisi ekonomi yang masih lemah mendorong debitur dan investor untuk menunda investasi. Di sisi penawaran, hal ini memaksa bank untuk berhati-hati dalam memberikan kredit, sehingga pada gilirannya pertumbuhan kredit juga melemah.

Dalam strategi penyaluran kreditnya pasca krisis, perbankan cenderung menurunkan pangsa kredit korporasi dan meningkatkan pangsa kredit retail. Hal ini bertujuan untuk diversifikasi risiko portofolionya dan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran kredit mikro.

Di samping itu, perbankan juga cenderung mengurangi kredit dalam valuta asing. Pengalaman sebelum krisis menunjukkan bahwa sebagian besar kredit dalam valas tersebut diberikan kepada debitur dengan pendapatan yang bersumber bukan dalam bentuk valuta asing. Dengan adanya krisis, sebagian besar kredit valuta asing menjadi macet.

Sejak krisis 1997, perbankan cenderung memfokuskan penyaluran kredit retail karena jenis kredit ini lebih tahan terhadap pengaruh krisis ekonomi dan tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar. Perubahan strategi perkreditan dari korporasi ke retail menimbulkan implikasi. Di satu sisi, hal tersebut memberi kesempatan bagi perbankan untuk memperbaiki komposisi portofolio dan risikonya. Namun di sisi lain, perlu diantisipasi potensi peningkatan risiko operasional dan risiko strategi yang timbul akibat kurangnya pengalaman dan keahlian di sektor kredit retail agar tidak berpotensi meningkatkan kredit macet.

Perubahan orientasi penyaluran kredit perbankan tersebut juga tercermin pada peningkatan kredit konsumtif. Berbeda dengan jenis lainnya, jumlah kredit konsumtif pasca krisis justru mengalami peningkatan diatas jumlah saat sebelum krisis. Dalam kasus Indonesia, fenomena ini merupakan salah satu indikasi bahwa risiko kredit portofolio kredit (UKM) relatif lebih rendah dibandingkan portofolio kredit korporasi.

b. SBI

Setelah mengalami tekanan-tekanan berat selama krisis, situasi moneter secara bertahap kembali terkendali. Hal ini antara lain disebabkan oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan moneter untuk mengendalikan kestabilan nilai rupiah. Dengan pelaksanaan kebijakan moneter yang konsisten tersebut, uang beredar yang selama krisis meningkat tajam telah dapat dikendalikan sehingga tumbuh sesuai dengan

kisaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini telah ikut memberikan kontribusi terhadap penurunan laju inflasi dan penguatan nilai tukar rupiah.

Dengan laju inflasi yang semakin rendah dan nilai tukar rupiah yang tetap stabil, ruang gerak bagi penurunan suku bunga semakin terbuka. Dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi proses pemulihan ekonomi, Bank Indonesia mengarahkan penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan menurunnya laju inflasi dan tetap stabilnya nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan itu, suku bunga SBI, bulan secara bertahap terus menurun. Akan tetapi penurunan suku bunga SBI tersebut mendapat tantangan positif dari pelaku pasar uang antar bank sehingga secara bertahap suku bunga perbankan juga mengalami penurunan.

Memasuki akhir triwulan III/1999, kebijakan penurunan suku bunga menghadapi tantangan sebagai akibat meningkatnya di dalam negeri, yang terutama berasal dari dari gejolak di Timor Timur dan kasus Bank Bali. Tingkat suku bunga SBI sedikit mengalami peningkatan dalam mengantisipasi terjadinya pengalihan kelebihan likuiditas bank-bank ke pasar valas. Namun peningkatan ini diyakini hanya bersifat sementara sehingga tidak akan mengganggu kebijakan penurunan suku bunga hingga akhir triwulan pada tahun 1999.

Pada tahun 2000, rata-rata suku bunga SBI 1 bulan mencapai 12,4% jauh lebih rendah dengan rata-rata tahun sebelumnya sebesar 22,9%. Sedangkan secara riil, rata-rata suku bunga SBI 1 bulan dalam tahun 2000 mencapai 9,37 % yang jauh lebih tinggi dibanding dengan

tahun sebelumnya sebesar 1,9 %. Namun peningkatan suku bunga tersebut tidak direspon oleh perbankan, seperti tercermin dari perkembangan suku bunga perbankan yang kenaikannya relatif lambat. Hal ini disebabkan oleh upaya perbankan untuk memaksimalkan pendapatan bunga ditengah kondisi belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan. Selain itu masih tingginya likuiditas perbankan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kurang elastisnya peningkatan suku bunga SBI terhadap suku bunga deposito.

Sementara pada tahun 2001, suku bunga SBI selalu mengalami peningkatan dari triwulan 2 sampai dengan triwulan terakhir. Suku bunga SBI 1 bulan, pada akhir triwulan II-2001 mencapai 15,58% atau mengalami peningkatan sebesar 105 bps bila dibandingkan dengan suku bunga SBI 1 bulan pada akhir triwulan IV-2000 yang hanya sebesar 14,53%.

Seiring dengan meningkatnya suku bunga SBI, suku bunga perbankan juga mengalami peningkatan yang tercermin dari peningkatan suku bunga deposito 1 bulan. Faktor penting yang mempengaruhi kenaikan suku bunga perbankan adalah peningkatan *policy factor* untuk penentuan suku bunga penjaminan maksimum.

Pada awal tahun 2002, suku bunga SBI cenderung menurun dibandingkan dengan triwulan terakhir tahun 2001. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk memperlambat laju penurunan suku bunga SBI yang didasari oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Hal ini tercermin mulai dari meningkatnya ekspektasi inflasi yang

terutama disebabkan oleh melemahnya nilai tukar pasca peristiwa peledakan bom Bali serta sudah cukup rendahnya suku bunga SBI dalam upaya menjaga tingkat inflasi sesuai dengan pencapaian target inflasi jangka menengah. Pada akhir tahun 2002 suku bunga SBI 1 bulan mencapai 12,99 % yang semakin menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya pada tahun 2002. Hal ini disebabkan oleh kelebihan permintaan yang berasal dari dana yang kembali masuk ke perbankan pasca lebaran dan dua kali pembayaran kupon obligasi rekapitalisasi pada minggu III dan IV- 2002.

Sejalan dengan perkembangan likuidasi perbankan, Bank Indonesia berusaha menyesuaikan antara permintaan dan penawaran melalui penyesuaian rasio volume pemenang dibandingkan dengan *bidding* agar suku bunga SBI dapat terus menurun. Sampai akhir tahun 2003, suku bunga SBI 1 bulan masih tetap berlangsung. Sampai akhir tahun 2003, suku bunga SBI bulan mencapai 8,31 % dengan pertumbuhan yang statis dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Untuk selengkapnya, perkembangan suku bunga SBI 1 bulan selama tahun 1999 s/d 2003 dapat dilihat dalam tabel IV.3 dibawah ini.

Tabel IV.3  
Suku Bunga SBI 1 bulan ( % )

Bulan	1999	2000	2001	2002	2003
Januari	36,43	11,48	14,74	17,09	12,69
Februari	37,50	11,13	14,79	16,86	12,24
Maret	37,84	11,08	15,58	16,76	11,40
April	35,19	11,00	16,09	16,61	11,06
Mei	28,73	11,08	16,33	15,51	10,44
Juni	22,05	11,74	16,65	15,11	9,53
Juli	15,01	13,53	17,17	14,93	9,10
Agustus	13,20	13,53	17,67	14,35	8,91
September	13,02	13,62	17,57	13,22	8,66
Oktober	13,13	13,74	17,58	13,10	8,48
November	13,10	14,75	17,60	13,00	8,49
Desember	12,51	13,43	17,62	12,99	8,31
Rata-rata	23,14	12,51	16,82	14,97	9,94

Sumber : Laporan Bulanan Bank Indonesia, 1999 -2003

Dengan perkembangan suku bunga SBI yang semakin menurun ini, diharapkan akan memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga agar tidak mengganggu pencapaian inflasi yang diharapkan. Dalam perkembangan selanjutnya, tingkat suku bunga SBI masih dalam posisi yang diharapkan yaitu mengalami penurunan hingga mencapai 7,33 % pada akhir triwulan I-2004.

c. Kurs

Pada akhir 1999, terjadi perbaikan di sisi penawaran dibandingkan sisi permintaan, sehingga kesenjangan output mengalami perbaikan. Dengan kondisi seperti ini mengakibatkan tekanan-tekanan kenaikan

harga menjadi relatif lemah atau terjadi deflasi. Ekspektasi deflasi tersebut mulai terjadi sejak awal 1999.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor di sisi permintaan dan penawaran, deflasi juga dipengaruhi oleh menguatnya nilai tukar rupiah sampai dengan Juli 1999 yang sangat berkaitan dengan membaiknya situasi moneter internasional serta relatif tenang kondisi sosial politik dalam negeri. Menjelang bulan Agustus 1999, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan sebagai akibat dari tekanan kondisi sosial politik.

Dalam tahun 2000, nilai tukar rupiah mencapai rata-rata Rp 8.400 per Dollar Amerika melemah 6,98 % dibandingkan rata-rata tahun 1999 sebesar Rp7.848. Melemahnya nilai tukar tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya pembelian valas dari korporasi sebagai akibat munculnya kembali sentimen negatif terhadap insatabilitas kondisi sosial politik di dalam negeri.

Memasuki tahun 2001, kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah makin kuat. Rupiah kembali menjadi tekanan depresiasi dan pada Maret 2001, nilai tukar rupiah mencapai Rp. 11.400, meskipun pada awal tahun 2001, rupiah sempat menguat dibandingkan pada akhir tahun 2000. beberapa langkah yang diambil Bank Indonesia cukup memberikan sumbangan yang berarti terhadap penguatan nilai rupiah pada awal Januari 2001. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan intervensi ke pasar dengan membatasi transaksi rupiah. Sementara itu, tekanan depresiasi yang terjadi pada Maret 2001 diakibatkan oleh pertikaian etnis di Kalimantan sehingga mendorong korporasi untuk membeli dollar.

Dalam perkembangan selanjutnya, nilai tukar rupiah kembali menguat pada triwulan III. Hal ini disebabkan oleh dukungan terhadap pemerintahan baru Megawati Soekarno Putri baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga meningkatkan optimisme terhadap kemungkinan berjalannya kembali proses pemulihan ekonomi nasional. Selain itu apresiasi ini juga disebabkan oleh melemahnya dollar AS.

Namun pada triwulan terakhir tahun 2001, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan depresiasi sejak September 2001. Tekanan depresiasi tersebut bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Faktor dari dalam negeri berasal dari apresiasi rupiah yang dimanfaatkan oleh pelaku pasar terutama bank dan korporasi untuk membeli dollar AS pada tingkat kurs yang dipandang cukup menguntungkan. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari kekhawatiran akan terjadinya reaksi global pasca serangan teroris ke AS.

Perkembangan nilai tukar rupiah dalam tahun 2002 secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan penguatan dibandingkan pada tahun 2001. Secara *point to point* posisi rupiah pada akhir 2002 menguat 1.450 point (16,2%) dari Rp. 10.400 pada akhir 2001. Dengan perkembangan tersebut, rupiah tercatat sebagai “mata uang berkinerja terbaik kedua” di Asia Pasifik setelah dolar Selandia Baru (Bank Indonesia, 2002).

Kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah terutama pasca tragedi di Bali tidak terlepas dari berbagai sentimen positif, upaya-upaya stabilisasi nilai tukar rupiah yang dilakukan Bank Indonesia yang terbukti

efektif meredam gejolak nilai tukar rupiah di pasar. Sentimen positif yang mendukung penguatan rupiah bersumber dari faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor-faktor ekonomi ini terkait dengan sektor perbankan dan sektor fiskal. Sementara itu, faktor-faktor non ekonomi yang mendorong nilai tukar menguat terkait dengan kemajuan dari hasil investigasi kasus peledakan bom Bali dan penandatanganan perjanjian perdamaian antara pemerintah RI dan GAM.

Pada tahun 2003, nilai tukar rupiah mengalami penguatan dibandingkan pada tahun 2002. Nilai tukar rupiah dalam tahun 2003 ini menguat 6,29% dari tahun 2002 secara *point to point*. Lebih stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah dalam akhir tahun 2003 tercermin dari menurunnya tingkat volatilitas nilai tukar rupiah dari rata-rata 21,67% pada triwulan III 2003 menjadi 0,45% pada triwulan IV 2003.

Cukup stabilnya nilai tukar rupiah tersebut didukung oleh beberapa faktor positif sehingga dapat menahan depresiasi rupiah yang terutama diakibatkan oleh peningkatan permintaan valas untuk kebutuhan akhir tahun. Selain itu, muncul beberapa faktor yang menimbulkan sentimen positif terhadap rupiah, seperti : divestasi beberapa bank seperti BRI, BII, penerbitan obligasi pemerintah.

Untuk lebih jelasnya, perkembangan kurs rupiah bulanan selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, dapat dilihat dalam tabel IV.4 berikut ini.

Tabel IV.4  
Kurs Bulanan Tahun 1999 s/d 2003 (Rupiah)

Bulan	1999	2000	2001	2002	2003
Januari	8.950	7.425	9.450	10.320	8.890
Februari	8.730	7.505	9.835	10.189	8.895
Maret	8.685	7.590	10.400	9.655	8.922
April	8.260	7.945	11.675	9.316	8.803
Mei	8.105	8.620	11.058	8.785	8.419
Juni	6.726	8.735	11.440	8.730	8.230
Juli	6.875	9.003	9.525	9.108	8.337
Agustus	7.565	8.290	8.865	8.867	8.508
September	8.386	8.780	9.675	9.015	8.455
Oktober	6.900	9.395	10.435	9.233	8.439
November	7.425	9.530	10.430	8.976	8.501
Desember	7.100	9.595	10.400	8.640	8.487
Rata-rata	7.817	8.534	10.266	9.236	8.574

Sumber : Laporan Bulanan Bank Indonesia, 1999 s/d 2003

Dalam perkembangan kurs rupiah pada tahun 2004, kembali mendapat tekanan yang disebabkan oleh masih tingginya permintaan valas di pasar domestik, sementara pasokan valas menurun. Beberapa korporasi melakukan pembelian valas dalam jumlah cukup besar antara lain : Pertamina, PLN, Telkom dan Bulog, baik untuk kebutuhan pembiayaan impor maupun untuk pembayaran utang luar negeri.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi makro ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan PDB yang diikuti oleh deflasi. Pada tahun 1999, permintaan domestik mengalami peningkatan akibat kenaikan konsumsi yang antara

lain di dorong oleh penurunan suku bunga, perbaikan nilai tukar perdagangan dan peningkatan kepercayaan konsumen. Sementara itu, investasi terutama swasta belum meningkat antara lain sebagai akibat dari terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan termasuk dari sektor perbankan. Di sisi penawaran, pasokan barang dan jasa mengalami kenaikan khususnya di sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Sementara itu, dari sektor eksternal, ekspor nonmigas mulai memperlihatkan perbaikan meskipun secara keseluruhan masih lemah sedangkan impor terutama impor barang konsumsi dan bahan baku mengalami peningkatan.

Dengan kondisi yang demikian ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dan fenomena deflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh relatif lebih besarnya respon perbaikan di sisi penawaran yang selama krisis dalam kondisi tertekan dan cukup terkendalinya kenaikan permintaan secara agregat.

Pada tahun 2000, kegiatan ekonomi ditinjau dari sisi permintaan agregat mengalami pertumbuhan investasi ini terkait dengan mulai pulihnya kepercayaan investor dan mulai membaiknya pembiayaan baik dalam maupun luar negeri. Sementara itu, pertumbuhan pada ekspor barang dan jasa terkait antara lain dengan kondisi perekonomian dunia yang mulai membaik. Kondisi perekonomian dunia yang membaik disebabkan oleh membaiknya perekonomian Eropa dan Jepang serta pulihnya perekonomian di negara-negara *Emerging markets* terutama di Asia. Peningkatan yang tinggi yang terjadi pada ekspor migas karena

kenaikan harga minyak di luar negeri. Sementara itu, peningkatan ekspor nonmigas masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja yang belum menggembirakan pada sisi ekspor ini terkait dengan berbagai hambatan dari sisi internal, seperti tersendatnya bahan baku dan keterbatasan modal kerja, serta hambatan eksternal seperti meningkatnya persaingan serta menurunnya kepercayaan pembeli luar negeri.

Memasuki tahun 2001, kondisi perekonomian masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2000. Berdasarkan kontribusi relatif, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan tertentu masih berasal dari konsumsi dan ekspor. Sementara dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor industri dan perdagangan.

Dari sisi fundamental ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah memberikan tekanan yang lebih berat terhadap melambatnya kegiatan ekonomi dan meningkatnya inflasi. Tekanan depresiasi rupiah tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan dollar yang sangat besar yang tidak diimbangi oleh pasokan dollar yang memadai. Di samping itu, meningkatnya ketidakpastian di dalam negeri sehubungan dengan naiknya ketidakpastian politik dan keamanan turut mendorong melemahnya nilai rupiah. Sementara itu, kinerja sisi eksternal mengalami tekanan sehubungan dengan memburuknya situasi perekonomian global. Dalam kondisi yang demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam tahun 2003 semakin menurun sampai dengan akhir tahun 2001.

Pada tahun 2002, kondisi perekonomian menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2001. Di sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi melambat baik secara tahunan maupun bulanan. Terjadinya tragedi Bali pada 12 Oktober 2002 memberikan tantangan yang lebih besar bagi masyarakat mengenai gambaran situasi keamanan di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya guna memberikan penjelasan yang seobyektif mungkin tentang kondisi di dalam negeri sehingga diharapkan dapat menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk Indonesia. Dari sisi penawaran, sektor-sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terkait dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang perayaan beberapa hari besar agama yang jatuh pada triwulan IV-2002.

Dalam perkembangan selanjutnya, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2003 secara keseluruhan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2002. Dari sisi permintaan, kecenderungan turunnya suku bunga telah mendorong masyarakat untuk lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi dibandingkan menabung. Sementara itu, kinerja investasi mengalami pertumbuhan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kegiatan industri transportasi, komunikasi, keuangan dan jasa. Indikator lain yang mendukung rendahnya kinerja investasi adalah pertumbuhan impor barang modal sampai dengan November 2003 yang masih negatif sampai 15,9%. Sementara itu dari sisi penawaran,

pertumbuhan ekonomi terutama disumbang oleh sektor perdagangan sektor pengangkutan dan sektor industri pengolahan.

Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi secara bulanan dapat dilihat dalam tabel IV.5 berikut ini.

Tabel IV.5  
Pertumbuhan Ekonomi Bulanan (%)

Bulan	1999	2000	2001	2002	2003
Januari	8,021	2,299	0,876	0,462	0,581
Februari	0,066	1,372	0,282	0,301	0,334
Maret	0,066	0,181	0,282	0,300	0,333
April	0,066	0,181	0,281	0,300	0,332
Mei	0,065	0,180	0,280	0,299	0,331
Juni	0,065	0,180	0,279	0,298	0,330
Juli	0,065	0,180	0,278	0,297	0,329
Agustus	0,065	0,179	0,277	0,296	0,328
September	0,065	0,179	0,277	0,295	0,326
Oktober	0,065	0,178	0,276	0,294	0,325
November	0,065	0,178	0,275	0,293	0,322
Desember	0,065	0,178	0,275	0,293	0,326
Rata-rata	0,728	0,441	0,328	0,311	0,350

Sumber : Hasil interpolasi Pertumbuhan Ekonomi Tahunan 1999 s/d 2003

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang demikian ini diharapkan pada masa yang akan datang kenaikan permintaan dapat diimbangi oleh peningkatan dari sisi penawaran. Dalam kondisi permintaan dan penawaran yang seimbang, yang disertai dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung stabil dan membaiknya kondisi ekspektasi inflasi masyarakat menyebabkan rendahnya tekanan inflasi. Hal ini akan mengakibatkan Bank Indonesia untuk menurunkan

suku bunga SBI yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah kredit perbankan.

e. Kredit Macet

Besarnya kredit macet masih menjadi beban berat bagi perbankan sebagai akibat kondisi riil yang mengalami kesulitan usaha sehingga tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet akan sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan penyehatan perbankan secara keseluruhan. Upaya penyehatan bank yang dilakukan melalui program rekapitalisasi bank umum tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan penyelesaian kredit macet, restrukturisasi perusahaan yang perbaikan dunia usaha.

Pada tahun 1999, jumlah kredit macet menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada Januari 1999, besarnya kredit macet adalah Rp. 29.097 Miliar yang terus mengalami penurunan sampai dengan bulan Desember 1999 dan mencapai Rp. 25.673 Miliar. Jumlah kredit macet yang semakin menurun ini terkait dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, restrukturisasi kredit ini masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya : pelaksana teknis dari bank yang kurang mampu dan transparan, debitur yang beritikad tidak baik, dan kesulitan dalam mempertemukan beberapa bank kreditur yang mempunyai debitur yang sama.

Memasuki tahun 2000, jumlah kredit macet semakin menurun dari Rp. 25.362 Miliar pada awal tahun menjadi Rp. 21.978 pada akhir tahun.

Menurunnya jumlah kredit macet ini diakibatkan oleh peningkatan hasil restrukturisasi kredit, sehingga kinerja serta prospek usaha debitur bank dapat ditingkatkan dan mampu kembali memenuhi kewajibannya kepada bank.

Usaha restrukturisasi kredit ini masih menunjukkan perbaikan dalam tahun 2001. Total kredit yang telah direstrukturisasi secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2001 sebesar Rp. 83,3 triliun sedangkan jumlah kredit macet pada akhir triwulan III-2001 sebesar Rp. 19.448 Miliar. Kondisi seperti ini diantaranya didukung oleh, upaya Bank Indonesia dalam menghimbau kepada berbagai pihak yang terkait agar bersama-sama dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya iklim usaha yang baik.

Pada tahun 2002, industri perbankan nasional memperlihatkan kinerja yang membaik. Hal tersebut tercermin dari membaiknya beberapa indikator seperti : meningkatnya kredit, profitabilitas dan membaiknya *Non Performing Loans* (NPLs). Dengan membaiknya NPLs ini, berarti juga terjadi penurunan jumlah kredit macet. Sampai akhir tahun 2002, tercatat jumlah kredit macet sebesar Rp. 11.256 miliar yang mengalami penurunan sebesar 36,58 % dari November 2002. Dengan kondisi seperti ini mencerminkan kondisi dunia usaha yang semakin membaik.

Sementara itu pada tahun 2003, secara umum risiko kredit masih terkendali. Pada bulan Agustus 2003, jumlah kredit macet mencapai level terendah yaitu sebesar Rp. 10.959 Miliar. Walaupun pada bulan-bulan berikutnya terjadi peningkatan menjadi Rp. 12.013 Miliar pada akhir

tahun 2003. Dalam tahun ini, walaupun jumlah kredit baru yang disalurkan meningkat, akan tetapi penyaluran kredit baru tersebut tidak terlalu mendorong peningkatan kredit macet karena kredit baru tersebut pada umumnya merupakan kredit modal kerja dan risiko kredit ini relatif rendah. Di samping itu, pemberian kredit baru juga dilakukan dengan cara yang relatif selektif karena persepsi dan ekspektasi risiko kredit yang masih tinggi serta masih rendahnya permintaan kredit dari sektor industri.

Untuk selengkapnya, perkembangan kredit macet pasca krisis tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 ditunjukkan oleh tabel IV.6 .

Tabel IV.6

Kredit Macet tahun 1999 s/d 2003 (dalam Milyar Rupiah)

Bulan	1999	2000	2001	2002	2003
Januari	29.097	25.362	21.627	17.807	11.364
Februari	28.786	25.051	21.316	17.746	11.074
Maret	28.474	24.739	21.004	16.910	12.055
April	28.163	24.428	20.693	17.227	11.785
Mei	27.852	24.117	20.382	17.045	11.887
Juni	27.541	23.806	20.070	16.269	11.227
Juli	27.229	23.494	19.759	17.325	12.821
Agustus	26.918	23.183	19.448	16.900	10.959
September	26.607	22.872	19.137	16.826	11.825
Oktober	26.296	22.561	18.825	16.265	11.757
November	25.984	22.249	18.514	15.373	14.007
Desember	25.673	21.938	18.203	11.256	12.013
Jumlah	328.620	283.800	238.978	196.949	142.724
Rata-rata	27.385	23.650	19.915	16.412	11.898

Sumber : Perkembangan Data Perbankan Indonesia 1999 s/d 2003

Dalam perkembangan selanjutnya di tahun 2003, jumlah kredit macet kembali mengalami peningkatan. Pada akhir semester I-2004,

jumlah kredit macet sebesar Rp. 13.505 Miliar yang meningkat sebesar 12,42% dari akhir tahun 2003. Hal ini diakibatkan oleh : kemungkinan memburuknya kredit yang direstruktur : bank-bank masih kurang yakin atas penilaian kualitas dan prospek kreditnya.

## **B. Analisa Data dan Pembahasan**

### **4. Deskripsi Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data time series yang menggunakan data sekunder. Data yang digunakan tersebut diproses dari laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Laporan bulanan Bank Indonesia, Data Perbankan Indonesia. Data analisis dalam bentuk data bulanan mulai periode Januari 1999 sampai dengan Desember 2003.

Seluruh data yang digunakan akan diolah dan dianalisis menggunakan program Eviews versi 3.1 analisis data yang akan dikemukakan merupakan hasil analisis secara instrumen dan ekonomi. Adapun variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kredit yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit yang disalurkan perbankan umum kepada masyarakat. Data jumlah kredit ini berupa data bulanan yang diperoleh dari data perbankan Indonesia terbitan BI.
2. Tingkat suku bunga SBI yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga SBI yang dikeluarkan oleh BI sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan kebijakan operasi pasar terbuka. Data suku bunga SBI berupa data bulanan yang dapat dari laporan bulanan BI terbitan BI.
3. Kurs atau nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah besarnya kurs rata-rata antara rupiah dengan dollar AS berupa data bulanan yang didapat dari SEKI terbitan BI.
4. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan bulanan yang diproses

dari perhitungan pertumbuhan ekonomi hasil interpolasi data PDB tahunan yang bersumber dari SEKI terbitan BI.

5. Kredit macet yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai kredit macet dari bank umum yang berupa data bulanan yang diperoleh dari data perbankan Indonesia terbitan BI.

## **2. Data Empirik Penelitian**

Seluruh data yang digunakan data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berbentuk time series. Data variabel yang akan analisis dalam penelitian ini menggunakan data bulanan selama 60 bulan mulai dari bulan Januari 1999 sampai dengan Desember 2003. variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga SBI, nilai tukar atau kurs bulanan rupiah, pertumbuhan ekonomi dan kredit macet. Variabel dependen yang digunakan dalam pemilihan ini adalah jumlah kredit perbankan. Tabel IV.7 di bawah ini menunjukkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini :

Tabel IV.7 Data Empirik penelitian

Periode	JK (Miliar Rupiah)	SBI (%)	Kurs(Rp/\$)	PE (%)	KM (Miliar Rupiah)
Jan-99	544.282	36,43	8.950	8,021	29.097
Feb-99	499.938	37,5	8.730	0,066	28.786
Mar-99	366.543	37,84	8.685	0,066	28.474
Apr-99	287.877	35,19	8.260	0,066	28.163
Mei-99	277.602	28,73	8.105	0,065	27.852
Jun-99	251.282	22,05	6.726	0,065	27.541
Jul-99	249.428	15,01	6.875	0,065	27.229
Agust-99	257.575	13,2	7.565	0,065	26.918
Sep-99	263.262	13,02	8.386	0,065	26.607
Okt-99	242.979	13,13	6.900	0,065	26.296
Nov-99	247.284	13,1	7.425	0,065	25.984
Des-99	225.133	12,51	7.100	0,065	25.673
Jan-00	225.990	11,48	7.425	2,299	25.362
Feb-00	228.745	11,13	7.505	1,372	25.051
Mar-00	223.235	11,08	7.590	0,181	24.739
Apr-00	228.777	11	7.945	0,181	24.428
Mei-00	237.929	11,08	8.620	0,18	24.117
Jun-00	240.135	11,74	8.735	0,18	23.806
Jul-00	246.026	13,53	9.003	0,18	23.494
Agust-00	241.913	13,53	8.290	0,179	23.183
Sep-00	248.944	13,62	8.780	0,179	22.872
Okt-00	260.977	13,74	9.395	0,178	22.561
Nov-00	265.190	14,75	9.530	0,178	22.249
Des-00	269.000	13,43	9.595	0,178	21.938
Jan-01	264.915	14,74	9.450	0,876	21.627
Feb-01	274.533	14,79	9.835	0,282	21.316
Mar-01	285.375	15,58	10.400	0,282	21.004
Apr-01	306.011	16,09	11.675	0,281	20.693
Mei-01	301.905	16,33	11.058	0,28	20.382
Jun-01	306.333	16,65	11.440	0,279	20.070
Jul-01	289.661	17,17	9.525	0,278	19.759
Agust-01	287.890	17,67	8.865	0,277	19.448
Sept-01	304.420	17,57	9.675	0,277	19.137
Bersambung ke halaman.....					

Periode	JK (Miliar Rupiah)	SBI (%)	Kurs(Rp/\$)	PE (%)	KM (Miliar Rupiah)
Nov-01	303.018	17,6	10.430	0,275	18.514
Des-01	307.594	17,62	10.400	0,275	18.203
Jan-02	302.022	17,09	10.320	0,462	17.807
Feb-02	302.504	16,86	10.189	0,301	17.746
Mar-02	302.776	16,76	9.655	0,3	16.910
Apr-02	303.155	16,61	9.316	0,3	17.227
Mei-02	303.247	15,51	8.785	0,299	17.045
Jun-02	312.018	15,11	8.730	0,298	16.269
Jul-02	322.600	14,93	9.108	0,297	17.325
Agust-02	331.429	14,35	8.867	0,296	16.900
Sep-02	370.390	13,22	9.015	0,295	16.826
Okt-02	347.788	13,1	9.233	0,294	16.265
Nov-02	356.705	13	8.976	0,293	15.373
Des-02	365.410	12,99	8.640	0,293	11.256
Jan-03	358.084	12,69	8.890	0,581	11.364
Feb-03	366.467	12,24	8.895	0,334	11.074
Mar-03	376.141	11,4	8.922	0,333	12.055
Apr-03	382.175	11,06	8.803	0,332	11.785
Mei-03	384.158	10,44	8.419	0,331	11.887
Jun-03	390.563	9,53	8.230	0,33	11.227
Jul-03	397.187	9,1	8.337	0,329	12.821
Agust-03	403.544	8,91	8.508	0,328	10.959
Sep-03	411.696	8,66	8.455	0,326	11.825
Okt-03	421.295	8,48	8.439	0,325	11.757
Nov-03	432.230	8,49	8.501	0,322	14.007
Des-03	437.942	8,31	8.487	0,326	12.013

Sumber. Laporan BI beberapa edisi

### 3. Model Analisis

Penelitian ini akan menggunakan model analisis *Error Correction Model* (ECM) atau model koreksi kesalahan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Alat analisis ini lebih relevan jika data yang akan dianalisis bersifat standar / normal / stabil, sebab salah satu persyaratan untuk mengaplikasikan regresi deret waktu adalah dipenuhinya data yang bersifat stasioner. Data yang bersifat tidak stasioner

untuk koefisien regresi tersebut menjadi tidak valid lagi (Insukindro, 1992 b : 260 dalam Mulyanto, 1999 : 75). Sebelum melakukan estimasi dengan menggunakan ECM, dilakukan uji terhadap orde / derajat integrasi dari masing-masing variabel yang akan digunakan. Untuk menentukan besarnya orde integrasi ini akan digunakan uji akar-akar unit (*Unit Roots Test*) dan uji derajat integrasi untuk mengetahui stationeritas regresi kointegrasi maka dilakukan uji kointegrasi dari variabel yang ada. Sedangkan untuk menentukan model dalam regresi ECM maka dilakukan uji MWD (*Mackinnon White and Davidson* ). Untuk mengetahui hubungan kausalitas yang terjadi antara jumlah kredit dengan pertumbuhan ekonomi akan digunakan uji kausalitas granger.

#### **4. Hasil**

##### **a. Pemilihan model**

Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan masalah empirik yang sangat penting, karena teori ekonomi tidak secara spesifik menunjukkan apakah sebaiknya bentuk fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linear atau log-linear atau bentuk fungsi lainnya (Aliman, 2000 : 14).

Ada beberapa metode empirik yang digunakan dalam pemilihan bentuk fungsi model empirik, seperti : metode model transformasi Box-cox, metode yang dikembangkan Mac Kinnon, White dan Davidson atau lebih dikenal dengan MWD Test, metode Bara dan Mc Aleer atau dikenal dengan B-M Test dan metode yang dikembangkan Zarembaka. Dalam penelitian ini, pemilihan bentuk fungsi model empiris akan digunakan

metode yang dikembangkan oleh Mac Kinnon, White dan Davidson atau dikenal dengan MWD Test.

Berdasarkan hasil regresi pada uji MWD, maka dapat dilihat (lampiran pemilihan model) bahwa nilai  $Z_1$  pada model persamaan ke-1 signifikan pada tingkat signifikansi 5% sedangkan nilai  $Z_2$  pada model persamaan ke-2 tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti, dengan melihat signifikansi  $Z_1$ , maka kita menolak model yang benar linear, atau dengan kata lain model yang benar adalah model log linear. Berdasarkan nilai t statistik,  $Z_1$  mempunyai nilai t statistik yang kurang dari nol, sedangkan nilai t statistik  $Z_2$  lebih dari nol, sehingga model yang benar adalah model log linear.

Berdasarkan perbandingan model tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang akan digunakan untuk meneliti pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan pasca krisis Januari 1999- Desember 2003 pada Bank umum adalah model pendekatan ECM dengan bentuk log linear .

#### b. Uji Stasioneritas dan Derajat Integrasi

Pada tahap awal akan dilakukan uji stasioneritas dengan menggunakan uji akar-akar unit dengan menggunakan metode DF (*Dickey Fuller*) dari ADF (*Augmented Dickey Fuller*). Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui stasioner hendaknya suatu variabel pada data deret waktu. Apabila dari hasil uji yang digunakan pada data yang dimaksud belum mempunyai sifat yang stasioner, maka langkah selanjutnya adalah menentukan orde / derajat integrasi sampai data yang akan digunakan tersebut bersifat stasioner yaitu dengan uji derajat integrasi.

Tabel IV. 8  
 Nilai uji stasionaritas dengan Metode Augmented Dickey Fuller  
 Menggunakan trend dan Intercept pada ordo 0

Variabel	Nilai hitung mutlak		Nilai kritis mutlak pada 1%	
	DF	ADF	DF	ADF
D (DJK)	-7.313382	-7.046006	-3.5478	-4.1249
D (DSBI)	-3.477845	-3.738100	-3.5478	-4.1249
D (KURS)	-5.482683	-5.440968	-3.5478	-4.1249
D (DPE)	-8.557682	-8.463242	-3.5478	-4.1249
D (DKM)	-4.603484	-4.616506	-3.5478	-4.1249

Sumber : Print our komputer

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode DF dan ADF dalam tabel IV.8 diatas, terlihat bahwa nilai DF dan ADF pada ordo 0 untuk variabel SBI adalah sebesar -3.477845 dan -3.738100 lebih kecil dari nilai kritis mutlak pada tingkat  $\alpha$  1% yaitu sebesar -3.5478 dan -4.1249 berarti kesimpulannya data urut waktu SBI memiliki nilai unit root tidak stasioner. Karena dalam data deret waktu tersebut masih bersifat tidak stasioner, maka perlu distasionerkan dahulu agar tidak terdapat korelasi yang lancung. Keadaan ini menyebabkan perlu dilanjutkan pada tahap uji derajat integrasi. Dari uji derajat integrasi yang dilakukan dapat diperoleh hasil estimasi nilai DF dan ADF seperti tabel dibawah ini.

Tabel IV. 9  
 Nilai uji stasioneritas dengan Metode Augmented Dickey Fuller  
 Menggunakan trend dan Intercept pada ordo 1

Variabel	Nilai hitung mutlak		Nilai kritis mutlak pada 1%	
	DF	ADF	DF	ADF
D (DJK)	-8.46055	-8.888181	-3.5501	-4.1281
D (DSBI)	-4.880655	-4.810141	-3.5501	-4.1281
D (KURS)	-7.435034	-7.367118	-3.5501	-4.1281
D (PE)	-10.64535	-10.51880	-3.5501	-4.1281
D (KM)	-7.027923	-6.940605	-3.5501	-4.1281

Sumber : Print out komputer

Pada tabel IV. 9 dapat diketahui bahwa nilai DF dan ADF untuk semua variabel telah memiliki nilai yang lebih besar dari nilai kritis MC. Kinnon pada tingkat 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada ordo / derajat satu 1 (1) semua data sudah bersifat stasioner. Karena dengan demikian distribusi (t) mengarah pada kondisi yang signifikan dengan menggunakan uji stasioneritas metode DF maupun ADF.

c. Uji kointegrasi

Langkah selanjutnya setelah uji stasioneritas melalui uji akar-akar unit dipenuhi, maka selanjutnya adalah dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui parameter jangka panjang. Uji yang digunakan adalah uji CDRW, uji DF dan uji ADF. Namun, dalam penelitian untuk menguji kointegrasi variabel yang ada, metode yang digunakan adalah metode Engel dan Granger dengan memakai uji statistik DF dan ADF dari residual regresi ke integrasi. Untuk menghitung nilai DF dan ADF dari residual regresi terlebih dahulu membentuk persamaan regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS).

$$JK : a_0 + a_1 SB1 + a_2 kurs + a_3 PF + a_4 KM + E_t$$

Dimana JK adalah jumlah kredit sebagai variabel dependen dengan tingkat suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan ekonomi dan kredit macet sedangkan  $E_t$  adalah kesalahan pengganggu.

Dan persamaan diatas akan didapat nilai residualnya. Setelah residualnya didapat langkah selanjutnya adalah melakukan penafsiran melalui otogresi dari residual persamaan tersebut dengan menggunakan OLS :

$$DE_t = P1 BE_t$$

$$DE_t = 91 BE_t + W1 B_t DE_t$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil akhir dan pengolahan uji kointegrasi seperti tabel di bawah ini:

Tabel IV.10  
Nilai uji stasioneritas dengan Metode Augmented Dickey Fuller  
Menggunakan trend dan Intercept pada ordo 1

Nilai Hitung ADF : 9.469667	1% critical value	-4.1281		
	5% critical value	-3.4904		
	10% critical value	-3.1735		
Variabel dependen : D (residu)				
Variabel	Koefisien	St.error	t.statistik	Prob
D (residu (-1))	-1.806826	0.190801	-9.469667	0.0000
D (residu (-1),2)	0.245049	0.091686	2.672684	0.0100
R <sup>2</sup>	: 0.742372			
F statistik	: 49.94721			
DW statistik	: 1.892864			

Sumber : Print out komputer

Dari tabel regresi kointegrasi didapat nilai residualnya yang kemudian diuji dengan metode *Augmented Dickey Fuller* untuk melihat apakah nilai dari residual tersebut bersifat stasioner atau tidak.

Tabel IV.10 menunjukkan bahwa nilai hitung mutlak ADF lebih besar dan nilai kritis mutlak Mc kinnon pada tingkat  $\alpha$  1%. Hal ini berarti bahwa nilai residu tersebut bersifat stasioner pada ordo derajat satu.

- d. Hasil uji kausalitas granger antara jumlah kredit dengan pertumbuhan ekonomi

Model analisis untuk menguji hubungan kausalitas yang terjadi antara variabel jumlah kredit dengan pertumbuhan ekonomi akan digunakan uji kualitas granger. Dari hasil perhitungan dan uji kualitas granger akan didapatkan empat kemungkinan kausalitas antara jumlah kredit dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk memperkuat indikasi keberadaan berbagai bentuk kausalitas tersebut, maka dilakukan F test untuk masing-masing regresi.

Tabel IV. 11  
Hasil uji kausalitas Granger antara Jumlah Kredit dan pertumbuhan ekonomi

Lag	JK terhadap PE		PE terhadap JK	
	F. statistik	Prob	F-statistik	Prob
Lag1	1,44469	0,03453	0,01961	0,88916
Lag2	0,02652	0,97384	23,9534	0,00000
Lag3	0,75856	0,52278	4,03564	0,01213
Lag4	0,57363	0,68312	0,52423	0,71839
Lag5	1,40308	0,24235	0,50051	0,77411
Lag6	1,48065	0,20952	0,55815	0,76075

Sumber : Print out komputer

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada tabel IV.11 dengan melihat probabilitas signifikansinya pada tiap-tiap lagnya terlihat pada lag2,3 hanya terjadi hubungan satu arah antara jumlah kredit dan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan jumlah kredit, namun jumlah kredit tidak dapat menjelaskan pertumbuhan

ekonomi. Sedangkan pada lag 1 terdapat hubungan satu arah antara jumlah kredit dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah kredit dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi.

Pada lag-lag berikutnya, yaitu lag,4,5 dan 6 tidak terjadi hubungan antara kedua variabel, artinya kedua variabel yaitu jumlah kredit dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat saling menjelaskan atau tidak dapat saling mempengaruhi.

Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sisi permintaan kredit mempengaruhi jumlah kredit. Akan tetapi, jumlah kredit tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

e. Analisis dengan menggunakan Model Koreksi Kesalahan (ECM)

Estimasi dengan pendekatan model koreksi kesalahan akan menjelaskan parameter jangka pendek maupun dalam jangka panjang atas variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini, model koreksi kesalahan menjelaskan parameter jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah kredit terhadap hasil estimasi yang didapat dengan menggunakan program eviews 3.1 dengan model linear berganda ECM sebagai berikut:

Tabel IV.12  
Estimasi fungsi jumlah kredit dengan model ECM

Variabel dependen : D (JK)				
Variabel	Koefisien	Std. Error	t. statistik	Tingkat signifikan
Konstantu	0.500366	0.142865	3.502373	0.0010
D (SBI)	-0.006258	0.001774	-3.527444	0.0009
D (Kurs)	0.000020	0.000003	5.729309	0.0000
D (PE)	-0.007885	0.005507	-1.431797	0.1587
D (KM)	-0.000002	0.000002	-0.919825	0.3623
SBI (-1)	-0.193471	0.048474	-3.991273	0.0002
Kurs (-1)	-0.191366	0.049061	-3.900566	0.0003
PE (-1)	-0.187808	0.049867	-3.766160	0.0005
KM (-1)	-0.191375	0.049061	-3.900799	0.0003
ECT	0.191372	0.049060	3.900804	0.0003
R <sup>2</sup> : 0.825188		F statistik : 24.56007		
R <sup>2</sup> adjusted : 0.788136		Prob (F.stat) : 0.000000		
DW statistik : 2.227217				

Sumber : Print out Komputer

Dari hasil perhitungan model ECM di atas, dapat dibuat fungsi regresi OLS sebagai berikut:

$$DJK = 0,500366 - 0,006258 D(SBI) + 0,000020 D(Kurs) - 0,007885 D(PE) - 0,000002D(KM) - 0,193471 SBI (-1) - 0,191366 Kurs (-1) - 0,187808 PE (-1) - 0,191375 KM(-1) + 0,191372 ECT$$

Berdasarkan fungsi regresi linear ECM diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari koefisien ECT nya (Error Correction Term) sebesar 0,191372. Ini menunjukkan bahwa proporsi biaya ketidakseimbangan dalam perkembangan jumlah kredit pada periode sebelumnya yang disesuaikan dengan pada periode sekarang adalah sekitar 19,1372%. Dilihat dari tingkat signifikansi ECT nya menunjukkan nilai 0.0000 yang disignifikan pada taraf 5%. Hal ini berarti spesifikasi model dapat dibenarkan dan memberi indikasi mengenai kemungkinan jangka pendek dan jangka panjang. Nilai konstanta 0,500366 dari hasil estimasi diatas menunjukkan

terjadinya perubahan jumlah kredit sebesar 0,500366 persen, jika semua variabel menjelaskan bernilai 0.

Variabel jangka pendek dari model persamaan diatas ditunjukkan oleh SBI (-1), Kurs (-1) PE(-1) dan KM(-1), koefisien regresi jangka pendek dari ECM jumlah kredit ditunjukkan oleh besarnya koefisien variabel-variabel diatas. Variabel jangka panjang dari model tersebut ditunjukkan oleh D (SBI), D(Kurs), D (PE), D(KM) sedangkan koefisien jangka panjang regresi ECM diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Konstanta : } b_0 / b_9 & : 0,500366 / 0,191372 & : 2,61462 \\ \text{D (SBI) : } (b_5 + b_9) / b_9 & : (-0,193471 + 0,191372) / 0,191372 & : 2,01097 \\ \text{D (Kurs) : } (b_6 + b_9) / b_9 & : (-0,191366 + 0,191372) / 0,191372 & : 3,13525 \\ \text{D (PE) : } (b_7 + b_9) / b_9 & : (-0,187808 + 0,191372) / 0,191372 & : 0,01862 \\ \text{D (KM) : } (b_8 + b_9) / b_9 & : (-0,191375 + 0,191372) / 0,191372 & : -1,56763 \end{aligned}$$

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji t (Uji secara individu)

Pengujian secara sendiri-sendiri terhadap koefisien regresi masing-masing variabel bebas dengan menggunakan level of significant sebesar 5% diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Koefisien regresi dari konstanta sebesar 0,500366 dengan probabilitas 0,0010 signifikan dan positif pada tingkat signifikansi 5 persen.
- 2) Koefisien dari variabel SBI dalam jangka panjang sebesar 2,01097 dengan probabilitas 0,0009 signifikan dan positif pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti variabel SBI dalam jangka panjang

secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit pada tingkat signifikansi 5%.

- 3) Koefisien dari variabel kurs dalam jangka panjang sebesar 3,13525 dengan probabilitas 0,0000 signifikan dan positif pada tingkat signifikansi 5 %. Hal ini berarti variabel kurs dalam jangka panjang secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit pada tingkat signifikansi 5%.
- 4) Koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sebesar 0,01862 dengan probabilitas 0,1587 tidak signifikan dan negatif pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit pada tingkat signifikansi 5 persen
- 5) Koefisien dari variabel kredit macet dalam jangka panjang sebesar – 1,56753 dengan probabilitas 0,3623 tidak signifikan dan negatif pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti variabel kredit macet dalam jangka panjang secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (jumlah kredit) pada tingkat signifikansi 5 persen.
- 6) Koefisien dari variabel SBI dalam jangka pendek sebesar –0,193471 dengan probabilitas 0,0002 signifikan dan negatif pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti variabel SBI dalam jangka pendek secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (jumlah kredit) pada tingkat signifikansi 5 persen.

- 7) Koefisien dari variabel kurs dalam jangka pendek sebesar  $-0,191366$  dengan probabilitas  $0,0003$  signifikan dan negatif pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti variabel kurs dalam jangka pendek secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (jumlah kredit) pada tingkat signifikansi 5 persen.
- 8) Koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek sebesar  $0,187808$  dengan probabilitas  $0,0005$  signifikan dan positif pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (jumlah kredit) pada tingkat signifikansi 5 persen.
- 9) Koefisien dari variabel kredit macet dalam jangka pendek sebesar  $-0,191375$  dengan probabilitas  $0,0003$  signifikan dan negatif pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti variabel kredit macet dalam jangka pendek secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (jumlah kredit) pada tingkat signifikansi 5 persen.
- 10) Koefisien dari variabel ECT sebesar  $0,191372$  dengan probabilitas  $0,0000$  signifikan dan positif pada tingkat signifikansi 5 persen. Artinya bahwa variabel-variabel tersebut secara signifikan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap jumlah kredit perbankan.

b. Uji F (Uji secara bersama-sama)

Uji F adalah uji untuk mengetahui besarnya pengaruh yang terjadi pada variabel-variabel independen secara bersama-sama dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Besarnya nilai probabilitas dari F- statistik dalam model persamaan ini adalah sebesar 0,000000 maka dapat dikatakan bahwa semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan ekonomi dan kredit macet bersama dapat mempengaruhi jumlah kredit perbankan selama periode Januari 1999 sampai dengan Desember 2003.

c. Uji Goodness of fit (uji  $R^2$ )

Besarnya  $R^2$  menunjukkan pengaruh yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) terhadap variabel tidak bebas (dependen). Besarnya nilai  $R^2$  hasil analisis adalah 0,821588 artinya bahwa sekitar 82,5188 % variabel-variabel jumlah kredit dapat dijelaskan oleh variasi variabel tingkat suku bunga SBI, Kurs, pertumbuhan ekonomi dan kredit macet. Sedangkan sisanya sebesar 17,4812 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

**6. Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Dalam penelitian ini akan

digunakan metode *klein* untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r^2$  regresi variabel independen terhadap variabel independen lainnya dengan nilai  $R^2$  dari regresi ECM berganda jika  $R^2 > r^2$ , maka disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas dan sebaliknya.

Tabel IV. 13 Hasil uji klein untuk mendeteksi multikolinearitas

Variabel	$r^2$	Tanda	$R^2$ model ECM	Kesimpulan
DSBI-DKURS	0,033080	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DSBI-DPE	0,016751	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DSBI-DKM	0,000103	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DSBI-SBI(-1)	0,192124	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DSBI-KURS(-1)	0,132103	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DSBI-PE(-1)	0,028564	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DSBI-KM(-1)	0,060090	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKURS-DPE	0,002915	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKURS-DKM	0,007148	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKURS-SBI(-1)	0,044359	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKURS-SBI(-1)	0,064142	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKUR-KURS(-1)	0,001125	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKURS-PE(-1)	0,000216	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKURS-KM(-1)	0,000081	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DPE-DKM	0,149354	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DPE-SBI(-1)	0,000351	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DPE-KURS(-1)	0,910110	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DPE-PE(-1)	0,039772	>	0,849359	Multikolinearitas
DPE-KM(-1)	0,006699	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKM-SBI(-1)	0,003434	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKM-KURS(-1)	0,000013	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKM-PE(-1)	0,028522	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
DKM-KM(-1)	0,008679	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
SBI (-1)-KURS (-1)	0,104920	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
SBI (-1)-PE (-1)	0,284525	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
SBI (-1)-KM (-1)	0,000099	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
KURS (-1)-KM (-1)	0,084724	<	0,849359	Nonmultikolinearitas
PE (-1) –KM (-1)	0,031033	<	0,849359	Nonmultikolinearitas

Sumber : Print out Komputer

Dari tabel tersebut di atas ditunjukkan bahwa semua korelasi antar variabel independen memiliki nilai  $r^2$  yang lebih kecil jika

dibandingkan dengan  $R^2$  ( $r^2 < R^2$ ). berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terdapat masalah multikolinearitas, Kecuali pada variabel  $D(PE)$  atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan  $PE(-1)$  atau pertumbuhan ekonomi jangka pendek terjadi multikolinearitas. Dalam jangka pendek, kebijakan moneter yang ekspansif dapat digunakan untuk memberikan stimulus pada perekonomian. Akan tetapi dalam dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian riil memerlukan waktu yang cukup lama dengan ketidakpastian yang tinggi. Namun dalam jangka panjang, ketika kebijakan moneter tersebut dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan inflasi, yang terjadi adalah ekspektasi masyarakat semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi menurun. Dalam jangka panjang ketidakstabilan perekonomian semakin meningkat terutama ketika bank sentral atau Bank Indonesia tidak independensi dari pengaruh politisi yang kurang sabar melihat hasil dari suatu kebijakan. Bank sentral yang tidak independen seringkali tidak diintervensi untuk melakukan kebijakan yang ekspansif melalui penurunan suku bunga dalam rangka mengurangi pengangguran. Jika hal ini dilakukan pada saat inflasi ke depan sedang menunjukkan kecenderungan yang meningkat, maka Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga yang justru menambah ketidakstabilan makroekonomi. Kenaikan suku bunga ini akan mengakibatkan permintaan kredit turun yang pada gilirannya mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

berdasarkan analisa ekonometrika, “multikolinearitas merupakan suatu fenomena regresi sampel” (Gujarati, 2000: 159).

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam fungsi regresi terdapat gangguan yang mempunyai varian yang tidak sama. Hal ini menyebabkan penaksir OLS tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Pada penelitian ini untuk mendeteksi masalah Heteroskedastisitas akan digunakan uji *park*. Pengujian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama : dilakukan regresi dari model yang dipilih yang kemudian akan didapatkan nilai residualnya. Tahap kedua adalah menguadratkan nilai residu dan meregresinya dengan semua variabel bebas. Jika nilai yang diperoleh signifikan maka terdapat masalah heteroskedastisitas dan begitu juga sebaliknya.

Tabel IV.14  
Hasil Uji Park untuk mendeteksi Heteroskedastisitas

Variabel	t-statistik	Probabilitas	Hasil Uji t
Konstanta	-0,000004	0,9987	Homoskedastisitas
DSBI	-0,000010	0,7939	Homoskedastisitas
D KURS	0,000000	0,8792	Homoskedastisitas
DPE	-0,000006	0,9592	Homoskedastisitas
DKM	-0,000000	0,9304	Homoskedastisitas
SBI (-1)	0,000159	0,8811	Homoskedastisitas
KURS (-1)	0,000158	0,8827	Homoskedastisitas
PE (-1)	0,000158	0,8885	Homoskedastisitas
KM (-1)	-0,000158	0,8827	Homoskedastisitas

Sumber : print out komputer

Dari tabel IV. 14 diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari semua variabel melebihi nilai taraf signifikansi 5%, sehingga pada model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai adanya korelasi antara unsur-unsur variabel gangguan yang diutarakan menurut waktu atau ruang. Pada keadaan ini menyebabkan penafsir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Pada penelitian ini dimana model yang digunakan adalah model koreksi kesalahan, maka akan digunakan *lagrange multiplier test* untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Uji ini dilakukan dengan meregres semua variabel bebas dan variabel tak bebas dan kemudian dilakukan uji *Breusch Gogfrey* terhadap residu dari hasil regresi tersebut. Dari model tersebut akan didapat nilai observasi  $R^2$  Square (lihat lampiran). Nilai observasi  $R^2$  Square ini dibandingkan dengan  $X^2$  (0,05) dengan derajat kebebasan berdasarkan lagnya yaitu 1, dimana nilai  $X^2$  (0,05) adalah nilai Chi-square dalam tabel dengan lag 1. Jika nilai observasi  $R^2$  Square  $> X^2$ , maka terdapat masalah autokorelasi dan sebaliknya.

Dari model (lihat lampiran) didapat nilai observasi  $R^2$  Square adalah sebesar 0,550409 sedangkan nilai dari  $X^2$  (1) dengan  $\alpha$  sebesar 5% adalah sebesar 3,84146. dalam hal ini dapat dilihat bahwa nilai observasi  $R^2$  Square  $< X^2$  maka tidak terjadi masalah autokorelasi.

Mengingat semua asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dan uji autokorelasi dapat dikatakan terpenuhi dalam model ECM, maka tafsiran-tafsiran yang diperoleh dalam perhitungan regresi ECM tersebut mempunyai varian minimum bersifat tidak bias dan linear. Dengan demikian pengujian secara statistik dapat dilakukan guna

melihat tingkat signifikasi variabel-variabel penjelas baik secara individual maupun bersama serta melihat besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen.

#### **7. Interpretasi hasil analisis dengan pendekatan error Correction Model**

Dari hasil yang telah dilakukan dengan menggunakan model linear ECM dapat dikatakan bahwa penafsir OLS yang diperoleh dari perhitungan regresi model tersebut bersifat BLUE, asumsi model linear klasik dipenuhi serta pengujian secara statistik juga menghasilkan tafsiran-tafsiran yang berarti secara statistik. Dari hasil estimasi tersebut diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,825188 yang berarti bahwa sebesar 82,5188% variasi variabel jumlah kredit dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang meliputi : tingkat suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan ekonomi dan kredit macet, sedangkan sisanya 17,4812 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Selanjutnya akan dilakukan interpretasi terhadap koefisien regresi dari variabel independen dan variabel dependen pada model hasil penyelesaian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil interpretasi dan hasil regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap jumlah kredit perbankan.

Hasil estimasi ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel SBI memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan. Hubungan yang negatif sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa variabel SBI mempunyai hubungan negatif dan signifikan dengan jumlah kredit perbankan. Dalam jangka pendek, koefisien variabel SBI sebesar –

0,193471 signifikan pada tingkat signifikansi 5% besarnya koefisien variabel SBI ini menunjukkan bahwa setiap 1 kenaikan satuan SBI akan menurunkan jumlah kredit sebesar 0,193471 persen dan sebaliknya setiap penurunan 1 satuan SBI akan meningkatkan jumlah kredit sebesar 0,193471 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dalam jangka panjang koefisien variabel SBI sebesar 2,01097 signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 5% besarnya koefisien variabel SBI ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan SBI akan meningkatkan jumlah kredit sebesar 2,01097 persen dan sebaliknya setiap penurunan 1% SBI akan meningkatkan jumlah kredit sebesar 2,01097 persen.

Dalam jangka pendek, kondisi ini sesuai dengan kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral (BI) melalui operasi pasar terbuka. Melalui kebijakan ini, dalam kondisi makro ekonomi pada masa pasca krisis yang stabil memberikan kontribusi yang berarti terhadap proses pemulihan ekonomi. Dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi proses pemulihan ekonomi, Bank Indonesia secara konsisten mengarahkan penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan menurunnya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan itu, suku bunga SBI satu bulan terus menurun yang kemudian direspon oleh penurunan suku bunga kredit. Bagi sektor riil, penurunan suku bunga kredit ini mengakibatkan meningkatnya permintaan jumlah kredit.

Walaupun memasuki tahun 2002 penurunan suku bunga SBI belum sepenuhnya ditransmisikan dalam penurunan suku bunga kredit, akan tetapi secara umum pada masa krisis fungsi intermediasi perbankan

melalui pengaturan kredit telah menunjukkan perbaikan. Hal ini dilakukan penurunan suku bunga SBI pada tahun 2002 mendapat tantangan positif yang lebih besar daripada di tahun 2002 dan 2003 dari pelaku pasar uang antar bank yang kemudian berpengaruh terhadap penurunan suku bunga kredit. Sedangkan dari sisi permintaan kredit baik untuk konsumsi maupun investasi, penurunan suku bunga kredit ini juga mendapat respon positif sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Akan tetapi dalam jangka panjang, penurunan suku bunga SBI akan mengakibatkan jumlah kredit berkurang. Hal ini diakibatkan dalam jangka panjang, masih engganya perbankan dalam menyalurkan kredit. Kondisi ini terkait dengan belum pulihnya sektor riil serta ketidakpastian yang tinggi dalam jangka panjang, sehingga perbankan cenderung untuk menanamkan dananya pada asset yang aman, seperti : SBI dan obligasi negara.

b. Pengaruh Kurs terhadap jumlah kredit.

Dalam jangka pendek koefisien variabel kurs sebesar  $-0,191366$  signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien kurs ini menunjukkan bahwa jika kurs menguat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan jumlah kredit sebesar  $0,191366$  persen dan sebaliknya jika kurs melemah sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan jumlah kredit sebesar  $0,191366$  persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kondisi ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan di awal penelitian, yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif terhadap

jumlah kredit. Hal ini terkait dengan kegiatan spekulasi dalam perdagangan rupiah - valas oleh investor / para pelaku ekonomi, sehingga dengan naiknya nilai tukar akan meningkatkan permintaan kredit. Sejak Indonesia memasuki periode pasca krisis yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang diikuti dengan pelepasan rentan (*band*) nilai tukar dan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas, faktor ketidakpastian di bidang politik, sosial maupun ekonomi sangat mewarnai perekonomian kita. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kegiatan spekulasi. Dengan adanya depresiasi, maka kesempatan ini digunakan oleh para spekulan untuk membeli valas dalam rangka transaksi perdagangan di luar negeri. Peningkatan permintaan terhadap valas inilah yang mendorong permintaan kredit dalam rupiah.

Dalam jangka panjang, koefisien variabel kurs sebesar 3,13525 signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Besarnya koefisien variabel kurs ini menunjukkan bahwa kurs menguat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan sebesar 3,13525 persen, dan sebaliknya jika kurs melemah sebesar 1 satuan, maka akan terjadi penurunan jumlah kredit sebesar 3,13525 persen. Kondisi pengaruh kurs dalam jangka panjang ini sesuai dengan hipotesa di awal penelitian, yang menyatakan bahwa variabel kurs memiliki hubungan positif dan signifikan dengan jumlah kredit. Dalam jangka panjang, hal ini berarti penguatan kurs mendapat sentimen positif dari perbankan maupun masyarakat untuk mendorong sektor riil. Selain itu, hal ini terkait dengan kebijakan internasionalisasi rupiah, yaitu kebijakan untuk

meminimumkan kesempatan berspekulasi mata uang rupiah yang antara lain dengan membatasi akses perolehan rupiah bagi spekulasi dengan tetap mendorong kegiatan investasi di dalam negeri.

c. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kredit.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan. Hubungan yang negatif tidak sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan jumlah kredit perbankan. Dalam jangka pendek, koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar  $-0,187808$  signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Besarnya koefisien variabel pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan jumlah kredit sebesar 0,187808 persen dan sebaliknya, jumlah kredit akan meningkat sebesar 0,187808 persen jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sedangkan dalam jangka panjang, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01862 dan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Besarnya koefisien variabel pertumbuhan ekonomi ini berarti jika pertumbuhan ekonomi naik 1 satuan, maka jumlah kredit akan meningkat sebesar 0,01862 persen dan sebaliknya, jumlah kredit akan berkurang

sebesar 0,01862 persen jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil estimasi tersebut menunjukkan dalam jangka pendek, perkembangan jumlah kredit dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh meningkatnya jumlah kredit. Hal ini diakibatkan, dalam jangka pendek sisi penawaran kredit lebih kuat dalam mempengaruhi penyaluran kredit dibandingkan dengan sisi permintaan kredit. Kondisi ini terkait dengan masih belum pulihnya sektor riil, sehingga investor kurang berminat untuk melakukan investasi sedangkan sektor perbankan masih menempatkan dananya pada asset yang aman, seperti : SBI dan obligasi negara.

Sedangkan dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif, sehingga sesuai dengan hipotesis penelitian yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, perubahan pertumbuhan ekonomi tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah kredit. Hal ini terkait dengan masih tingginya risiko dunia usaha pada masa pasca krisis, khususnya sektor korporasi yang dicerminkan dengan tingginya rasio utang terhadap modal perusahaan. Selain itu, preferensi bank dalam menempatkan dananya juga berubah. Bank lebih tertarik menempatkan dananya pada SBI dan obligasi negara serta pada pasar uang antarbank yang berisiko rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran kredit

pada masa pasca krisis lebih dipengaruhi oleh faktor penawaran daripada sisi permintaan.

d. Pengaruh kredit macet terhadap jumlah kredit

Hasil estimasi menunjukkan koefisien jangka pendek untuk variabel kredit macet memiliki koefisien negatif yaitu sebesar  $-0,191375$  dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan kredit macet sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan jumlah kredit sebesar 0,191375 persen dan sebaliknya jika terjadi penurunan kredit macet sebesar 1 satuan, maka jumlah kredit akan meningkat sebesar 0,191375 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kondisi ini sesuai dengan hipotesa penelitian, dimana dengan adanya peningkatan kredit macet akan mengakibatkan penurunan pada jumlah kredit. Kondisi ini terkait dengan pendapatan yang akan diterima perbankan. Dalam menyalurkan kreditnya, banyak pertimbangan yang dilakukan bank dalam rangka pengembalian dananya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut disebabkan oleh terdapatnya permasalahan dalam proses restrukturisasi kredit sebagai akibat kondisi perekonomian yang belum menunjang, terdapatnya potensi peningkatan kredit macet di masa mendatang. Dengan meningkatnya kredit macet ini berarti akan menurunkan CAR dimana kondisi ini akan berpotensi mengancam stabilitas keuangan.

Dalam jangka panjang, koefisien variabel kredit macet memiliki hubungan negatif yaitu sebesar  $-1,56763$  dan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Artinya jika kredit macet mengalami peningkatan 1

satuan maka akan menyebabkan jumlah kredit turun sebesar 1,56763 persen dan sebaliknya, jika kredit macet mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka jumlah kredit akan meningkat sebesar 1,56763 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Kondisi ini sesuai dengan hipotesa yang dikemukakan di awal penelitian, akan tetapi perubahan yang terjadi pada kredit macet tidak begitu berpengaruh terhadap perubahan jumlah kredit. Hal ini disebabkan dalam jangka panjang pihak perbankan memandang sepanjang calon debitur dapat menjamin pembayaran kredit maka risiko kredit akan dinilai rendah. Sebagian besar portfolio perbankan masih didominasi oleh kredit korporasi. Dengan lambannya pemulihan sektor riil khususnya korporasi menyebabkan lambannya pemulihan kinerja perbankan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa mendatang dan untuk memperbaiki portfolio perbankan adalah melalui peningkatan kredit kepada sektor UKM. Di sisi lain bank masih enggan dalam menyalurkan kreditnya untuk sektor usaha kecil, meskipun usaha kecil cenderung lebih memiliki kualitas kredit yang lebih baik. Hal ini disebabkan bank masih berpandangan administrasi pada usaha kecil sangat rumit dan memerlukan biaya tinggi.

e. Biaya ketidak seimbangan dalam perubahan jumlah kredit (ECT)

Koefisien dari variabel ECT sebesar 0,191372 dengan probabilitas 0,0000 signifikan pada tingkat signifikansi pada 5 %, artinya bahwa biaya ketidakseimbangan dalam perubahan jumlah kredit pada periode sebelumnya yang disesuaikan dengan periode sekarang adalah sebesar 19,1372%. Nilai probabilitas yang menunjukkan signifikansi variabel

ECT ini berarti bahwa analisis ECM yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid (shahih) dan dapat menjelaskan variasi pada variabel tak bebas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai fungsi intermediasi perbankan pasca krisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Hasil Uji Model Koreksi Kesalahan**

- a. Berdasarkan hasil analisis, variabel SBI memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit perbankan dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap jumlah kredit. Kondisi dalam jangka pendek ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Melalui kebijakan pasar terbuka oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, dalam kondisi makroekonomi yang relatif stabil pada masa pasca krisis telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap proses pemulihan ekonomi. Dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi proses pemulihan ekonomi, Bank Indonesia secara konsisten mengarahkan penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan menurunnya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan itu, suku bunga SBI 1 bulan terus menurun yang kemudian direspon oleh penurunan suku bunga kredit bagi sektor riil, penurunan suku bunga kredit ini mengakibatkan meningkatnya permintaan kredit. Akan tetapi dalam jangka panjang, penurunan suku bunga SBI tidak direspon oleh penurunan suku bunga kredit perbankan. Hal ini terkait dengan ketidakpastian perekonomian dalam jangka

panjang, sehingga sektor perbankan cenderung menanamkan dananya pada asset yang aman, seperti : SBI dan obligasi negara

- b. Variabel kurs memiliki hubungan negatif dan signifikansi 5 % terhadap jumlah kredit perbankan dalam jangka pendek. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini terkait dengan kegiatan spekulasi dalam perdagangan rupiah-valas oleh para investor dan para pelaku ekonomi lainnya. Dengan adanya depresiasi, maka kesempatan ini digunakan oleh para spekulan untuk membeli valas dalam rangka transaksi perdagangan di luar negeri. Peningkatan permintaan terhadap valas inilah yang mendorong permintaan kredit dalam rupiah. Sedangkan dalam jangka panjang, koefisien variabel kurs memiliki tanda positif terhadap jumlah kredit dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis di awal penelitian. Hal ini terkait dengan adanya sentimen positif dari masyarakat dan perbankan. Selain itu, hal ini terkait dengan kebijakan internasionalisasi rupiah, yaitu kebijakan untuk meminimumkan kesempatan berspekulasi mata uang rupiah dengan membatasi akses perolehan rupiah bagi spekulan dan tetap mendorong kegiatan investasi di dalam negeri.
- c. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap jumlah kredit dan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 % dalam jangka panjang. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi yang positif ini menunjukkan bahwa kondisi ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Akan tetapi perubahan pertumbuhan ekonomi tidak begitu

berpengaruh terhadap jumlah kredit. Hal ini terkait dengan masih tingginya risiko dunia usaha pada masa pasca krisis. Sedangkan dari sisi penawaran, preferensi bank dalam menempatkan dananya juga berubah. Bank lebih tertarik menempatkan dananya pada SBI dan obligasi negara serta pasar uang antar bank yang berisiko rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penyaluran kredit pada masa pasca krisis lebih dipengaruhi oleh faktor penawaran daripada sisi permintaan. Sedangkan dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit. Hal ini berarti sisi penawaran kredit lebih berpengaruh terhadap jumlah kredit daripada sisi permintaan kredit, yang disebabkan oleh kurangnya keinginan investor untuk melakukan investasi serta masih engganya perbankan dalam menyalurkan kredit.

- d. Variabel kredit macet memiliki hubungan negatif terhadap jumlah kredit dan tidak signifikan pada signifikansi 5 % dalam jangka pendek. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini terkait dengan pertimbangan perbankan terhadap tingkat pengembalian modal dan pendapatan bunga yang akan diterima. Dengan meningkatnya kredit macet berarti akan menurunkan CAR, dimana kondisi ini berpotensi mengancam stabilitas keuangan. Sedangkan dalam jangka panjang, variabel kredit macet memiliki hubungan negatif terhadap jumlah kredit, akan tetapi tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis penelitian, akan tetapi perubahan yang terjadi pada kredit macet tidak begitu berpengaruh terhadap

perubahan jumlah kredit. Sebagian besar portfolio perbankan masih didominasi oleh kredit korporasi. Dengan lambannya pemulihan sektor riil khususnya korporasi menyebabkan lambannya pemulihan kinerja perbankan. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi di masa mendatang adalah melalui peningkatan kredit kepada sektor usaha kecil. Di sisi lain, bank masih enggan dalam menyalurkan dananya kepada usaha kecil, meskipun usaha kecil cenderung lebih memiliki kualitas kredit yang lebih baik. Hal ini disebabkan bank masih berpandangan administrasi terhadap usaha kecil sangat rumit dan memerlukan biaya tinggi.

- e. Berdasarkan hasil uji F atau uji secara bersama-sama, semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat suku bunga SBI, kurs, pertumbuhan ekonomi dan kredit macet bersama dapat mempengaruhi jumlah kredit perbankan selama periode Januari 1999 sampai dengan Desember 2003.

## **2. Hasil Uji Kausalitas Granger**

Berdasarkan hasil perhitungan, pada lag 1 terdapat hubungan satu arah, yaitu jumlah kredit dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjelaskan jumlah kredit, sedangkan pada lag 2 dan 3 terjadi hubungan satu arah antara jumlah kredit dan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan jumlah kredit, namun jumlah kredit tidak dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi.

Pada lag-lag berikutnya, yaitu lag 4, 5, 6 tidak terjadi hubungan antara kedua variabel yaitu jumlah kredit dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat saling menjelaskan atau tidak dapat saling mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan mempengaruhi jumlah kredit, akan tetapi karena belum pulihnya sektor riil, jumlah kredit tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## **B.Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah ada, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa variabel SBI memiliki hubungan negatif terhadap jumlah kredit dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 % dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang, variabel SBI memiliki hubungan positif dengan jumlah kredit dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 % . Dalam jangka pendek, hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, sedangkan dalam jangka panjang tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. yaitu dengan adanya penurunan suku bunga SBI maka akan terjadi peningkatan jumlah kredit dan sebaliknya. Dengan demikian, dalam jangka pendek kebijakan moneter dalam rangka proses pemulihan perekonomian nasional mendapat respon positif dari sisi permintaan kredit. Dalam keadaan kestabilan moneter dan makroekonomi, maka dapat dilakukan kebijakan moneter ekspansif untuk memberikan stimulus pada perekonomian melalui penurunan suku bunga kredit. Tujuan ini akan

tercapai, apabila mendapat respon positif dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan kredit. Dari sisi permintaan, sektor riil harus mampu memanfaatkan kesempatan ini baik untuk konsumsi maupun untuk tujuan produksi. Oleh karena itu diperlukan kondisi ekonomi sosial politik yang stabil, seperti tingkat inflasi yang rendah, sehingga dapat mendorong produksi dan konsumsi. Sedangkan dari sisi penawaran, perbankan hendaknya bisa menurunkan suku bunga kredit sesuai dengan penurunan suku bunga SBI. Selain itu, perbankan hendaknya dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan meningkatkan penyaluran kredit dan mengurangi penempatan dan pada SBI, obligasi negara serta pasar uang antar bank. Oleh karena itu, perlu diciptakan kondisi yang mendukung seperti : kondisi politik dan keamanan yang stabil, situasi makroekonomi yang kondusif. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan tidak hanya menggunakan instrumen SBI sebagai instrumen pokok dalam mempengaruhi sektor riil, tetapi juga menggunakan instrumen lain seperti himbauan moral serta instrumen cadangan minimum.

2. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa dalam jangka pendek, variabel kurs memiliki koefisien negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Kondisi ini tidak sesuai dengan hipotesis di awal penelitian. Hal ini terkait dengan kegiatan spekulasi oleh para spekulan sejalan dengan depresiasi rupiah. Ini berarti depresiasi menyebabkan permintaan kredit meningkat, sedangkan penggunaan kredit ini kurang mendorong kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan suatu kebijakan untuk membatasi kesempatan berspekulasi mata uang rupiah dengan membatasi akses

perolehan rupiah dengan tetap mendorong investasi di dalam negeri. Untuk kebijakan ke depan yang dapat dilakukan diantaranya : pembatasan pemberian kredit dalam rupiah atau valas, penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan pemberian kredit, pembatasan transfer rupiah untuk transaksi yang tidak terkait dengan kegiatan ekonomi Indonesia. Akan tetapi dalam jangka panjang, variabel kurs memiliki koefisien positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 %, dimana hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Dalam jangka panjang, kebijakan meminimalkan kegiatan spekulasi ini telah efektif. Selain itu, dalam hal ini penguatan rupiah mendapat respon positif dari masyarakat maupun dari perbankan. Untuk kebijakan ke depan yang dapat dilakukan diantaranya dengan : mendorong modal masuk di dalam negeri, membatasi permintaan dollar yang tidak terkait dengan kegiatan sektor ekonomi riil, memperbaiki pelaksanaan restrukturisasi utang swasta dan menciptakan situasi sosial politik dalam negeri yang kondusif.

3. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 %, jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap jumlah kredit . Dalam jangka panjang, hal ini berarti sesuai dengan hipotesis penelitian. Akan tetapi perubahan pada pertumbuhan ekonomi tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah kredit. Ini berarti menunjukkan kurangnya permintaan kredit dari sektor riil yang disebabkan oleh masih tingginya risiko dunia usaha dan ketidakpastian dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk kebijakan ke

depan yang dapat dilakukan adalah menciptakan kondisi sosial politik dan makroekonomi yang stabil yang mendukung berkembangnya sektor riil, meningkatkan kinerja ekspor nonmigas, meningkatkan jumlah cadangan devisa. Sedangkan dari sisi penawaran kredit, perbankan hendaknya dapat mengembangkan penyaluran kredit ke sektor retail yang memiliki potensi besar untuk berkembang serta memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan sektor lainnya seperti korporasi. Selain itu perlu diciptakan kondisi sosial politik yang stabil untuk mendukung perkembangan sektor riil dalam melakukan investasi.

4. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa dalam jangka pendek variabel kredit macet memiliki koefisien negatif terhadap jumlah kredit dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Sedangkan dalam jangka panjang, variabel kredit macet memiliki koefisien negatif dan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. Hal ini disebabkan masih enggannya perbankan dalam menyalurkan kredit. Sebagian besar portfolio perbankan masih didominasi oleh kredit korporasi. Dengan lambannya pemulihan sektor riil khususnya korporasi menyebabkan lambannya pemulihan kinerja sektor perbankan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa mendatang dan untuk memperbaiki portfolio perbankan adalah melalui peningkatan kredit kepada sektor UKM dengan tetap melakukan *selective credit controll*. Berdasarkan survey yang dilakukan Bank Indonesia, risiko kredit macet untuk sektor UKM relatif rendah. Dari jenis segi penggunaan, saat ini kredit UKM didominasi untuk tujuan konsumsi yang dapat memicu permintaan barang

dan jasa dari pasar domestik maupun internasional. Selain itu, peningkatan permintaan itu merupakan potensi pasar yang memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya

5. Berdasarkan hasil uji kausalitas granger dinyatakan bahawa hanya terdapat hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah kredit, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan jumlah kredit namun jumlah kredit tidak dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dari sisi permintaan kredit lebih kuat daripada sisi penawaran kredit. Oleh karena itu, diperlukan penyaluran kredit untuk sektor UKM yang memiliki potensi besar untuk berkembang serta menciptakan stabilitas sosial politik untuk mendukung investasi. Selain itu dalam hal ini, pemerintah hendaknya bisa menyediakan alternatif pembiayaan bagi sektor riil seperti, mengoptimalkan pasar modal sehingga sektor riil tidak tergantung pada kredit perbankan. Sedangkan dari masyarakat atau debitur hendaknya dapat lebih memberdayakan kredit sebagai salah satu sumber dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, et all. 2001. *Credit Crunch In Indonesia In Afermath of The Crisis* [on – line]. <http://www.bi.com>.
- Ahmad, Aulia. 2003. *Analisis Peranan Jalur Pinjaman Bank Pada Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*, Volume 1, Nomor 03, Desember 2003.
- Aliman. 2000. *Teori Makro Ekonomi edisi keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI-PRESS.
- Arya, Suta I Putu Gede. 2004. *BPPN The End*. Jakarta : Yayasan Satria Bhakti.
- Bank Indonesia, 2001. *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis (Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan)*. Jakarta : PPSK BI.
- Bank Indonesia , 2003. *Bank Sentral Republik Indonesia (Tinjauan Kelembagan, Kebijakan dan Organisasi)*. Jakarta: PPSK BI.
- Chandler, Lester. 1985. *Sistem Moneter Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Diaz, Dimpuan. 2004 “*Analisis Pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU no. 23 Tahun 1999.*” Skripsi- FE UNS.
- Djarwanto. 1998. *Statistik Induktif*. Yogyakarta : BPFE.
- Edward and Erward. 1995. *Bank Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Fischer, Rudiger Dornbusch Stanley. 1994. *Ekonomi Makro Edisi 4*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Fischer, Rudiger Dornbusch Stanley. 1994. *Ekonomi Makro Edisi 5*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometric*. Jakarta : Erlangga.
- Herlambang, Tedy. 2001. *Ekonomi Makro (Teori, Analisis dan Kebijakan)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indert, Peter dan Charles. 1993. *Ekonomi Internasional Edisi ke –8*. Jakarta : Erlangga.
- Insukindro. 1992. *Pembentukan Model dalam Penelitian Ekonomi*: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia No.1 Tahun VII

- Inder, Peter dan Charles. 1993. *Ekonomi Internasional Edisi 8*. Jakarta : Erlangga.
- Iswardono, S. 1994. *Uang dan Bank Edisi 4*. Yogyakarta : BPFE.
- Khalwaty, Tajul. 200. *Inflasi dan solusinya*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- K. Judiseno, Rimskey. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lipsey, Richard. 1991. *Pengantar Makro Ekonomi Edisi 8*. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, George. 2000. *Teori Makro Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Modul Laboratorium Ekonometrika. 2003. FE UNS.
- Mongid, Abdul. 2004. *Mahalnya Ongkos Stabilisasi Moneter*. Surabaya : Media Indonesia. [on -line].<http://www.google.com>.
- Mulyanto. 1999. Teknik Kointegrasi dan Model Koreksi Kesalahan : “salah satu alternatif pemecahan analisis data deret waktu “. *Makalah disampaikan dalam Seminar Rutin Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi UNS Surakarta*.
- Mulyani, Sri. 1988. *Teori Moneter* . Jakarta : FE UI.
- Mulyono, Teguh Pujo. 1987. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta : BPFE.
- Nopirin, Ph. 2000. *Ekonomi Moneter*, Jakarta : UI Press.
- Partadiredjo, Ace.1997. *Perhitungan Pendapatan Nasional*. Jakarta : LP3ES.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes, Leslie Davies. 1998. *Kamus Lengkap Ekonomi.Edisi ke-2*.Jakarta : Erlangga.
- P. Kent, Rayment. 1965. *Money and Banking*. US : Tronto London.
- Rachbini, Didik. 2000. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta : PT Mardi Mulyo.
- Reksoprayitno, Soediyono. 1981. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Umum dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.
- Riady, Mochtar. 1999. *Mencari Peluang di Tengah Krisis*. Jakarta : Universitas Pelita Harapan Press.
- Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional Edisi Kelima Jilid 2*. Jakarta : PT Gelora Aksara.

- Santoso, Rudy Tri. 1993. *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1987. *Uang dan Bank*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Susanti, Hera. 2000. *Indikator-indikator Makro Ekonomi Edisi 14*. Jakarta : Erlangga.
- Syarif, Arbi. 2003. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta : Djambatan.
- Suyatno, Thomas. 1993. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- Untung, Budi 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.
- Wijaya, Faried. 1997. *Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Yogyakarta : BPFE.
- UU. No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- UU. No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Indonesia.
- UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.